

Sejarah Sosial

Di Daerah

SUMATRA BARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK-PROYEK DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL

1983/1984

MILIK DEPARTEMEN P DAN K
TIDAK DIPERDAGANGKAN

SEJARAH SOSIAL

DAERAH SUMATRA BARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK-PROYEK DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1983/1984

Penyunting :

Dr. Taufik Abdullah

Dr. S. Budhisantoso

Gambar kulit oleh :

Iswar Ks

Susunan Tim :

Koordinator : Dr. Taufik Abdullah

Ketua : JR. Chaniago

Anggota : 1. Ninuk Probonegoro Kleden

2. Ishac Taher

3. Hasan Basri

4. Bustami

5. Zaiful Anwar

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan.

Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Juni 1983.

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio.—

NIP. 130119123.

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; yang antara lain menggarap penulisan kesejarahan perihal Sejarah Masyarakat (Sejarah Sosial) di seluruh wilayah Indonesia.

Penulisan Sejarah Sosial dimaksudkan ialah sejarah sekelompok manusia dengan ciri-ciri etnis tertentu yang berperan sebagai pendukung kebudayaan lokal; misalnya masyarakat Betawi di DKI Jakarta. Keadaan masyarakat setiap daerah selalu menjalani perubahan dan pertumbuhan. Karena adanya proses sosialisasi, yang merupakan modal berharga dalam usaha mewujudkan upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka.

Dengan tersusunnya Sejarah Sosial tiap-tiap daerah dari wilayah Indonesia untuk mendapatkan gambaran tentang kehidupan masyarakat tersebut; seperti keadaannya pada masa kini, dengan latar belakang masa lampau, yang memberikan proyeksi pada masa datang.

Di samping itu Sejarah Sosial juga sangat berguna bagi pengambilan kebijaksanaan pada berbagai bidang. Selanjutnya pengetahuan sejarah sosial akan membantu menumbuhkan sikap saling mengerti, baik dalam pergaulan untuk masyarakat di Propinsi ataupun dalam skala nasional, yang merupakan modal utama bagi terciptanya kerukunan dan kesejahteraan hidup di masyarakat itu sendiri yang diperlukan untuk Pembangunan.

Adapun tujuan penulisan Sejarah Sosial itu sendiri untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat tertentu serta melengkapi bahan untuk penulisan sejarah daerah dan sejarah nasional

yang mencakup sektor lokasi, demografi, pola pemukiman, pemenuhan hidup, kebahasaan, sistem kekerabatan, keagamaan maupun unsur pembangunan.

Dengan demikian proses sosialisasi sebagai kejadian sejarah akan memberikan kesadaran terbinanya jiwa kebanggaan terutama pada generasi muda mengenai kesinambungan sejarah bangsa dalam rangka pembinaan bangsa.

Jakarta, Juni 1983.

**Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional**

DAFTAR ISI

Halaman

SAMBUTAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I EKOLOGI BUKITTINGGI	1
1. Pendahuluan	1
2. Keadaan Geografis dan Kependudukan	5
3. Hubungan dengan Pedalaman dan Dunia Luar	11
BAB II SISTEM SOSIAL	18
1. Struktur Adat dan Tradisi Politik	18
2. Nagari dan Adat	31
3. Sistem Kekerabatan	33
4. Penghulu dan Ulama	34
5. E k o n o m i	40
6. Perlawanan Anti Blasting	41
BAB III DARI BENTENG KE IBUKOTA SUMATRA	50
BAB IV PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL	66
1. Pendidikan di Sumatera Barat	66
2. Perkembangan Pendidikan Barat Masa Awal	68
3. Pendidikan dan Perubahan Sosial	87
4. Kaum Muda, Pendidikan dan Pergerakan	95
BAB V MASA PENDUDUKAN JEPANG	107
1. Bukittinggi Ibukota Sumatra ...	107
2. Sikap Jepang Terhadap Masyarakat	109

BAB VI	SUATU TANTANGAN DAN PENGHARAPAN DALAM MASA PENDUDUKAN JEPANG	115
	1. Suatu Tinjauan Sosial pada Awal Pendudukan Jepang	115
BAB VII	SUATU TINJAUAN SOSIAL POLITIK KOTA BUKITTINGGI DALAM MASA REVOLUSI	125
	1. Sumatra Barat di Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945	125
	2. Berdirinya Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) dan Pengangkatan Residen Sumatra Barat	126
	3. Terbentuknya Barisan Keamanan Rakyat (BKR)	135
	4. Bukittinggi Basis Perjuangan di Daerah	141
	5. Masalah Volksfront (Persatuan Perjuangan)	141
	6. Terbentuknya Partai-partai dan Barisan-barisan	145
	7. Terbentuknya Barisan-barisan ..	147
	8. Gerakan PKI Baso	150
	9. Peristiwa 3 Maret 1947	150
BAB VIII	SUATU TINJAUAN BEBERAPA ASPEK KEHIDUPAN SOSIAL (BUKITTINGGI DALAM MASA REVOLUSI)	157
	1. Kota Bukittinggi Selayang Pandang	157
	2. Masalah Pengungsi	160

	Halaman
3. Ekonomi Dalam Perjuangan ...	162
4. Perkembangan Pendidikan	170
5. Mass Media	175
6. Kebudayaan dan Kesenian	177
 BAB IX BUKITTINGGI SEBAGAI PUSAT PERJUANGAN RI. DI SUMATRA	 181
1. Tempat Kedudukan Berbagai Lembaga Pemerintahan dan Pusat Perjuangan	 181
2. Konsolidasi Kekuatan Sosial yang Ada Dalam Masyarakat	 183
3. Terbentuknya Front Pertahanan Nasional (PPN)	 184
4. Rasionalisasi dan Rekonstruksi Dalam Ketentaraan	 186
5. Penyempurnaan Pemerintah Dae- rah	 188
6. Berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)	 192
 DAFTAR BACAAN	 202

B A B I

EKOLOGI BUKITTINGGI

1. Pendahuluan

Daerah tingkat II Kotamadya Bukittinggi adalah kota yang terbesar di pedalaman Sumatra Barat. Kotamadya ini berada di tengah-tengah Kabupaten Agam. Bukittinggi memang merupakan bagian dari Luhak Agam, yaitu salah satu dari "Luhak Nan Tiga" menurut tradisi Minangkabau. Pada zaman penjajahan Belanda kota ini disebut Fort de Kock, yaitu menurut nama benteng yang didirikan oleh Kapten Bauer pada tahun 1825 di atas Bukit Jirek. Sedangkan nama de Kock atau lengkapnya Baron Hendrik Markus de Kock adalah Komandan militer dan Wakil Gubernur Jendral Hindia Belanda¹). Dibangunnya benteng itu oleh Belanda di atas bukit di kenegarian Kurai mempunyai arti yang strategis dalam penumpasan perlawanan Paderi di daerah Luhak Agam dan negeri sekitarnya. Setelah dapat menguasai daerah tersebut maka Belanda mulai melaksanakan "Tanaman Kopi Paksa" model Tanaman Paksa Kopi di daerah Priangan Jawa Barat. Dari kota benteng, Bukittinggi menjadi pusat pengumpulan kopi yang terbesar di pedalaman Sumatra Barat. Untuk menunjang eksploitasi ekonomi ini Belanda mulai meletakkan kekuasaan pemerintahan sipilnya. Berpedoman kepada sistem pemerintahan tradisional Minangkabau Belanda menciptakan sistem kelurahan yang terdiri atas beberapa nagari. Tuanku Laras yang mengepalai kelurahan Kurai dan Banuahampu merupakan mata tombak pemerintahan Belanda untuk menguasai daerah-daerah di sekitar ini. Sampai dengan terjadi perubahan administratif di waktu abad 20, Bukittinggi adalah ibukota Keresidenan Padang Darat.

Pada zaman pendudukan Jepang kota itu bernama Bukittinggi Shi Yaku Shi. Pada masa itu kota tersebut merupakan tempat kedudukan komandemen Militer Jepang seluruh Sumatra di bawah pimpinan Jendral Kobayasi. Pada masa itu Bukittinggi juga menjadi pusat latihan *Gyugun* untuk daerah Sumatra Barat bagian utara. Pada zaman revolusi nasional Bukittinggi menjadi pusat perjuangan untuk wilayah tersebut. Dalam keadaan darurat kota ini pernah menjadi tempat kedudukan Gubernur Sumatra. Setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda, Bukittinggi ditetapkan sebagai ibukota Propinsi Sumatra Tengah yang daerahnya meliputi Propinsi Sumatra Barat, Riau dan Jambi yang sekarang²). Dewasa ini Bukittinggi sering dijuluki kota Jam Gadang, karena di tengah kota itu (antara Bukit Cubadak Bungkok dan Bukit Kandang Kabau) terdapat suatu bangunan yang tingginya kira-kira 30 m dan pada sisi bahagian puncaknya terdapat 4 buah Jam Gadang (jam besar). Pada puncaknya dibuat patung ayam jantan besar. Maksud tuan Controleur Rockmaker (pendiri Jam Gadang Bukittinggi 1927) ialah agar orang Kurai, Banuhampu sampai Sarik Sungai Puar bangun pagi apabila ayam sudah berkokok. Ketika masa pendudukan Jepang, penguasa militer menukar puncak Jam Gadang itu dengan bentuk rumah Nippon, maksudnya yaitu pada masa itu kerajaan Nippon yang paling tinggi dan berkuasa di Asia. Sesudah Indonesia merdeka, nampak puncak "Jam Gadang" ditukar lagi dengan rumah bergonjong, yang dapat diartikan bahwa adat Minangkabau tetap berdiri kokoh dan dipegang oleh anak bumi putera³).

Kebun binatang beserta Rumah Adat yang berdiri di dalamnya menjadi daya tarik tersendiri bagi Kota Bukittinggi. Kebun ini didirikan pada tahun 1900 oleh Controleur Storm Van Graven Zande di atas Bukit Cubadak Bungkok, sedangkan Rumah Adat beronjong yang terdapat di dalamnya baru didirikan tahun 1935 oleh *Controleur* J. Mandelaar. Di dalam

ruangan rumah adat yang berfungsi sebagai museum, dipajang hasil-hasil kebudayaan Minangkabau. Ngarai Sianok yang terletak di sebelah Barat Bukittinggi merupakan panorama yang mempunyai daya tarik bagi pencinta alam. Ngarai inilah yang memisahkan Bukittinggi dengan Sianok dan Koto Gadang. Dengan menyusuri lembah inilah sejak pertengahan abad 19, anak-anak Sianok dan Koto Gadang pergi bersekolah ke Bukittinggi. Di pinggir kota Bukittinggi yaitu Bukit Ambacang terdapat pula tempat pacuan kuda yang terkenal di Sumatra Barat. Lapangan ini dibangun di sekitar tahun 1850-an. Permainan tradisional ini sudah berlangsung sejak lama dan telah membudaya dalam masyarakat Minangkabau. Dalam rangka inilah dulunya terjadi perdagangan kuda Batak ke Sumatra Barat dulunya⁴). Dalam balapan kuda se Sumatra Barat, Luhak Agam (termasuk Bukittinggi) memakai bendera berwarna "merah", sebagai lambang keberanian. Ini mungkin ada hubungannya dengan sifat orang Agam yang digambarkan oleh Datuk Perpatih nan Sebatang yaitu orangnya keras-keras, suka berkelahi dan bersaing⁵). Iklimnya sejuk dan nyaman menyebabkan Bukittinggi menjadi kota turis yang terkenal. Oleh sebab itu walaupun relatif kecil, namun di kota ini terdapat banyak hotel mulai dari yang bertaraf Internasional sampai bertaraf "Losmen".

Sejak berdirinya benteng Fort de Kock, mulailah berdatangan penduduk dari berbagai nagari sekitarnya. Apalagi sejak Bukittinggi menjadi pusat pengumpulan kopi. Kehidupan ekonomi Bukittinggi makin ramai setelah didirikan Pasar Atas tahun 1850, jaringan jalan raya ke Padang, Solok dan Payakumbuh pada tahun 1841. Pada pertengahan abad 19, kota itu telah menjadi kota perdagangan yang dinamis. Hal ini disebabkan oleh letaknya yang strategis, dan hasil buminya, terutama jiwa dagang yang dimiliki secara tradisional. Bukittinggi adalah pusat pendidikan Barat, pusat kegiatan adat, dan kegiatan politik. Di tahun 1856, didirikan "sekolah raja", tempat pendidikan calon guru sekolah rendah dan pegawai. Sekolah

ini secara resmi bernama Kweekschool (Normal School). Karena murid-muridnya disaring secara ketat, maka masyarakat menamainya sekolah raja. Karena murid-muridnya yang diterima adalah anak-anak orang besar, bahkan juga anak-anak bangsawan dari seluruh Sumatra, tetapi juga lulusannya banyak yang menjadi pejabat pemerintahan. Sekolah ini kemudian lebih memusatkan perhatian pada pendidikan guru. Dari sudut sejarah nasional, peranan sekolah raja Bukittinggi yang cukup penting, karena sekolah ini menghasilkan guru-guru bahasa Melayu, yang dikirim ke seluruh Hindia Belanda.

Bukittinggi juga menjadi terkenal dengan sekolah-sekolah agama yang beraliran kaum muda seperti: Thawalib di Parabek dan Modern Islamic Kweekschool (MIK). Walaupun kota Padang merupakan kota terbesar di Sumatra Barat, namun dalam kegiatan politik dan agama serta adat, kota Bukittinggi jauh lebih menonjol. Pertemuan-pertemuan untuk memperbincangkan adat dalam scope Sumatra sering diadakan di Bukittinggi. Pada tahun 1930 pelajar Thawalib dari berbagai tempat di Sumatra mengadakan pertemuan di Bukittinggi. Pertemuan mereka ini menghasilkan terbentuknya Persatuan Muslimin Indonesia (PMI) yang nantinya berkembang menjadi Partai Politik yang bernama Permi⁶). Partai yang berdasarkan Islam dan Nasionalisme itu mempunyai pengikut yang banyak yang tersebar sampai ke pelosok desa di Sumatra Barat, bahkan sampai ke luar daerah Sumatra Barat antara lain: Riau, Jambi, Sumatra Selatan dan Aceh. Perkembangan Pergerakan Nasional di daerah juga diikuti gerakan pemuda terutama gerakan kepanduan. Pada masa itu di Bukittinggi telah berdiri pula Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI), El Hilal dan Hizbulwathan. Ikatan Kepanduan di kota ini cukup mengkhawatirkan pemerintah Belanda. Pada waktu kepanduan El Hilal mengadakan parade yang diikuti dengan "Drum Band" (Instrumennya terdiri dari seruling bambu, genderang, terompet), maka pemerintah membubarkan barisan tersebut dan beberapa orang yang dianggap pemimpinnya diproses.⁷)

Peranan yang pernah diperlihatkan oleh Bukittinggi selama lebih kurang satu abad mulai mengalami kemunduran, sejak ibukota Propinsi Sumatra Barat pindah ke Padang. Sisa-sisa kejayaan masa lalu kota itu masih dipertahankan oleh kaum pedagang, pengusaha dan pengrajin, namun untuk sebera-

pa lama kota itu dapat bertahan terhadap arus perubahan yang terjadi dewasa ini. Apakah kota ini dapat mengambil posisi dan peranan yang tepat terhadap perubahan yang makin men-deras ini, adalah suatu masalah yang patut dipikirkan.

2. Keadaan Geografis dan Kependudukan

Sebelum menjadi kota, Bukittinggi merupakan sebuah nagari yang bernama Kurai. Secara adat nagari Kurai berada di bawah satu payung dengan nagar-nagari sekitarnya seperti: Banuhampu, Sianok dan Koto Gadang.⁸⁾

Bukittinggi yang terletak pada ketinggian 927 meter di atas permukaan laut berhawa sejuk dan banyak hujan. Temperatur rata-rata 21°C. Kota itu berada 91 km sebelah Utara Kotamadya Padang. Letak astronomis Kotamadya Bukittinggi antara 100° – 130°30' BT dan 0° – 30° LS. Daerah Kotamadya Bukittinggi merupakan dataran tinggi yang berbukit-bukit yang berjumlah sekitar 27 buah. Luasnya pada tahun 1930, 5½ km².⁹⁾

Di antara bukit-bukit itu terdapat sawah yang subur. Pada tahun 1974 tercatat luas daerah pertanian padi 754 ha dan pertanian palawija 46,55 ha. Sedangkan pada tahun 1976 merosot secara menyolok; luas daerah pertanian padi menjadi 65 ha dan daerah pertanian palawija menjadi 20, 50 ha. Merosotnya daerah pertanian ini karena banyaknya didirikan bangunan baru.

Kota Bukittinggi terletak pada simpang tiga yang menghubungkan Padang, Solok dan Padang Panjang di sebelah Barat Daya; Payakumbuh di Timur Laut; dan Jurusan ke Bonjol, Lubuk Sikaping dan Padang Sidempuan di Utara. Pada kota ini

terdapat pula jalan kereta api yang menghubungkan Payakumbuh dengan Padang Panjang. Di Padang Panjang itu bercabang dua, ke Solok di Selatan dan Padang arah barat. Kedua kota ini letaknya cukup tinggi di atas permukaan laut, maka rel kereta api ke Padang Panjang dan Payakumbuh memakai rel gigi. Karena permukaan tanah Bukittinggi tidak datar maka pasar Bukittinggi bertingkat dua yakni Pasar Atas dan Pasar Bawah. Antara pasar atas dengan pasar bawah dihubungkan dengan "Jenjang 40" dan "Jembatan Gantung" bagi pejalan kaki. Kota ini berbatas:

Sebelah Utara dengan Kecamatan Tilatang Kamang/Kamang.
Sebelah Selatan dengan Kecamatan Banuhampu/Sungai Puar.
Sebelah Barat dengan Kecamatan IV Koto.

Sebelah Timur dengan Kecamatan IV Angkat/Candung.
Bukittinggi termasuk kota yang tidak begitu luas, terdiri atas 5 (lima) Jorong:

1. Jorong Mandiangin.
2. Jorong Aur Birugo.
3. Jorong Koto Selayan.
4. Jorong Tigo Baleh.
5. Jorong Guguk Panjang.

Pada masa pemerintahan Belanda masing-masing Jorong di Bukittinggi diperintah oleh seorang penghulu, dan kelima jorong itu diperintah oleh seorang Laras (dalam bahasa Minangkabau disebut: Tuanku Lareh). Kemudian kelima jorong itu dibagi dua:

- a. Tiga Baleh, Aur Birugo dan Koto Selayan di bawah perintah seorang penghulu kepala.
- b. Mandiangin dan Guguk Panjang diperintah pula oleh seorang penghulu kepala.

Kedua penghulu kepala itu tidak memperoleh gaji. Tetapi setelah diadakan penghulu yang mempunyai gaji yang tetap, maka negeri-negeri tersebut dipisahkan lagi menjadi 5 jorong,

dan masing-masing jorong diperintah oleh seorang penghulu kepala. Pada tahun 1858 Negeri Kurai Nan Lima Jorong itu diperintahi oleh Laras yang bergelar Tuanku Kurai. Dalam tahun itu juga nagari Kurai disatukan dengan nagari Banuhampu, menjadi satu kelurahan. Tuanku Laras yang pertama ialah Urip gelar Raja Mantari. Pada tahun 1873 ia meninggal dunia dan digantikan oleh Chatib Babaju Ameh dari Banuhampu. Pada tahun 1897 digantikan oleh laras yang bernama Si Tahu gelar Datuk Asa Rajo dari Kurai. Sampai berakhirnya sistem kelurahan di daerah Banuhampu – Kurai ini selalu ada penggantian penghulu Kurai dan Banuhampu yang menjadi Laras di daerah itu.

Setelah peraturan pemerintahan di Sumatra Barat diubah menurut Staatsblad 1913 No. 321, maka pangkat laras Kurai – Banuhampu dihapuskan dan Kepala-kepala Nagari dan 5 Jorong dan Kenagarian Kurai berada di bawah Districtsshaofd Bukittinggi. Kemudian nama districtsshaofd ini diganti dengan nama Demang. Di bawah Demang terdapat 2 tingkatan lagi yakni Asisten Demang dan pada tingkatan paling bawah berada Kepala Nagari. Jika Demang dan Asisten Demang adalah pegawai pemerintah, masuk katagori *inlandsch bestuur*, maka kepala nagari sekaligus merupakan jabatan adat. Di atas Demang ada 2 tingkatan lagi yakni *Controleur* yang mengepalai *Onderafdeling* dan Asisten Residen yang mengepalai *Afdeling*. *Controleur* ke atas dipegang oleh orang Belanda, sedangkan Demang, Asisten Demang dan Kepala Nagari diserahkan kepada bumi putera.

Di bawah *Afdeling* Agama terdapat lima *onderafdeling*, salah satu di antaranya adalah *onderafdeling Old Agama* (Agama Tua) yang diperintah oleh seorang *Controleur*. *Onderafdeling Old Agama* mempunyai dua District yakni District Bukittinggi dan District Tilatang IV Angkat. District Bukittinggi dibagi atas dua onderdistrict yaitu: Sarik – Bukittinggi IV Koto. District dipegang oleh Demang dan Onderdistrict oleh Asisten

Demang. Di bawah onderdistrict Sarik – Bukittinggi terdapat dua nagari yakni: Banuhampu – Sungai Puar dan Nagari Bukittinggi. Nagari Banuhampu – Sungai Puar mempunyai 11 Jorong yaitu: Sarik, Sungai Puar, Batu Palano, Ladang Lawas, Bātagak, Padang Luar, Pakan Sinayan, Cingkaring, Taluk, Padang Lawas dan Kubang Putih. Sedangkan Nagari Bukittinggi terdiri dari 5 Jorong¹⁰).

Di bawah onderdistrict IV Koto terdapat Nagari IV Koto yang terdiri dari 8 Jorong yakni: Koto Tuo, Koto Panjang, Sungai Landir, Balingka, Malalak, Guguk Tabek Rajo-rajo, Koto Gedang dan Sianok¹¹).

Dalam susunan tersebut terlihat bahwa Bukittinggi merupakan sebuah District yang diperintah oleh seorang Demang, tetapi sekaligus diperintah oleh pejabat Walikota (Fungerend Burgemester) yang langsung dijabat oleh Asisten Residen.

Sebelum dikeluarkan Nagari Ordonantie tahun 1915 No. 356 Bukittinggi berada di bawah Luhak Agam. Tetapi setelah keluar Staatsblad 1918 No. 310 Bukittinggi menjadi Kotapraja yang diperintah seorang Pejabat Walikota dan mempunyai *Gemeenteraad* yang berjumlah 9 orang, yakni 5 orang Eropa, 3 orang Indonesia, 1 orang yang mewakili Timur Asing¹²).

Sensus penduduk tahun 1930, dari 1.919.109 orang penduduk Sumatra Barat, tercatat 434.208 orang yang berdiam di Afdeling Agam. Dari 434.208 orang penduduk Afdeling Agam tercatat 14.657 orang yang bermukim di Bukittinggi. Lebih lanjut lihat tabel kependudukan Bukittinggi di bawah ini.

Tabel I
Gambaran penduduk Bukittinggi tahun 1920 – 1934¹³⁾

Tahun	Bumi Putera		Eropah		C i n a		Timur Asing lainnya		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	
1920	2403	1.476	225	174	319	214	90	83	5.004
1930	7218	5.797	266	281	473	339	147	136	14.657
1934	7220	5.792	310	310	461	328	147	136	14.704

Dari tabel I kelihatan bahwa dari tahun 1920 sampai tahun 1930 penduduk Bukittinggi bertambah hampir 200%. Keadaan ini ada kaitannya dengan meningkatnya peranan Bukittinggi dalam ekonomi, pendidikan dan pemerintahan. Kalau dilihat dari enam kota di Sumatra Barat seperti Padang, Bukittinggi, Solok, Payakumbuh, dan Sawah Lunto maka gambaran penduduk saat itu ialah:

Tabel II
Penduduk kota Sumatra Barat tahun 1930¹⁴⁾

K o t a	Bumi Putera	Eropah	C i n a	Timur Asing lainnya	Jumlah
Padang	40.696	2.622	7.204	1.456	51.978
Bukittinggi	13.015	547	812	283	14.657
Sawah Lunto	13.967	517	638	25	15.147
Payakumbuh	4.959	297	870	58	6.184
Padang Panjang	8.944	293	376	35	9.648
S o l o k	5.894	50	215	55	6.214

Memperhatikan data keenam kota tersebut kelihatan bahwa Padang merupakan kota terpadat dibanding dengan lima kota lainnya. Sedangkan Bukittinggi menduduki rangking kedua.

Pada tabel II dicantumkan bahwa penduduk Bumi Putera 13.015, namun kita tidak mengetahui kelompok-kelompok etnis mana saja yang bermukim di Bukittinggi di luar kelompok Minangkabau. Menurut Rasyid Manggis dan Haji Syarkawi dulu terdapat pemukiman orang Jawa, orang Nias di Bukittinggi. Dulunya di Tarok telah terdapat pusat pemukiman orang Jawa. Kebanyakan mereka ini pensiunan tentara Belanda yang merasa serasi menetap di kota. Juga telah terjadi kawin-mawin antara suku Minangkabau dengan suku Jawa.

Kelompok etnis Nias juga mempunyai pemukiman tersendiri di Bukittinggi yang bernama kampung Nias^{1 5}). Mereka ini dibawa Belanda ke Sumatra Barat yang laki-laknya sebagai kuli kerja paksa dan wanitanya sebagai gundik^{1 6}). Meskipun orang Minangkabau menganggap rendah wanita-wanita Nias, namun terjadi perkawinan antara laki-laki Minangkabau dengan wanita Nias yang cantik-cantik secara diam-diam.

Interaksi sosial orang Minangkabau dengan Cina kebanyakan terjadi dalam hubungan dagang yang dalam beberapa hal terjadi kerjasama dan sering juga terjadi persaingan. Bahkan pedagang Bukittinggi kurang senang kepada Cina karena sering mendapat dukungan dan kemudahan-kemudahan dari Belanda. Di Bukittinggi sebelum perang dunia II juga terdapat pedagang Jepang. Dalam berhubungan dengan pedagang pribumi sering ia menceritakan kebodohan orang Minangkabau yang mau dijajah Belanda^{1 7}).

Perkembangan Bukittinggi sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan di Padang Darat, menyebabkan kebutuhan tanah untuk kantor-kantor, pasar, perumahan untuk militer dan sipil bertambah terasa. Dengan cerdik Belanda membujuk penghulu-penghulu Kurai untuk meminjamkan tanah mereka untuk waktu yang belum dapat ditentukan. Jika tanah-tanah

itu tidak dipakai lagi oleh pemerintahan Belanda maka tanah itu akan dikembalikan kepada kaum pemilik tanah tersebut. Kalau cara ini tidak mungkin maka pemerintah baru merasa terpaksa membeli tanah. Pembelian tanah juga dilakukan oleh para pendatang. Akibatnya ialah, di satu pihak terjadi kekeburan status hukum dari tanah ulayat yang "dipinjamkan" dan di pihak lain ialah terjadinya "komersialisasi" tanah pusaka. Mungkin pengalaman ini menyebabkan sukarnya pemerintah Republik Indonesia mendapatkan tanah, waktu Bukittinggi menjadi ibukota Sumatra Tengah.

3. Hubungan dengan pedalaman dan dunia luar

Dalam nagari Kurai terdapat jaringan jalan yang berpusat di "Pakan Urang Kurai" (Pasar Nagari Kurai), yang terletak di Guguk Panjang. Karena penghidupan orang Kurai bersawah dan berladang, maka kelebihan hasil pertanian mereka inilah yang dijual ke pasar. Yang pergi ke pasar untuk berdagang biasanya kaum wanita. Di samping itu wanita juga laki-laki bekerja di sawah dan ladang. Dalam laporan Asisten Residen Agam tanggal 13 Desember 1915, diakuinya bahwa "perempuan Kurai amat rajin mencari uang, umpamanya sebagai penjual pisang, kayu api dan kue di pasar Bukittinggi¹⁸).

Kapan hubungan pedalaman Minangkabau dengan dunia luar dimulai tidak diketahui dengan pasti, tetapi tambo alam Minangkabau menceritakan perpindahan penduduk dari pedalaman Minangkabau ke daerah pesisir atau "Rantau". Umpamanya perpindahan penduduk Kubung Tigo Belas (Solok) ke daerah pesisir seperti ke Padang dan daerah Pesisir Selatan terjadi tahun 1450 (870 hijrah)¹⁹). Begitu pula kapan perpindahan penduduk Luhak Agam ke Lubuk Basung dan Tiku Pariaman tidak diketahui dengan pasti. Dari salah satu sumber dikatakan bahwa abad ke 14 dan abad ke 15 Pagaruyung telah mempunyai hubungan dengan daerah pesisir, di mana Pagaruyung diwakili oleh seorang raja (Rantau diperintahi oleh raja), tetapi sumber itu tidak menjelaskan siapa nama raja yang

mewakili Pagaruyung itu. Menurut Datuk Batuah Sanga, Pariaman dan Tiku adalah rantau yang tertua di daerah Pesisir Barat, yang namanya berhubungan dengan periode legenda ketika rantau belum bernama rantau. Satu dari referensi yang tertua tentang Pariaman berasal dari *Suma Oriental* dari Tome' Pires, seorang peninjau Portugis awal abad 16. Ia menyebut rantau perdagangan yang panjang antara India Barat dengan beberapa pelabuhan penting antara lain: Pariaman, dan Tiku. Setiap tahun, satu dua atau tiga kapal Gujarat mengunjungi Pariaman membawa pakaian untuk dipertukarkan dengan emas dan lain-lain. Juga disebutkan bahwa Pariaman melakukan perdagangan besar dengan Sunda (Jawa Barat), meliputi perdagangan kuda²⁰). Selanjutnya dari suatu sumber lain kita dapat mengetahui bahwa Sultan Alauddin Mansjur Sjah, dari Aceh (1517 – 1589) telah mengirimkan mubaligh-mubalighnya ke Pariaman²¹). Kalau berita ini benar berarti kira-kira pertengahan abad 16 Pariaman telah menjadi pusat pemukiman perantau dari Agam.

Berita tentang pantai Barat dan pedalaman Minangkabau lebih banyak didapatkan sejak awal abad ke 17. Bukan saja pada waktu ini pantai Barat telah didominasi oleh Kesultanan Aceh, tetapi juga saat terjadinya persaingan pedagang-pedagang Eropah. Para pemuka Minangkabau kemudian bahkan bersekutu dengan V.O.C. untuk mengalahkan Aceh.

Ketika sedang terjadi Perang Paderi (1803 – 1837), Raffles memimpin ekspedisi ke Simawang (dekat Batu Sangkar). Pada tanggal 16 Juli 1818, Raffles bekas Letnan Gubernur Inggris di "Hindia Timur" (terutama Jawa dan Bengkulu) di masa interegnum Inggris, dengan ditemani oleh 5 orang Eropah, di antaranya isterinya sendiri, 50 orang serdadu Benggala, Tuanku Panglima Padang, 2 orang Tuanku Saruaso dan beberapa saudagar bumi putera pergi berkunjung ke Padang Darat, atas undangan keluarga Raja Minangkabau. Jalan yang ditempuh oleh rombongan ini ialah Padang, nagari Pauh, Gantung

Ciri, Solok, Saningbakar (dekat Danau Singkarak), Sulit Air, Simawang dan turun ke Pagaruyung^{2 2}).

Dalam rangka menyerang benteng pusat Padri (setelah tempat ini ditinggalkan Inggris), Letnan Kolonel Raff merintis jalan baru dari pesisir ke *Bovenlanden* (Padang Darat). Jalan tersebut melalui Ulakan (di Pariaman), Kayutanam ke Ambacang terus ke Tambang (Padang Panjang) ke Gurun dan Si Pisang. Guna memperlancar hubungan antara Padang dan Bovenlanden bagi keperluan militer, maka Raff memperbaiki jalan tersebut. Jalan yang sangat curam melalui Ambacang (Bukit Ambacang) yang dinamakan oleh pasukan Belanda "Jalan Neraka" dialihkan letaknya. Jaringan yang ada ketika itu masih termasuk klasifikasi jalan setapak, karena hanya dapat ditempuh oleh pejalan kaki dan kuda beban. Kedua jaringan jalan itulah terutama yang menghubungkan Padang Pesisir dengan Padang Darat. Jalan ini dulunya telah dipergunakan oleh pedagang dari pedalaman Minangkabau ke Pesisir Barat Sumatra. Tidak lama setelah Bonjol ditaklukkan dan Tuanku Imam Bonjol dibuang (1837), Belanda menjalankan "rodi kopi" di Sumatra Barat. Badan dagang Belanda yang berhak monopoli untuk membeli dan mengangkat kopi serta mengisi kebutuhan terutama tekstil dari rakyat adalah *Nederlandsche Handel Maatchappy* yang biasa disebut "De Factory". Ekspor kopi dari Padang dari tahun ke tahun selalu meningkat. Pada tahun 1830 tercatat 27.697 pikul yang diekspor. Pada tahun 1840 tercatat 90.961 pikul kopi yang diekspor dari Padang.^{2 3})

Untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat, pemerintah sering mempergunakan tenaga kerja paksa membawa kopi ke daerah pesisir. Maka dalam rangka menunjang pengiriman kopi dari Padang Darat ke Padang, pada tahun 1841 pemerintah membuat jalan raya yang menghubungkan daerah pedalaman Minangkabau, terutama daerah-daerah penghasil kopi, dengan Padang. Pembuatan jalan dari Padang ke Pariaman

sampai Mudik Padang, dari mana dengan menyusuri sepanjang lembah Anai jalan itu terus ke Gunung dan Batipuh (kedua-duanya di Padang Panjang) dan ke Fort Van de Capellen dan ke Fort de Kock. Menjelang akhir abad 19 telah ada pula jalan antara Fort de Kock sampai Pangkalan yang terletak sebelah Timur Payakumbuh. Dengan melayari sungai Kampar orang akan sampai di Bangkinang. Seterusnya perjalanan akan dapat diteruskan ke Pakanbaru melalui jalan darat. Baru-baru ini perkembangan jalan raya makin meluas dan membaik. Hal ini mengakibatkan mobilitas sosial penduduk pedalaman makin tinggi baik ke Pantai Sumatra maupun ke pantai Barat Sumatra. Mereka ini terutama adalah pedagang-pedagang, baik sebagai pedagang menetap maupun pedagang-pedagang keliling. Begitu pula mobilitas pedagang-pedagang Cina dan timur asing lainnya makin meningkat ke daerah pedalaman Minangkabau. Seiring dengan perkembangan jalan raya ini, maka kota-kota di Sumatra Barat terutama kota Padang dan Bukittinggi berkembang pula dengan pesatnya. Jalan raya yang semula dimaksudkan untuk memperlancar transpor kopi dan militer, ternyata memberi dampak yang positif bagi kehidupan rakyat. Gerakan penduduk meninggalkan nagarinya, terutama nagari yang minus, makin menaik. Kedatangan mereka ke kota Bukittinggi dan Padang menyebabkan penduduk asli ikut terdesak. Terlepasnya mereka dari ikatan tradisioanl nagarinyadan "dendam kemiskinan" yang mereka alami di daerahnya menyebabkan mereka menjadi orang ulet dan berprestasi di kota-kota tersebut. Maka di kota Bukittinggi yang kita kenal hanya loads (ruangan besar untuk berjualan) orang Si Anok, loads orang Balingka, loads orang Sungai Puar dan loads lainnya yang didominir oleh orang-orang yang berasal dari sekitar Bukittinggi, tidak satupun yang bernama loads orang Kurai, penduduk asli Bukittinggi.

Bukan saja di bidang ekonomi penduduk asli dari kota Bukittinggi bersaing dengan pendatang, tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya. Karena mereka tertutup terhadap inovasi

yang terjadi pada kota itu. Dalam satu laporan pernah dikatakan: jika seseorang ayah memarahi anaknya yang tidak giat mengikuti perkembangan yang terjadi sekitarnya maka ia akan mengatakan "Bak orang Kurai jolong ke Gadung (Bukittinggi), diam di laut asin tidak, diam di bandar tak meniru". Maksud ungkapan ini: Sungguhpun dalam nagari Kurai (Bukittinggi) sudah didirikan di masa Belanda "Sekolah Melayu rendah, Sekolah Raja, Sekolah Belanda, Sekolah Pegawai Negeri dan lain-lain sekolah", maka jarang mereka itu yang mau menyerahkan anak kemenakannya menuntut pelajaran ke sekolah.²⁴⁾

Sebagai alasan yang umum dikatakan, mengapa mereka harus mempersulit dan menyerahkan kemenakan mereka untuk sekolah, bukanlah hasil sawahnya melimpah-limpah bahkan tidak habis dimakan dari tahun ke tahun.²⁵⁾

CATATAN BELAKANG BAB I

1. *Bukittinggi 1971 – 1977*, (Pemda Tingkat II Bukittinggi, 1977) halaman 14.
2. Drs. Dahlan Mansur Cs, *Minangkabau* (Djakarta: Bhatara, 1970), halaman 158.
3. Datuk Batuah Sango, *Tambo alam Minangkabau*, (Perce-takan Limbago, Payakumbuh, tt), halaman 17.
4. Wawancara dengan H. Sjarkawi, Bukittinggi 20 Agustus 1982.
5. Wawancara dengan Mansyur Dt. Panglimo Kayo, Bukit-tinggi, 11 Nopember 1982.
6. Wawancara dengan Mansyur Dt. Panglimo Kayo, Bukit-tinggi, 11 Nopember 1982.
7. Wawancara dengan Mansyur Dt. Panglimo Kayo, Bukit-tinggi, 11 Nopember 1982.
8. Wawancara dengan H. Sjarkawi, Bukittinggi, 20 Agustus 1982.
9. Lihat *Laporan* Kodya Bukittinggi, 1977, halaman 13.
10. JR. Chaniago, "Penduduk Bukittinggi Sebelum Perang, Suatu Kerangka Studi", (Kertas kerja pada Seminar Se-jarah Lokal, Denpasar, Bali, September 1982).
11. *Ibid.*
12. *Ibid.*
13. *Ibid.*
14. *Ibid.*
15. Wawancara dengan H. Rasjid Manggis, Bukittinggi, 17 Oktober 1982.
16. Wawancara dengan H. Rasjid Manggis, Bukittinggi, 17 Oktober 1982.
17. Wawancara dengan H. Rasjid Manggis, Bukittinggi, 17 Oktober 1982.
18. Haji M. Hajerat, *Sedjarah Negeri Kurai 5 Jorong dan Koto Bukittinggi* (Bukittinggi, T.S. Ichwan, 1947), hal. 11.
19. *Ibid.*

20. Tsuyosi Kota, "Rantau Pariaman; the world of Minangkabau Coastul Merchants in the nine teenth", hal. 730 – 731.
 21. H.M. Zainuddin, *Tarech Atjeh dan Nusantara 1*, (Pustaka Iskandar Muda, Medan, 1961), hal. 252.
 22. Wawancara dengan A. Bakar, Padang 30 Juli 1982.
 23. Moh. Radjab, *Perang Paderi* (1803 – 1838), (Perpustakaan Kem PP dan K, Djakarta, 1956), hal. 37, 38, dan 39.
 24. Moh. Hajerat, op. cit., hal 11.
 25. Wawancara dengan M. Rasyid Manggis, Bukittinggi 17 Oktober 1982.
-

B A B II

SISTEM SOSIAL

1. Struktur Adat dan Tradisi Politik

Menurut tambo, daerah yang berada di bawah pengaruh Minangkabau disebut Alam Minangkabau, yang terdiri dari *darek* (daerah pedalaman Minangkabau) dan *rantau* (daerah perbatasan sepanjang pantai barat dan timur Sumatra bagian tengah). Darek adalah daerah asal dari pusat kebudayaan Minangkabau. Ia merupakan daerah yang subur tempat nenek moyang orang Minangkabau pada mulanya menetap, dan di sanalah lahir sistem adat matrilineal Minangkabau.

Sepanjang sejarah Minangkabau, masyarakatnya telah menyaksikan suatu hubungan yang paling pengaruh mempengaruhi antara darek dan rantau. Rantau adalah jalan keluar atau saluran dari energik darek yang bersumberkan dari kelebihan penduduk, perasaan tidak puas, atau ambisi. Darek memperoleh kekayaan dan pembaharuan dari rantau; darek melengkapi rantau sebagai bagian dari Alam Minangkabau. Dalam hubungan timbal balik ini rantau bukan sekedar embelan saja dari Alam Minangkabau.

Darek secara tradisional terdiri atas 3 luhak yakni: Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Lima Puluh Kota. Ketiga luhak itu berada di bawah payung Raja Pagaruyung. Mengenai kekuasaan raja dikatakan, bahwa ke dalam (Luhak) tidak ada kekuasaan raja sama sekali, kekuasaannya hanya ke daerah rantau. Jika hal ini benar, tidak pula dapat dipastikan apakah hal demikian mengenai keadaan sejak mula atautkah keadaan yang lebih kemudian. Daerah luhak sebagai wilayah kekuasaan kerajaan, seperti lazimnya kerajaan-kerajaan dahulu, setidak-tidaknya mempunyai semacam kewajiban terhadap pemerintahan kerajaan. Kewajiban itu dapat berupa rodi atau

pajak. Berita yang pasti mengatakan bahwa ". *when the Yang Dipertuan levied a toll, the inhabitants of Suruaso, Sungai Tarok and Padang Ganting were exempt, but not of Sumanik, the Machudum's, nagari*"¹). Jika nagarinya Machudum membayar pajak, apalagi daerah lain di Minangkabau.

Bagaimana jaringan alat kekuasaan di masa-masa permulaan kerajaan itu belum ditemui keterangan yang pasti, kecuali berita yang tak dikuatkan oleh bukti-bukti historis. Struktur pemerintahan itu adalah sebagai berikut:

Tingkat raja: adalah raja Tiga Selo, raja Alam di Pagaruyung, raja Adat di Buo dan raja Ibadat di Sumpur kudu.

Tingkat menteri: adalah Basa IV Balai yaitu Titah di Sungai Tarab, Indomo di Suruaso, Machudum di Sumanik, Tuan Kadi di Padang Ganting.

Pada susunan ini jelas tampak unsur Islam yaitu pada jabatan raja Ibadat dan Tuan Kadi.²) Seperti dikatakan di atas bahwa susunan pemerintahan kerajaan sebelum pengaruh Islam belum lagi dikuatkan oleh bukti-bukti historis. Oleh karena itulah kita menguraikan pemerintahan kerajaan ini pada bagian yang membicarakan pengaruh Islam. Sekarang kita meninjau kemungkinan-kemungkinan untuk menentukan kapan lahirnya lembaga-lembaga Tigo Selo dan Ampek Balai tersebut.

Di dalam *Tambo Pagaruyung*, tentang hal ini terdapat berita penting tapi sampai saat ini belum dikuatkan oleh bukti-bukti historis. Tentang silsilah raja-raja Pagaruyung ditulis:

1. Adityawarman, 1339 – 1376
2. Ananggawarman 1376 – ?
3. Sultan Bakilap Alam ?
4. Sultan Persembahan ?
5. dan seterusnya.

Selanjutnya dikatakan bahwa lembaga Tigo Selo dibentuk bersamaan dengan pembentukan Basa Ampek Balai. Penobatan

dan pelantikan Tigo Selo dan Basa Ampek Balai ini bersamaan dengan pengangkatan dan pengiriman "Sultan nan Delapan" ke daerah rantau; Rantau nan delapan itu adalah: Aceh — Palembang — Tembesi — Rao — Sungai Pagu — Bandar Sepuluh — Siak — Rembau — Sri Menanti. Akhirnya dikatakan bahwa pengangkatan, pelantikan dan pengiriman itu terjadinya di masa pemerintahan Raja Alam Sultan Bakilap Alam. Jika cerita Tambo ini dapat dibuktikan kebenarannya, maka berdasarkan berita itu dapat diperkirakan tahun pembentukan lembaga-lembaga itu, yaitu berdasarkan tahun pemerintahan Sultan Bakilap Alam. Jadi tidak akan begitu jauh dari kenyataan kalau dikatakan adalah sekitar tahun 1400 Masehi.

Selanjutnya kemungkinan untuk mengira-ngira tahun berdirinya lembaga itu kita ambilkan dari dua sumber lain yang juga belum pasti kebenarannya.

- a). Dalam *Kaba Cindua Mato* dikatakan antara lain bahwa Puti Bungsu yang telah dijemput oleh Cindua Mato untuk sementara ditempatkan di rumah Tuan Kadi. Selanjutnya diceritakan bahwa Cindua Mato diadili oleh Basa Ampek Balai dan Rajo Tigo Selo karena dituduh melarikan Puti Bungsu. Ini dapat disimpulkan bahwa di masa Bundo Kandung, Dang Tuanku dan Cinduo Mato, telah ada kedua Lembaga itu. Sekarang timbul persoalan apakah cerita itu betul-betul kejadian? Jika kejadian, kapankah tahunnya? Jika hal ini dapat dijawab maka inipun dapat menjadi petunjuk untuk menentukan tahun-tahun berdirinya Lembaga-lembaga itu.
- b). Berita yang menceritakan perluasan wilayah kekuasaan Aceh ke pantai Barat Sumatra. Raja Alauddin Riyat Syah Al Kahar (1537 — 1568) dalam usahanya meluaskan kekuasaannya di pantai Barat yang merupakan wilayah Minangkabau, ialah dengan mengawinkan anaknya dengan raja Pagaruyung. Karena pada suatu kali Raja menyia-nyiaikan anaknya, maka raja Alauddin mengajukan tün-

tutan-tuntutan. Peristiwa ini diselesaikan dengan jalan menyerahkan pantai Barat sampai ke Mandjuta kepada Aceh. Di dalam penyelesaian ini, Basa Ampek Balai itu secara aktif ikut serta. Jika cerita ini benar, maka suatu petunjuk lagi bahwa di masa pemerintahan raja Alauddin di Aceh, sudah ada Lembaga Basa Ampek Balai itu.³⁾

Kemungkinan-kemungkinan di atas sampai saat ini belum dibuktikan kebenarannya, sedangkan yang jelas adalah bahwa Lembaga-lembaga itu memang ada. Berdasarkan kepada itu kita akan meninjau bagaimana corak pemerintahan setelah adanya sistim kerajaan tersebut.

Telah dikemukakan bahwa, wilayah Minangkabau dibedakan atas "darek dan rantau" yang dapat ditafsirkan dalam dua pengertian:

1. Sebagai uraian sistem sosial. Di darek nagari sebagai kesatuan territorial, pemerintahannya diatur di atas dasar kesukuan. Karena aparatnya adalah aparat suku, maka seperti halnya dengan suku, nagaripun diperintah oleh penghulu. Nagari tidak mengenal pemerintahan di luar pemerintahan suku. Rantau adalah tempat menetapnya pendatang dari "darek". Rantau itu umumnya adalah daerah-daerah/kota-kota perdagangan. Corak kehidupan di rantau serta terbukanya terhadap pengaruh-pengaruh luar, menyebabkan kehidupan di sini bersifat individual. Biasa juga pendatang itu membawa nama suku serta sistem kehidupan bersuku dari nagari asalnya, tapi watak individual dari rantau ini sulit untuk diatur dengan sistem seperti di nagari-nagari. Pemerintahan yang sesuai untuk kondisi tersebut adalah pemerintahan dengan sistem warga negara yang individual pula. Dua sifat kehidupan yang berbeda yang menghasilkan sistem pemerintahan yang cocok untuk masing-masingnya itulah yang melahirkan pepatah "nagari bapanghulu rantau barajo" di atas.

2. Sebagai lambang bahwa terhadap nagari raja adalah lambang, sedangkan di rantau raja berkuasa. Namun demikian

tidaklah berarti bahwa antara nagari-nagari dengan Pagaruyung tak ada hubungan. Secara konseptual hubungan itu jelas sekali kelihatan dalam bidang peradilan.

Dikatakanlah bahwa seandainya seseorang tidak puas dengan putusan penghulu-penghulu di negara, ia bisa naik banding ke rapek saluhak. Bila masih belum puas kepada Bendahara di Sungai Tarab, dan kemudian kepada Rajo Adat. Akhirnya kata putus akan bisa didapatkan dari Yang Dipertuan sendiri.

Berdasarkan keterangan di atas, kita dapat melihat struktur pemerintahan setelah berdirinya kerajaan pada saat telah adanya unsur Islam di dalamnya. Satuan terendah adalah Nagari; di atasnya Luhak; dan terakhir adalah tingkat kerajaan. Pada tingkat kerajaan ada dua tingkat pemerintahan, yaitu Basa Ampek Balai sebagai Menteri dan yang paling tinggi adalah Raja Tiga Selo. Namun tampaknya di nagari masing-masing dan dalam konteks urusan kenagarian ke empat menilai, yang disebut Basa Ampek Balai itu, hanyalah berfungsi sebagai salah seorang penghulu saja.

Dalam tradisi sejarah Minangkabau adat adalah ciptaan Datuk Ketemangguangan dan Datuk Perpatih nan Sabatang. Dalam Tambo adat Alam Minangkabau dikatakan bahwa mereka inilah yang mendirikan *luhak nan tigo, laras nan duo*.

Berdasarkan cerita Datuk Ketemangguangan dan Datuk Perpatih nan Sabatang tentang daerah-daerah Merapi kepada mamaknya Datuk Suri di Raja, mamaknya menamai daerah:

1. Sebelah Timur gunung Merapi sebagai Luhak Tanah Datar, karena daerah itu pada umumnya berbukit-bukit dan sedikit sekali tanah datarnya. Dengan perkataan lain "kurang" (luak) tanah datarnya. Jadi Luak Tanah Datar berarti kurang tanahnya yang datar.
2. Sebelah Barat gunung Merapi dinamakannya Luak Agak; karena orang di sana kasar-kasar, keras dan banyak per-

kelahian. Jadi kurang rasa agamanya. Dalam istilah Minangkabau disebut "luak agamonyo". Lalu daerah ini dinamai saja Luhak Agam (= luak agamonyo).

3. Sebelah Utara gunung Merapi dinamakan Luhak Lima Puluh, karena 50 orang rombongan yang berangkat ke daerah sebelah utara gunung Merapi, hanya 45 orang yang sampai ke sana dan hilang/sesat jalan 5 orang. Ini berarti kurang 5 orang dari 50 orang atau "luak dari 50", kemudian disebut saja "luhak lima puluh".

Cerita di atas terlalu dipaksakan agar kata "luak" dalam rangkaiannya Tanah Datar, Agam dan Lima Puluh Kota tetap berarti "kurang". Karena yang dipakai untuk menamakan daerah-daerah tersebut di atas tidak sama dan tidak konsisten. Namun masyarakat Minangkabau pada umumnya menerimanya sebagai cerita yang benar. Dalam laporan ini kita mengartikan luak sebagai daerah yang hanya dipakai dalam rangkaiannya dengan Tanah Datar, Agam dan Lima Puluh Kota.

Luhak merupakan federasi longgar dari nagari-nagari. Sedangkan Alam Minangkabau merupakan federasi dari luhak yang tiga yang dikepalai oleh raja Minangkabau yang berkedudukan di Pagaruyung. Untuk mengatur pemerintahan di luhak yang tiga, maka oleh Datuk Ketemanguangan dan Datuk Perpatih nan Sabatang maka dibentuklah 2 kelarasan:

1. Laras koto Piliang dan
2. Laras Bodi Caniago.

Kata "laras" itu dalam bahasa Minangkabau ialah *lareh*, berarti *harmoni, belong together*. Kemudian kata itu dipakai untuk menyatakan sistem politik/pemerintahan tradisional Minangkabau, adat dan juga untuk menyatakan daerah. Sebagai sistem politik/pemerintahan maka masing-masing laras mempunyai sistem tertentu dalam membentuk elite penguasa tradisional, bagaimana suatu putusan dibuat, dan bagai mana peraturan/pemerintahan dijalankan. Laras Koto Piliang adalah pemerintahan Datuk Ketemanguangan, sedangkan laras Budi

Caniago adalah pemerintahan Datuk Perpatih nan Sabatang. Dalam laras Koto Piliang dapat kita temui sistem politik tradisional sebagai berikut :

- a. Jabatan penghulu pucuk diturunkan secara turun temurun dari kaum tertua atau kampung tertua dari suatu nagari.
- b. Di dalam setiap kerapatan atau permusyawaratan, keputusan yang diambil mutlak dalam tangan penghulu pucuk bukan dalam tangan seluruh anggota rapat.

Kekerasan penghulu pucuk sebagai pimpinan suku dan nagari sangat menentukan putusan penghulu pucuk selalu dianggap benar, dan dasarnya dapat kita lihat dalam pepatah adat di bawah ini :

Kato gadang sagalo yo
Kato ketek sagalo ukan

Maksudnya :

Kata pemimpin selalu benar
Kata bawahan tidak masuk hitungan.

Balai adat diberi beranjung atau bertingkat sebelah kanannya tempat duduk penghulu pucuk, yang lebih tinggi dari tempat duduk penghulu dan anggota-anggota yang lain. Ruang tengahnya juga bertingkat yang disebut berlabuh gajah. Konstruksi balai adat ini sebetulnya mencerminkan sistem pemerintahan laras Koto Piliang yang menganut sistem "berjenjang naik dan bertangga turun" artinya semacam hierarkie yang harus ditumpuk dalam pelaksanaan pemerintahan di mana penghulu pucuk duduk tingkat yang tertinggi yang memberi kata putusan terakhir dalam masalah pemerintahan (titik dari atas) sistem laras Koto Piliang sering disebut orang "adat beraja-raja" karena Penghulu Pucuknya mempunyai kekuasaan tertinggi dalam nagari. Sebaliknya dalam laras Bodi Caniago menganut sistem politik yang berbeda dari laras Koto Piliang. Sistem politik dalam laras Bodi Caniago adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan berasal dari salah seorang penghulu dari empat suku dalam nagari, yang dilaksanakan secara bergilir;
- b. Keputusan yang diambil dalam permusyawaratan atau kerapatan berdasarkan permufakatan bersama anggota rapat. Hasil permufakatan merupakan hukum yang tertinggi yang patut dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam pepatah adat diungkapkan: "kemenakan barajo kamamak, mamak berajo kapanghulu, panghulu berajo kemufakat, mufakat berajo pada alua dan patut".
- c. Konstruksi Balai Adat Bodi Caniago tidak beranjung dan ruangan tengahnya berlantai datar. Masyarakat Minangkabau menganggap bahwa konstruksi yang demikian melambangkan tidak adanya perbedaan tingkat kepenghulu-an laras Bodi Caniago, semuanya duduk sama rendah tegak sama tinggi (demokrasi). Kekuasaan pemerintahan berasal dari bawah, tabasuik dari bumi.

Selanjutnya "Koto Piliang" dan "Bodi Caniago" ada hubungan dengan pengelompokan masyarakat Minangkabau atas suku-suku. Masyarakat Minangkabau hidup bersuku-suku dan nama suku itu banyak sekali. Walaupun demikian semuanya berasal dari empat induk suku yaitu: Koto, Piliang, Bodi dan Caniago. Keempat suku induk itu termasuk ke dalam dua kelompok, yaitu Koto Piliang dan Bodi Caniago. Kedua kelompok itu mempunyai adat tersendiri yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian masyarakat Minangkabau berada dalam dua sistem adat yang disebut laras Koto Piliang dan laras Bodi Caniago. Kedua adat itu didukung oleh berbagai suku yang ada di Minangkabau. Secara tradisional disebutkan bahwa Luhak Agam berada di bawah sistem adat di Caniago dan Luhak Lima Puluh Kota menurut sistem adat Koto Piliang. Sedangkan Luhak Tanah Datar merupakan campuran. Dalam pepatah adat diungkapkan:

Pisang sikelat kelat hutan
Pisang tembatu bergetah
Koto Piliangnya bukan
Bodi Caniago inyo antah.

Namun dalam kenyataan hidup setiap luhak dan nagari umumnya berisi suku dari dua sistem adat tersebut. Pada nagari yang demikian, adat yang dipakai adalah dari suku yang pertama kali membuka atau berada dalam nagari itu, atau mana yang dominan di daerah tempat nagari itu berada. Karena dua sistem adat menempati daerah tertentu maka kadang-kadang kata laras menyatakan tempat masing-masing sistem adat itu berlaku. Pemerintahan Belanda mempergunakan istilah laras untuk menyatakan unit daerah dalam pembagian wilayah administrasi pemerintahan seperti berikut residensi, luhak, laras dan nagari. Umpamanya: Agam merupakan salah satu luhak dalam keresidenan Padang Darat; Banu Ampu-Kurai merupakan satu kellarasan dalam luhak Agam, sedangkan Kurai merupakan satu nagari dalam laras Banu Ampu-Sungai Puar.

Di samping terdapat perbedaan kewenangan penghulu juga ada perbedaan sistem penghulu antara kedua laras tersebut.

Bagaimana sistem kepenghuluan pada laras, ada baiknya kita telusuri sepintas lalu bagaimana terbentuknya nagari. Pada umumnya proses pembentukan ialah: Taratak menjadi dusun; dusun menjadi Koto dan Koto menjadi nagari. Sejajar dengan perkembangan taratak menjadi nagari, terjadi pula perkembangan kelompok dan tanah pertanian.

Taratak adalah tempat orang berladang membuka daerah pertanian yang baru di tengah padang atau rimba. Taratak itu berkembang menjadi dusun setelah orang-orang taratak membuat sawah di hutan rendah (daerah dapat diairi) dan ladang-ladang di hutan tinggi (daerah yang tidak dapat diairi). Mereka yang mempunyai hutan tinggi dan rendah inilah yang dikata-

kan orang asal dari satu nagari. Keluarga kecil yang membuka tempat baru itu pada mulanya masih anggota suku asalnya. Betapa kecilnya keluarga itu akan terlihat pihak *semando* (bapak) dan mamak rumah (*tungganai*) dari pihak ibu. Setelah mereka berkembang biak dan sudah terdiri dari 3-5-6-7 rumah, masalah dan urusan keluarga menjadi lebih banyak dan kompleks, sedangkan penghulu suku terlalu jauh, maka kelompok keluarga tersebut telah siap membentuk suku tersendiri, namun sama dengan suku asalnya. Kelompok beberapa rumah dari orang seturunan itu dinamai kampung dan untuk pengatur kampung tersebut diangkat seorang penghulu. Penghulu inilah yang memerintah sekalian kaum keluarga dalam kampung itu dan ia lebih berkuasa dari "tungganai rumah". Ia dikatakan orang "penghulu handiko" dalam kampungnya. Di dalam ungkapan adat dikatakan: "kampung bertuan, rumah bertungganai".

Menurut adat, penghulu di kampung yang pertama itu dinamai "penghulu kepala perut" atau "penghulu kepala jurai", sedangkan kampung-kampung yang menjadi pecahannya bernama penghulu *andiko* atau tua kampung. Dalam hak mengatur kaum baik penghulu kepala *jurai* maupun penghulu *andiko* bersifat otonomi, satu sama lain tidak berhak mencampuri urusan masing-masing. Perserikatan dari beberapa buah perut atau jurai dinamakan satu payung yang dikepalai oleh penghulu yang bergelar "gedang tuah". Kemudian beberapa payung membentuk suatu suku adat yang dikepalai oleh kepala suku adat (penghulu suku). Di luhak lima puluh kota yang menganut sistim kelasan Koto Piliang. Kemudian, rumah dikepalai oleh mamak rumah atau *tungganai*. Selanjutnya nagari dikepalai oleh seorang penghulu *pucuaak*. Jadi di nagari-nagari yang berada di bawah pengaruh laras Koto Piliang terdapat semacam hierarchie dari penghulu.

Penghulu merupakan salah satu aparat dari empat aparat dalam pemerintahan kenagarian. Keempat-empat aparat tersebut dalam bahasa Minangkabau dinamakan "Urang nan Am-

pek jinih” (orang yang empat jenis). Mereka itu adalah: penghulu, manti, dubalang dan malin. Penghulu yang dimaksud ialah penghulu dari segala tingkat. Pada sistim kepenghuluan Koto Piliang orang empat jenis ini juga merupakan aparat pemerintahan tiap-tiap suku. Di dalam kegiatan dan urusan nagari mereka otomatis menjadi aparat pemerintahan nagari. Dalam peraturan undang-undang adat disebutkan fungsi orang 4 jenis sebagai berikut:

Kata penghulu kata menyelesaikan

Kata malin kata hakekat

Kata manti kata berulang

Kata dubalang kata menderas

Penghulu sebagai pemimpin tertinggi dari suku atau nagari memberi penyelesaian terakhir dalam masalah-masalah nagari. Malin adalah suluh bendang dalam nagari yang membedakan halal dan haram. Masuknya malin sebagai aparat pemerintahan suku atau nagari tidak dapat tidak karena masuknya unsur-unsur Islam ke dalam kebudayaan Minangkabau. Manti bertugas menerima pengaduan dan menyelesaikannya. Sedangkan dubalang adalah aparat penjaga keamanan nagari.

Sesuai dengan struktur masyarakat Minangkabau dan ekonomi agraris pada saat itu yang masih bersifat sederhana maka stratifikasi sosial belum begitu kompleks. Pada umumnya strata sosial masyarakat Minangkabau hanya berlaku dalam nagari tertentu saja. Berdasarkan pola pemilik tanah dalam suatu desa (nagari) maka lapisan sosial masyarakat dapat dibedakan atas :

1. Kaum bangsawan (orang asal). Mereka inilah yang *mencancang* dan *melateh* atau *menaruko* yang pertama pada sesuatu desa/nagari.⁴⁾ Merekalah yang memiliki hutan rendah dan hutan tinggi di daerah tersebut. Anak buah penghulu di daerah ini dalam kemenakan di bawah dagu. Artinya yang kemenakan yang terdekat pada seseorang

penghulu yang mempunyai hubungan genealogis. Penduduk Kurai yang asli pada mulanya membuka tanah baru dan bermukim di Jorong Tigo Baleh termasuk kelompok orang bangsawan (berasal) di Bukittinggi.

2. Orang biasa. Strata Sosial ini adalah keluarga-keluarga yang datang kemudian ke Bukittinggi, tetapi tidak terikat seluruhnya kepada keluarga asalnya. Ia diterima oleh orang asal beserta penghulunya sebagai "kemenakan di bawah lutut" dengan dasar adat yang mengatakan "tabang mamumpu hinggok mancakam" (terbang memumpu hinggap mencekam), artinya keluarga itu telah diterima sepanjang adat yang berlaku. Maka yang jadi penghulunya sekarang ialah penghulu dari nagari baru ditempatinya. Walaupun mereka berada pada tingkat kedua dari anak buah penghulu tersebut yang sering disebut sebagai "kemenakan di bawah lutut", namun tanggung-jawabnya terhadap penghulu dari desa dan nagari yang baru ini adalah sama. Dalam ungkapan adat dikatakan : *sehina semalu, berat sama dijinjing dan ringan sama dipikul*. Di samping itu masih ada satu strata sosial lagi yang terdapat di Bukittinggi telah berkembang menjadi pasar yang dapat berperanan sebagai pasar orang Agam, maka banyaklah pedagang-pedagang, tukang dan penjual jasa lainnya yang datang dan bermukim di Bukittinggi. Kelompok ini berada di bawah penghulu dagang yang berasal dari daerah asal pendatang baru ini, sebagai strata sosial tersendiri mereka juga mendirikan dan punya surau sendiri seperti :

1. Surau dagang Balingka, yang didirikan oleh orang-orang Balingka yang terletak di Jalan Minangkabau Bukittinggi. Sekarang surau tersebut telah menjadi mesjid raya.
2. Surau dagang Banuhampu, yang didirikan oleh orang-orang yang berasal dari Banuhampu yang terletak di Aua Tanjungkarang.⁵⁾

Di samping ini mereka ini juga punya perkuburan sendiri yang disebut "Kuburan dagang". Walaupun demikian selagi mereka ini belum mengisi adat dan menerang lembaga pada nagari tersebut, mereka tetap dinamakan "dagang menepat". Mereka belum boleh duduk sama rendah tegak sama tinggi dalam suku, apalagi ke dalam nagari, hanya sebagai anak semang saja; dihimbau datang, disuruh pergi.⁶⁾

Di samping itu mereka juga tidak punya tanah garapan pertanian, dan sebagian besar mereka adalah pedagang, tukang pengrajin dan penjual jasa, maka kita cenderung menempatkan mereka pada strata sosial yang dua. Bahkan dalam perkembangan berikutnya di antara mereka, telah dianggap sama dengan penghulu karena kekayaannya dan ilmu pengetahuannya. Dalam sistim nilai Minangkabau, Penghulu, Alim Ulama, Cadiak Pandai di Urang Kaya termasuk kelompok "orang baik-baik" yang berbeda dari orang kebanyakan.

3. Sebelum tahun 1857 yakni sebelum dihapuskan perbudakan di Minangkabau, maka terdapat satu strata lagi yang disebut "Budak". Mereka ini adalah orang yang telah kehilangan hak-hak azazi sebagai manusia dan dapat diperjual-belikan oleh tuan pemiliknya.

Sering juga golongan budak ini dijadikan barang hadiah oleh pemiliknya kepada seseorang dan juga untuk membayar utang tuannya. Mereka ini dapat kita tempatkan pada strata ketiga dalam masyarakat Minangkaabau. Tetapi setelah perbudakan dihapuskan di Sumatra Barat, maka mereka ini sering dihadapi oleh pemiliknya sebagai kemenakan di bawah lutut. Jadi termasuk pada strata kedua yakni strata orang kebanyakan atau orang biasa.

Perlu kita ketahui antara strata sosial orang bangsawan dan orang biasa tidak terdapat perbedaan yang tajam. Dalam interaksi sosial tidak terdapat perbedaan yang menyolok an-

tara kelompok ini. Dan hubungan ini lebih berdasarkan hubungan sesama anggota masyarakat sepanjang adat, bukan hubungan bangsawan dan orang biasa berdasarkan etika masyarakat feodal. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, lebih-lebih setelah sistem ekonomi uang dan pendidikan, buat mempengaruhi masyarakat Minangkabau maka perbedaan strata sosial tersebut makin kabur. Karena tanah bukan satu-satunya sumber ekonomi dan prestise lagi. Uang dan jabatan penting dalam pemerintahan dapat mengangkat derajat orang biasa menjadi orang terpandang dalam masyarakat dan dikelompokkan sebagai orang yang baik-baik (orang yang patut).

2. Nagari dan Adat

Seperti sudah disinggung di atas nagari merupakan federasi dari suku-suku yang dipimpin penghulu-penghulu. Kerapatan penghulu inilah yang merupakan kekuasaan yang tertinggi di nagari. Walaupun nagari merupakan unit yang terkecil dalam sistim pemerintahan tradisional Minangkabau, namun dalam kenyataan politik nagari merupakan unit hukum dan politik. Fungsi Raja Pagaruyung bukanlah sebagai penguasa dengan kekuasaan riil, tetapi lebih merupakan lembaga sakral yang menjaga ketertiban hubungan nagari-nagari. Kelompok penguasa nagari (balai) bukanlah wakil raja tetapi wakil penduduk dari nagari itu sendiri.

Dari sudut sejarah pembentukan nagari, maka nagari adalah kumpulan dari paling kecil 4 suku. Kalau belum cukup 4 suku adat, belum berhak dinamai nagari, maka daerah tersebut masih tetap dinamai dusun/kampung. Dusun ini harus takluk atau bertali ke nagari yang lain, yang menjadi asal dusun itu atau menjadi pusatnya sepanjang adat. Dalam undang-undang adat nagari dikatakan bahwa:

Nagari berkempat suku
Suku berbuah perut
Kampung bertua
Rumah gadang bertungganai⁷⁾

Di samping itu suatu nagari ditentukan pula oleh syarat fisik sebagai berikut :

Satu berlabuh (punya jalan)

Kedua bertapiian

Ketiga berbalai.

Keempat bermesjid

Kelima bergelanggan⁸)

Maksudnya: Suatu nagari harus mempunyai jalan yang dapat ditempuh orang untuk keluar masuk nagari. Harus ada sumber air yang dipergunakan untuk air minum, mandi dan lain-lain. Balai yang sering disebut Balai Adat adalah semacam Dewan penghulu bersidang menjatuhkan hukuman dan memecahkan masalah masyarakat sepanjang adat. Mesjid adalah tempat anak nagari melaksanakan Sholat Jum'at di bawah pimpinan Chatib, Imam dan Bilal. Sedangkan gelanggang adalah suatu tanah lapang (pemedanan) yang dijadikan tempat berkumpul anak nagari pada waktu pagi dan sore tempat menghilangkan hati yang rusuh dan beramah tamah, tempat anak-anak dan pemuda-pemuda bermain, tempat orang tua-tua bercerita sambil mengajar muda-muda dan tempat mengadakan bermacam-macam permainan.⁹)

Selanjutnya nagari sebagai unit pemerintahan tradisional yang terkecil juga mempunyai seperangkat aparat yang menjamin berlangsungnya berbagai bidang kehidupan kenagarian yang pertama adalah segala penghulu dalam segala tingkat yang terdapat dalam kenagarian. Kelompok ini merupakan jiwa dan pusat jala himpunan dalam nagari, yang memberi kata putus dalam kehidupan masyarakat. Dalam kata adat disebutkan: kata penghulu kata menyelesaikan, menurut alur dengan patut, menurut garis dengan belebas.¹⁰) Kedua, Panglima dan Hulubalang menjadi tulang punggung nagari. Kelompok inilah yang menjaga keamanan nagari. Ketiga, segala manti/pegawai yang ada dalam nagari yang merupakan kaki

tangan nagari. Jadi mereka adalah pelaksana dari undang-undang dan keputusan nagari. Keempat, segala Kadhi, Khatib, Imam, Bilal dan Alim ulama yang ada dalam nagari. Ketika kaum Paderi berkuasa kelompok ini menjadi anggota balai adat yang sama haknya dengan penghulu. Kelompok ini disebut juga suluh bendang dalam nagari yang memelihara kehidupan beragama anak nagari. Kelima, segala orang cerdik pandai yang berfungsi sebagai ujung lidah dari nagari.

Maka Undang-undang boleh dijalankan oleh Penghulu Kepala dan Penghulu dalam nagari yaitu: "Kusut menyelesaikan, Keruh memperjernih".

Selanjutnya pada tahun 1873 berlaku undang-undang pemerintahan Belanda sepenuhnya di Sumatra Barat.¹¹⁾ Dengan adanya keputusan-keputusan di atas, dapat dikatakan peranan adat dalam pengaturan pemerintahan nagari sudah mulai berkurang. Kenyataan tersebut diungkapkan dalam pantun tersebut di bawah ini :

Dulu rabab nan batangkai
Kini lagundi nan babungo
Dulu adat nan bapakai
Kini rodi nan baguno

Keputusan pemerintahan tersebut tidak dapat tidak mengganggu keharmonisan kehidupan masyarakat yang diatur sepanjang adat.

3. Sistem Kekerabatan

Penduduk asli nagari Kurai yang tersebar pada lima jorong mengakui mereka seadat dan selembaga. Batas-batasnya ditentukan dalam ungkapan: "Kurai nan salingka aue". Maksudnya perbatasan nagari Kurai ditumbuhi oleh bambu sekelilingnya. Pemerintahan sepanjang adat dipegang oleh Penghulu Puncak nan 26 (dua puluh enam). Sedangkan penduduk yang berasal dari nagari-nagari sekitar Bukittinggi yang bermukim di Kota itu berada di bawah pimpinan penghulu da-

gang. Biasanya mereka mempunyai Surau (langgar) sendiri dengan nama "Surau Dagang" dan perkuburan sendiri dengan nama kuburan dagang. Baik penduduk asli maupun pendatang dari nagari-nagari sekitarnya menganut sistem kekerabatan matrilineal sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat Minangkabau. Dalam sistem matrilineal garis keturunan masyarakat Minangkabau menurut garis Ibu. Anggotanya adalah Ibu, anak, dan mamak. Sedangkan ayah berada di luar keluarga anak dan isterinya. Dengan kata lain ayah tetap anggota keluarga dari kaum di mana ia berasal dan merupakan keluarga lain dari keluarga isteri dan anaknya. Karena itu pengertian/konsepsi keluarga batih menjadi lain dalam sistem kekeluargaan Minangkabau. Hubungan anak dan ayah adalah hubungan tali darah. Hubungan sosial antara ayah dan anak renggang, karena sebagian besar dari waktunya ada di luar rumahnya. Begitu pula tanggung-jawab ekonomi ayah terhadap anak isterinya, hampir-hampir tidak ada. Keadaan ini memungkinkan orang Kurai dari muda sampai tuanya, jarang yang kawin kurang 5 kali, apalagi bila ia orang baik-baik seperti penghulu, kawin sampai 10 kali atau lebih. Hal ini dimungkinkan karena suami tidak perlu memberi belanja kepada isteri atau anak sekalipun. Bahkan isterinyalah yang memberikan rokok dan lain-lain kebutuhan suaminya.

Hubungan mamak kemanakan secara sederhana dapat dibedakan atas:

1. Hubungan pusaka dan sako,
2. Hubungan sosial.

Mamak adalah pengawas dan pengembang harta pusaka yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan kaumnya. Di dalam upacara adat antara mamak dan kemenakan mempunyai tugas-tugas tertentu sesuai dengan statusnya masing-masing. Hubungan keluar kaum, baik dengan kampung maupun dengan nagari dilakukan oleh mamak rumah (tungga-

nai). Mamak rumahlah yang menjadi penanggung-jawab utama hubungan kaumnya dengan dunia luar. Integrasi solidaritas dan indentitas mamak-kemenakan utuh dan bulat.

Hubungan antara bako dan anak pisang adalah hubungan yang bersifat syarak "Bako" adalah anggota keluarga/kaum dari suku ayah, sedangkan anak pisang adalah seluruh anak dari laki-laki yang kawin ke rumah dari suku lain. Hubungan ini terlihat dalam upacara perkawinan dan kematian. Jika seorang laki-laki atau perempuan akan menginjak jenjang perkawinan maka bakonyalah yang pertama, di luar kaumnya dibawa berunding/bermufakat. Dalam upacara perkawinan ia dilepaskan oleh bakonya dengan sesuatu upacara yang disertai pemberian oleh bakonya (biasanya kerbau atau sapi). Begitu pula dalam upacara kematian seseorang, bakonyalah salah seorang yang harus hadir agar jenazah dapat dikebumikan.

Hubungan sumando menyumando adalah hubungan seseorang yang telah kawin dengan keluarga di mana ia kawin. Semua laki-laki dan perempuan yang kawin ke suatu suku, adalah urang sumando dari suku di mana ia kawin itu. Harta pusaka kaum itu sepanjang adat diwariskan kepada kemenakan, bukan kepada anak dari mamak rumah (tunganai). Pusaka yang diwariskan oleh seorang penghulu sebetulnya ada 2 macam:

1. Nama, gelar dan martabat penghulu;
2. Sawah ladang, gurun dan bukit.

Kedua pusaka ini harus diperbesar oleh yang menerima warisan, yaitu kemenakan. Dilarang menghabiskannya untuk hal-hal mubazir. Harta pusaka boleh dijual atau digadaikan jika:

1. Mayat yang tidak terkuburkan;
2. Gadis Gadang/Janda yang tidak bersuami;
3. Adat tidak berdiri.

Untuk itu perlu kata sepakat dari semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan, karena pewaris yang sekaum tersebut berhak pula di atas harta pusaka tadi yang dalam kata-kata adat disebutkan: "Ganggam bauntuk pegang nan bermasing-masing.^{1 2}) Namun jika dijual atau digadaikan juga, usahakanlah lebih dulu dengan jalan yang lain. Dalam hal ini adat mengatakan:

Tak kayu jenjang diurak,
Tak air talang dipancung,
Tak emas bungkal diasah,
Manan nanjangan usah luak,
Pusaka nanratak sumbing, Nak jangan hilang namo jo bangso.

Maksudnya, pusaka adalah barang umamah jangan dikurangi atau dihabiskan. Sebab ini bisa menghilangkan martabat kaum. Tanah pusaka tersebut dikerjakan oleh anggota kaum yang telah bersuami. Kepadanya oleh mamak rumah diserahkan satu atau dua *tumpak* sawah atau ladang untuk dikerjakannya guna mencukupi kebutuhannya anak bermamak. Biasanya luas tanah yang digarap oleh satu keluarga batih (Ibu, suami beserta anak-anaknya) sangat ditentukan oleh luas tanah pusaka dan jumlah anggota kaum wanita yang telah bersuami. Biasanya $\frac{2}{3}$ dari hasil sawah itu diambil oleh orang yang mengerjakannya, sedangkan $\frac{1}{3}$ lagi untuk kaum yang punya sawah. Bagian $\frac{1}{3}$ inilah yang dipergunakan untuk menghidupkan anak yatim, janda dalam kebutuhan kaum.

4. Penghulu dan Ulama

Sebelum Islam berkembang di Minangkabau, penghulu dalam segala tingkatnya telah berfungsi sebagai pimpinan tradisional yang mempunyai hubungan geneologis dengan orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian dengan penyebaran Islam, terutama sejak Perang Padri, ulama makin tampil sebagai pemimpin rakyat. Bahkan peranan ulama mendapat tempat dalam struktur pemerintahan nagari.

Dengan diakuinya para Ulama sebagai aparatatur pemerintahan nagari, maka ulama muncul pula sebagai pimpinan politik dalam nagari di Minangkabau. Khatib, Imam dan Kadhi menjadi anggota aktif dari balai nagari.¹³⁾ Di samping mereka ini terdapat pula kelompok ulama bebas, yang mempunyai tanggung-jawab utama dalam pendidikan dan pengajaran agama.¹⁴⁾ Sementara itu juga terjadi perkembangan pesat dari sekolah-sekolah agama yang dilaksanakan di surau-surau. Di Minangkabau pada mulanya surau-surau ini didirikan oleh suku dalam nagari tempat sembahyang berkaum-kaum, mengaji alquran dan tempat tidur anak-anak laki-laki yang telah akhir balig. Biasanya surau-surau itu didirikan di tepi air sehingga memudahkan orang mandi dan berudhuk. Di samping itu memudahkan guru agama mempraktekkan cara mengambil udhuk kepada murid-muridnya. Prestise suatu nagari terhadap nagari lain dalam banyak hal bergantung kepada pengaruh kepopuleran dari ulama yang mengajar di sesuatu surau. Bahkan tidak jarang nama sesuatu surau menurut ulama yang mengajar di surau itu seperti: Inyik Jambek dan suray Syech Bantam di Bukittinggi.¹⁵⁾ Di antara surau-surau yang terkenal itu meningkat menjadi pusat pendidikan Islam yang lebih tinggi yang dikunjungi oleh pelajar dari berbagai nagari.

Pusat pendidikan Islam lanjutan ini juga berfungsi sebagai saluran hubungan antara nagari. Surau Cangking di dekat Bukittinggi, menjelang meletusnya Perang Padri menjadi pusat ajaran tarikat Naqshabandiah yang berhadapan dengan surau Ulakan, pusat tarikat Syaltariyah. Murid-murid yang telah tamat dari pusat pendidikan Islam tersebut kembali ke nagari mereka masing-masing. Di sana mereka menjadi guru agama dan menyebarkan ajaran Islam yang diterimanya di pusat pendidikan tersebut dan sekaligus memecah isolasi agama dari suatu nagari.¹⁶⁾

Dengan cara demikian pengaruh ulama-ulama tersebut makin tersebar luas pada masyarakat nagari. Di nagar-nagari

yang penghulunya tidak berwibawa dan bertindak sewenang-wenang terhadap anak buahnya dan harta pusaka maka martabat ulama makin mendapat tempat di hati masyarakat.¹⁷⁾

Menurut seorang pegawai Belanda, Verkerk Pistorius (1860), prestise dan kekuasaan moral dari ulama dalam setiap bidang jauh lebih besar dari pemimpin-pemimpin penduduk (penghulu). Mereka tidak saja mengajar atau berkhutbah tetapi juga menyadarkan mereka dari lingkungan mereka yang lesu. Mereka membangunkan kesadaran akan diri sendiri dan rakyat untuk bekerja keras bagi kehidupan yang mulia dan sejahtera.¹⁸⁾

Berakhirnya Perang Padri berarti suatu pukulan yang menggoncangkan masyarakat Minangkabau. Belanda makin memperkuat kekuasaannya kepada masyarakat Minangkabau melalui Tuanku Laras dan Penghulu Kepala. Untuk mengeksploitasi rakyat secara maksimal maka kekuasaan Tuanku Laras dan Penghulu Kepala diperkokoh dan dilindungi Belanda. Memang tidak semua mereka itu mau menjadi kaki tangan yang patuh, namun bagi siapa yang menantang akan dihukum oleh Belanda, seperti regen Batipuh yang dibuang ke Batavia, karena membiarkan rakyatnya menyerang tangsi Belanda di Padang Panjang tahun 1841. Begitu pula Datuk Kayo Laras Koto Gadang mati dibunuh dengan racun karena tidak mau mematuhiinya begitu saja kepada Controleur dalam dialek Minangkabau disebut Tuan Kumandur.¹⁹⁾

Situasi nagari-nagari dan kelurahan makin memburuk, jika yang menjadi tuanku laras dan penghulu kepala itu adalah orang yang hanya berorientasi ke atasnya yakni Belanda tanpa memperhatikan rakyatnya. Rodi yang sejak semula memang tidak disenangi rakyat, menjadi semacam tugas yang menekan bathin karena dilaksanakan secara diktator atau kekerasan oleh Tuanku Laras, cara seperti ini sangat berlawanan dari nilai yang terkandung dalam kebudayaan Minangkabau. Tidak lagi

penghulu-penghulu pemimpin rakyat tradisional yang berkuasa, tidak lagi hukum adat menjadi pedoman sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat tetapi penguasa Belanda seperti Tuanku Laras dan *undang-undang Belanda*. Tidak saja penghulu terpukul tetapi kaum ulama juga. Mereka tidak kuasa lagi mengatur adat menurut syariat.

Maka keterlibatan penghulu dan ulama sebagai pemimpin rakyat menentang penjajahan Belanda adalah konsekwensi logis dari kepemimpinan mereka yang penuh dedikasi dan bertanggung jawab. Bahkan semangat perlawanan rakyat pada masa itu berorientasi kepada kedua tokoh pimpinan tradisional masyarakat Minangkabau ini.

Dalam rangka memperkokoh kekuasaannya, Belanda terus menerus mengurangi kekuasaan penghulu-penghulu di Minangkabau. Pemerintah Belanda mulai menyentuh kebebasan nagari-nagari dan suku dalam bentuk campur tangannya memerintah dalam beberapa urusan nagari/suku yang selama ini telah menjadi wewenang penghulu, pada rapat laras se Minangkabau tanggal 6 April 1865 di Bukittinggi yang dipimpin oleh Mr. Kinderen (Komisaris Pemerintah) kekuasaan laras dan penghulu dikurangi. Segala denda-denda atau undang yang delapan bukan lagi di tangan laras dan penghulu tetapi dipegang oleh pemerintahan Belanda. Malahan pada tahun 1873 pemerintahan menyatakan mulai berlaku undang-undang government sepenuhnya. Berlakunya undang-undang pemerintahan sepenuhnya bukan saja menggoncangkan para laras dan penghulu, tetapi sampai pada lapisan rakyat terbawah.

Kegoncangan masyarakat ini dapat kita pahami karena struktur masyarakat memang tidak menginginkan kekuasaan langsung dari luar suku dan nagari. Kebebasan yang mereka miliki sepanjang adat yang mereka pakai mendapat serangan dari Belanda, yang belum pernah mereka alami sebelumnya.

5. E k o n o m i.

Sejak masa sebelum penjajahan Belanda, kehidupan ekonomi desa di daerah Agam pada umumnya adalah pertanian. Penduduk dataran tinggi terutama menanam padi. Di samping itu mereka juga mengusahakan kerajinan tenun, logam dan perdagangan.

Lembaga di mana integrasi kehidupan ekonomi terjadi dalam bentuk hubungan dagang antara desa-desa pegunungan adalah pasar bergilir yang dalam dialek Minangkabau disebut *Pakan*, (artinya pasar yang diadakan sekali seminggu pada hari tertentu).

Walaupun sejumlah kecil pedagang keliling dan pedagang biasa, setiap harinya melakukan kegiatan perdagangan, namun kegiatan pasar mingguan bergilir tadi merupakan kegiatan ekonomi yang penting, dan peristiwa sosial yang penting.

Pedagang-pedagang keliling yang mengikuti kegiatan pasar tersebut datang dari daerah sekitarnya untuk menjual pakaian alat rumah tangga, perlengkapan pertanian dan kebutuhan hidup lainnya. Tukang-tukang dan pengrajin-pengrajin datang untuk membuat perhiasan, pakaian dan memperbaiki alat-alat perlengkapan kehidupan.

Nagari memperoleh bahagian yang penting dari hasil pajak yang dipungut dari pedagang yang datang untuk berniaga di pasar tersebut. Pajak yang dikumpulkan nagari dipergunakan untuk membiayai perayaan nagari, memperbaiki gedung kerapatan nagari dan sekedar uang perangsang bagi penghulu karena kegiatannya di dewan nagari. Sedangkan pekerjaan besar bagi kepentingan umum dilaksanakan secara "Sarayo" dari anak buah penghulu.

Difrensiasi pekerjaan tidak banyak ragamnya dan bersifat statis. Pada pokoknya kegiatan ekonomi mereka lebih bertujuan memenuhi kebutuhan sendiri, bukan untuk pasar. Kegiat-

an perdagangan yang dilakukan oleh para petani di pasar lebih bersifat usaha sampingan untuk melengkapi kebutuhan sendiri. Kegiatan pengrajin dan tukang-tukang berada dalam skala kecil, dan ditujukan untuk sekedar melengkapi kebutuhan hidup yang tidak tinggi pada waktu itu.

Keadaan ekonomi yang seperti akan mempersulit kehidupan ekonomi kaum laki-laki, karena sebagian besar mereka bekerja pada pertanian, sedangkan tanah pusaka dimiliki dan dikuasai oleh kaum wanita. Memang mereka diberi "abuan" oleh orang tuanya namun jumlahnya tidak seberapa. Abuan ini diberikan kepada anak-anak berupa satu atau dua ekor ternak, beberapa tanaman, uang sekali sepekan untuk disimpan dalam celengan atau tabungan mereka. Gunanya adalah untuk modal bagi perkawinan dan perniagaan nantinya. Namun hasil yang mereka peroleh dari "abuan" itu relatif tidak banyak. Keadaan dramatis akan dialami oleh seorang laki-laki Minangkabau jika mereka tidak berilmu dan berharta (kaya).

6. Perlawanan anti blasting

Pada tanggal 1 Maret 1908 di Bukittinggi pemerintah Belanda mengumumkan tentang pemungutan iuran blasting sebagai ganti dari Coffeestelsel yang telah dijalankan semenjak 1830. Hal itu diucapkan oleh L.C. Westenencck selaku wakil pemerintah Belanda dalam rapat laras yang diadakan pada bulan Maret 1908 di Bukittinggi dan dihadiri oleh seluruh laras-laras Agam dengan kata-kata: "Sekarang ini rakyat telah senang karena coffeestelsel akan dicabut, tapi sebagai gantinya akan dipungut bayaran blasting".²⁰) Ucapan L.C. Westenencck itu lebih terkenal dengan sebutan "proklamasi blasting" di kalangan rakyat.

Dalam rapat pada bulan Maret itu L.C. Westenencck minta persetujuan laras-laras dalam pemungutan blasting itu. Keba-

nyakan laras-laras itu yang kehadirannya mewakili rakyat daerahnya tidak dapat menerima tuntutan itu. Laras Sungai Puar mengajukan keberatannya dengan mengatakan rakyatnya banyak yang merantau dan tidak dapat dikenakan blasting. Sedangkan Laras Kamang waktu itu ialah GARANG DT. PALINDIH, berkata:

Kami sangat sependapat dengan Tuanku Laras Sungai Puar. Angguak anggak gelang amuah. Itulah di antara sifat-sifat anak nagari kami. Lebih suka dihukum daripada disuruh jual hasil kopi kepada Gubernemen Belanda. Itulah contoh diwaktu yang lampau.

Ucapan Laras itu lebih diperjelas dan dipertegas oleh seorang pemimpin rakyat yang sangat disegani Datuk Radjo Penghulu yang dengan tegas mengatakan dihadapan Westenenk :

Tuan, blasting tidak mungkin. Kami telah tuan tipu. Tuan yang harus membayar kepada kami. Kenapa tuan minta uang lagi kepada kami. Tuan kan pandai membuat uang. Sesempun tidak akan kami berikan. Musuh tidak dicari, kalau datang tidak dielakkan. Esa hilang kedua terbilang.²¹⁾

Kalau kita teliti lebih lanjut, sebenarnya coffeestelsel jauh lebih merugikan dari pada blasting. Coba kita bayangkan dengan coffeestelsel Belanda mendapat untung sebanyak $f. 0,50 - f. 0,16 = f. 0,34$ per kg. Misalkan seorang rakyat paling minimal dapat menghasilkan 30 kg kopi dalam satu kali panen, maka dari seorang penduduk Belanda dapat keuntungan $30 \times f. 0,34 = f. 10,20,-$. Sedangkan iuran blasting yang ditetapkan oleh Belanda hanya $f. 1,20$ setahun. Dari perhitungan di atas nyata kepada kita bahwa coffeestelsel jauh lebih merugikan daripada blasting. Tapi kenapa rakyat menolak blasting itu? Ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini terjadi.

Menurut anggapan rakyat coffeestelsel tiada lain dari jual beli. Rakyat sebagai penjual dan pemerintah Belanda sebagai pembeli. Dapatlah ini disebut perdagangan juga, walau

dalam hal ini pemerintah Belanda memonopoli pembelian dan menetapkan harganya. Sedangkan blasting nyata suatu "upeti" atau dapat diperhalus sebutannya dengan suatu "pemberian yang diwajibkan". Seolah-olah merupakan sewa tanah dari rakyat yang hidup di bumi sendiri. Inilah yang sangat ditentang oleh rakyat. Tidak hanya di Kamang rakyat menentang blasting, tapi di mana-mana rakyat menentang blasting itu dengan gigihnya. Blasting dirasakan sangat berat oleh rakyat karena uang adalah sesuatu yang sukar diperoleh ketika itu. Masyarakat Kamang adalah masyarakat agraris yang sebahagian besar penduduknya hidup bertani. Bagi masyarakat agraris produksi dan hasil-hasil tanah hampir tidak diperjual-belikan. Uang memegang peranan yang kecil sekali. Ekonomi atas dasar mencukupi kebutuhan sendiri dalam lingkungan yang kecil menyebabkan tingkat hidup yang rendah, dan mendapatkan uang walau dalam jumlah kecil sangat sulit dalam masyarakat yang agraris ini. Jual beli di pasar-pasar terdiri dari perdagangan pertukaran (ruihardel, barter). Umpama kopi ditukarkan dengan garam, beras dan buah-buahan ditukarkan dengan keperluan lain, jarang sekali dengan uang.^{2 2)}

Di Kamang pun pada masa itu keadaan ini belum maju. Memang dalam perhitungan, Belanda menetapkan harga kopi f. 0,08 (Rp. 0,08,—) per pond, tapi Belanda menukarnya dengan garam dan keperluan hidup yang lain. Bagi masyarakat Kamang sendiri blasting sebesar f 1,20 per kepala dalam setahun itu terasa berat bila dibandingkan dengan kemampuan untuk menghasilkan 1 pikul atau 1 pikul beras umpamanya, sebab mereka tidak mempunyai uang seperti halnya dengan masyarakat yang hidup dari perdagangan. Rakyat Kamang di bawah pimpinan Datuk Machudum dan dua orang kawannya Sidi Gadang dan Datuk Kondo pada 12 Juni 1908 mengadakan demonstrasi di muka Kantor Luhak Agam di Bukittinggi. L.C. Westenenk yang bertindak sebagai wakil pemerintah Belanda untuk kesekian kalinya, menerima rakyat di kantornya. Wakil-wakil rakyat itu menyatakan bahwa rakyat

menolak iuran blasting walau dalam bentuk apapun. Dan mendesak agar Belanda menarik kembali pengumumannya tanggal 1 Maret 1908 tentang pemungutan blasting itu. Dalam hal ini Belanda menjalankan kecurangan untuk kesekian kalinya. Rakyat disuruh pulang kembali ke kampungnya, sedangkan Dt. Machudum Sidi Gadang dan Dt. Kondo ditahan oleh Westenenk untuk penyelesaian selanjutnya.

Ternyata ketiga pemimpin itu dijebloskan ke dalam penjara. Kesewenang-wenang, kecurangan pemerintah Belanda itu, menempatkan penguasa Belanda sebagai orang-orang Kafir yang menjadi musuh besar Islam dalam pandangan rakyat. Pandangan rakyat yang demikian itu dikukuhkan oleh Ulama, bahkan lebih jauh mereka mengatakan mati dalam melawan kafir adalah "mati syahid".

Disaat-saat kebencian itu sangat memuncak dirasakan oleh rakyat Kamang, maka pulanglah beberapa haji dari tanah suci di antaranya Haji Abd. Manan yang akan kita kenal sebagai seorang penggerak dan promotor dari Perang Kamang itu.

Mulailah Haji Manan dengan beberapa ulama yang lain memberikan penerangan-penerangan yang bersifat membangkitkan semangat rakyat untuk melaksanakan "perang sabil" terhadap Belanda. Di surau-surau dan langgar-langgar dalam kenagarian Kamang dan sekitarnya diadakan wirid-wirid pengajian agama. Dan kesempatan itu telah dipergunakan sebaik-baiknya oleh para ulama untuk menggembelng rakyat di dalam mempersiapkan suatu peperangan.

Dapat dikatakan di sini bahwa dari surau-surau dan langgar itulah semangat juang dipompakan oleh ulama-ulama Islam kepada rakyat. Surau dan langgar itu telah menjadi wadah untuk penempatan semangat juang pada waktu itu. Surau Taluk (surau yang terletak dekat makam pahlawan Kamang sekarang) merupakan pusat persiapan perang itu, seolah-olah merupakan markas besar dari pejuang-pejuang Kamang.

Dari sinilah Haji Manan dan ulama-ulama mengkoordinir kekuatan tempur itu baik fisik maupun mental. Dan sebuah surau lagi yang patut dicatat disini ialah Surau Kanidai.

Di Surau Taluk pada malam terjadinya perang Kamang itu rakyat yang ikut berperang telah mengadakan doa bersama sesudah shalat berjamaah. Mereka berdoa kepada Tuhan dan meminta berkah dari pada Nya, serta meminta kerelaan dan ampun Nya, sebab sebentar lagi mereka akan bertarung menghadapi maut. Setelah selesai berdoa bersama ini maka dari Surau Taluk inilah turunannya rakyat menuju Kampung Tengah menghadang tentara Belanda.

Di malam hari setiap habis mengaji di langgar-langgar atau sesudah mendengarkan penerangan agama, maka para pemuda belajar silat di halaman surau dengan diajarkan oleh seorang guru silat yang telah jagoan. Datuk Radjo Penghulu adalah seorang yang telah berjasa besar dalam hal ini. Kalau di atas telah dijelaskan bahwa Haji Abdul Manan berjasa besar di lapangan persiapan mental, maka Datuk Radjo Penghulu berjasa besar di lapangan fisik. Keduanya mempunyai andil dan peranan yang sama besar dalam Perang Kamang. Mutlak keduanya itu adalah pemimpin. Kedua-duanya seolah-olah dwitunggal yang tak dapat dipisahkan dalam sejarah Perang Kamang. Kelirulah orang kalau ada yang menganggap salah seorang lebih berjasa di antaranya.

Sementara itu situasi makin krisis, lebih-lebih setelah gagalnya perundingan antara Datuk Perpatih dengan wakil Belanda di Surau Kanidai. Wakil Belanda itu melapor/meminta bantuan ke Bukittinggi. Pada tanggal 15 Juni 1908 pemerintah Belanda yang ingin memaksakan blasting itu mengirim satu kompi infantri lengkap ke daerah Kamang di bawah pimpinan L.C. Westenenk sendiri dengan perwira-perwiranya Kapten Van der Stock dan Letnan Dubeil.

Sebelum sampai ke negeri Kamang, di suatu tempat yakni Simpang Ampat Sungai Tuak Tilatang pasukan yang

berkekuatan satu kompi itu dipecah dua. Sebahagian menuju ke Kamang di bawah pimpinan L.C. Westenenc dan bertugas menangkap hidup-hidup pendekar Kamang yakni H. Abd. Manan dan Dt. Radjo Penghulu yang menentang blasting. Pasukan patroli Belanda tersebut dihadap oleh rakyat dan pertempuran bersenjata bedil lawang rudus tidak dapat dilakukan lagi. Negeri sekitar terjadinya pertempuran itu memukul tabuh dan rakyat bangkit melawan Belanda. Dengan kepala yang diikat dengan secarik kain putih dan ditangannya memegang rudus sambil membaca zikirillah mereka serbu patroli Belanda. Perlawanan ini dapat dipadamkan oleh Belanda, dan penangkapan mulai dilakukan Belanda. Walaupun perlawanan digerakkan oleh ulama namun dari delapan orang yang ditangkap dan dipenjarakan Belanda ternyata tujuh orang penghulu dan hanya satu orang yang ulama. Perlawanan rakyat Agam menentang blasting bukan Kamang saja. Pada tanggal 23 Juni 1908 patroli Belanda diserang rakyat di pekan Ahad Koto Baru yang terletak sekitar sembilan km sebelah Selatan Bukit-tinggi. Perlawanan rakyat Manggopoh dekat Lubuk Basung cukup merepotkan Belanda di daerah itu.

Perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Minangkabau dalam menentang Blasting (perang blasting), jelaslah bahwa perlawanan digerakkan Alim Ulama dan memberi kekuatan moral bagi rakyat untuk berjihad. Benar apa yang diingatkan oleh Verkerk Pistorius, pada pemerintahan Belanda dalam tahun 1868, bahwa: *"We (the Dutch) are standing on Vulcanic soil, because of the great influence of the Ulama among the people"*.²³⁾

Oleh karena itulah pengamat Belanda yang lain menyarankan agar pemerintah memajukan kesejahteraan rakyat dan memajukan pendidikan Barat, karena tidak adanya golongan menengah yang akan menentang Islam.

Usaha Belanda ke arah kemajuan pendidikan Barat di Minangkabau agak lambat dan tidak dapat memenuhi ke-

inginan rakyat Minangkabau yang selalu meningkat untuk mengikuti pendidikan Barat. Keadaan seperti ini memberi peluang untuk berdirinya sekolah agama modern dan sekolah swasta sekuler di Sumatra Barat yang dapat mengimbangi sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah.

CATATAN BELAKANG BAB II

1. Pe. De Josselin, *Minangkabau and Nagari Sembilan*, hal. 106.
2. Bandingkanlah "Basa Ampek Balai" sebelum dan sesudah pengaruh Islam. Sebagai Basa yang keempat adalah "Tua Gadang". Dengan masuknya pengaruh Islam, Basa keempat tersebut menjadi "Tuan Kadhi", sedangkan "tuan gadang" dikeluarkan dari Basa Empat Balai.
3. Lihat Muhammad Syaid, *Sedjarah Minangkabau dengan mengaring dan mempergunakan karya penulis asing* (Batusangkar, 1970), hal. 4.
4. *Manaruko* ialah membuka daerah pertanian baru atau pemukiman baru.
5. Wawancara dengan M. Daud Dt. Panglimo Kayo, Bukittinggi, 11 November 1982.
6. A. Dt. Majo Indo, *Tambo Alam Minangkabau* (Jakarta 1976), hal.22.
7. Dt. Sangguno Dirajo, *Curaj Paparan Adat Lembaga Alam Minangkabau*, (Snelpers Drukkerij Agam, Fort De Kock), hal. 101.
8. *Ibid*, hal. 96 - 97.
9. *Ibid*, hal. 97.
10. *Ibid*, hal. 100.
11. Dt. Batuah Sanjo, *Tambo Alam Minangkabau*, (Lembago, Payakumbuh), hal. 101.
12. *Ibid*, hal. 35.
13. Taufik Abdullah, *Minangkabau 1900 - 1927*, hal. 10.
14. *Ibid*, hal. 41.
15. Wawancara dengan Dt. Panglimo Kayo, Bukittinggi, 11 November 1982.
16. Taufik Abdullah, op. cit, hal. 30.
17. Wawancara dengan Dt. Panglimo Kayo, 11 November 1982.
18. *Ibid*, hal. 40.

19. Hamka, *Ayahku*, (Jakarta, Jayamurni, 1967), hal. 23.
 20. Wawancara dengan Ilyas Datuk Majolelo, Bukittinggi, 5 Juli 1982.
 21. Junirman Nauman, "Latar Belakang Perlawanan Rakyat Minangkabau Permulaan Abad XX, (*Skripsi Sarjana*), hal. 39.
 22. Prof. Dr. Mr. Prayudi Atmosudirjo, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, (Pradnjapramita, Jakarta, 1962), hal. 94 – 109.
 23. Taufik Abdullah, *op. cit*, hal. 41.
-

B A B III

DARI BENTENG KE IBUKOTA SUMATRA

Pada tahun 1820, ketika Perang Padri sedang berkecamuk, Belanda mendirikan benteng di sebuah bukit yang masuk Tanah Ulayat Kurai. Benteng itu disebut Fort de Kock, mengikuti nama Jendral de Kock, yang ketika itu menjabat Gubernur Jendral Hindia Belanda. Tentu saja sebuah benteng memerlukan berbagai keperluan logistik mulai dari keperluan akan bahan makanan sampai dengan segala macam pertukangan. Tentu perlu pula diingat bahwa Perang Padri bermula sebagai "perang saudara", dan sebagaimana telah dikatakan oleh pihak Belanda, bahwa keikutsertaan mereka hanyalah untuk menolong apa yang disebut "golongan adat", maka tentu tidak pula mengherankan kalau cukup banyak juga penduduk yang tidak merasa benteng de Kock itu suatu ancaman. Dengan demikian, secara berangsur-angsur di sekitar benteng mulailah bermunculan rumah, kedai dan warung. Sebuah kota yang relatif terpisah dari "pemerintahan" nagari telah makin berkembang.

Apalagi kalau diingat, bahwa sebelum benteng didirikan, tempat ini telah juga menjadi persinggahan para pedagang.

Ketika Perang Padri masih berlanjut, tetapi daerah Agam telah dikuasi Belanda, penanaman kopi mulai dipaksakan kepada penduduk. Meskipun tanpa sistim, seperti di Jawa, namun di daerah-daerah yang telah dikuasai Belanda "penanaman kopi dan rodi" telah mulai dipaksakan. Bahkan dalam usaha memikat hati rakyat Minangkabau, di tahun 1833, dalam dokumen yang disebut Plakat Panjang (*Lange Verklaring*) monopoli kopi ditekankan juga. Jadi, meskipun peranan sebagai benteng perang telah berakhir, di Fort de Kock, menjelang awal 1830-an telah berdiri *pakhuis* gudang-gudang pengumpulan kopi. Kemudian setelah perang praktis selesai dengan keme-

nangan Belanda, kota yang berasal dari benteng ini menjadi pusat pengumpulan kopi untuk Padang Darat. Hal ini tentu saja makin menjadikan Fort de Kock lebih dikenal masyarakat sekitar sebagai Bukittinggi, sebagai pusat kegiatan ekonomi.

Kemudian, dengan kemajuan transportasi dan makin amannya perjalanan, Bukittinggi makin ramai didatangi oleh orang dari luhak-luhak lain.

Dalam rangka memantapkan kekuasaan, Belanda mulai menyusun administrasi pemerintahannya. Hierarchi pemerintahan tradisional dalam bentuk nagari-nagari dengan kelengkapannya masih dipertahankan oleh Belanda. Di atas itu dibentuklah suatu lembaga baru ciptaan Belanda. Pada tahun 1833 diperkenalkanlah sistim kelarasan dalam mana setiap laras membawahi beberapa nagari yang secara historis dan adat dianggap homogen.

Adapun kekuasaan yang terdapat di Agam ialah sebagai berikut:

1. Kelarasan Banuhampu
2. Kelarasan Sungai Puar
3. Kelarasan Batu Palano
4. Kelarasan Sihanok
5. Kelarasan Koto Gadang
6. Kelarasan Tilatang/Gadut
7. Kelarasan Magek
8. Kelarasan Kamang
9. Kelarasan IV Angkat
10. Kelarasan Lasi
11. Kelarasan Kurai V Jorong.

Dari kelarasan-kelarasan inilah terutama yang mula-mula menempati Bukittinggi dan mengambil kesempatan dari kota yang baru berdiri ini.

Dalam tahun 1858 yang memerintah Nagari Kurai V Jorong ialah Laras gelar Tuanku Kurai. Pada tahun itu juga Na-

gari ini (Kurai V Jorong) digabung dengan Nagari Banuhampu dengan surat keputusan Jendral Mayor Militer dan Sipil Gubernur Sumatra Barat tanggal 16 Juni 1857 No. 1135.

Setelah penggabungan dengan Nagari Banuhampu yang menjadi Laras Kurai Banuhampu ini ialah Oerip gelar Rajo Mantari. Beliau ini meninggal pada tahun 1873 dan digantikan Chatib Babaju Ameh (Khatib Berbaju Emas) yang berasal dari Banuhampu. Pada tanggal 15 Mei 1897 Laras ini digantikan oleh seseorang Kurai V Jorong, cuma sebelas bulan saja memerintah karena meninggal pada tanggal 21 April 1898. Beliau ini digantikan oleh Laras Datuk Bandaro Panjang orang berasal dari Banuhampu (Kubang Putih).

Kelarasan Kurai V Jorong, dalam mana termasuk pasar Bukittinggi, mula-mula terdiri atas lima jorong (nagari) yang masing-masing berdiri sendiri. Kemudian, kelimanya dibagi atas dua daerah yang dikuasai oleh Penghulu Kepala, yang bergaji. Pembagian kelima jorong itu ialah sebagai berikut:

1. Seorang PenghuluKepala memerintah Nagari Tigo Baleh, Aur Birugo serta Kota Selayan.
2. Seorang lagi Penghulu Kepala yang memerintah Nagari Mandiangan serta Guguk Panjang.

Setelah diadakan Penghulu Kepala yang bergaji maka daerah kedua Penghulu Kepala yang tiada bergaji dipecah dan dijadikan lima jorong, dan tiap-tiap jorong diperintah oleh seorang Penghulu Kepala.¹⁾

Dengan peraturan pemerintah Belanda menurut Stadblad 1913 No. 321 jabatan Laras di Sumatra Barat dihapuskan, maka Kelarasan Kurai-Banuhampu juga dihapuskan. Diganti dengan District Bukittinggi yang diperintah oleh seorang Districthoofd (Demang) dengan daerahnya meliputi Nagari Tigo Baleh, Koto Selayan, Mandiangan, Guguk Panjang dan Aur Birugo yang masing-masing diperintah oleh seorang Kepala Nagari.

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KOTA DAN PASAR BUKITTINGGI DAN MASALAHNYA.

Konon, sebelum kota Bukittinggi didirikan baru ada sebuah pekan yang bernama Pekan Kurai. Pekan ini terletak di daerah yang sekarang bernama Gurun Panjang. Bangunan pada pekan tersebut baru bersifat darurat saja seperti pondok-pondok dan payung-payung pelindung tempat orang berjualan. Ke pekan ini berdatangan orang di sekitar kenagarian Kurai membawa hasil pertanian/kerajinannya tiap-tiap hari pekan (pekan Sabtu).

Di Pasar Atas (sekarang) terdapat pasar ternak untuk jual beli kerbau, kuda, sapi dan ternak lainnya. Berikutnya dekat pasar ternak ini terdapat pula kedai-kedai darurat dari orang Cina dan orang Keling yang berdatangan dari Padang yang hendak berjualan ke Pekan Kurai ini. Dari Padang mereka datang melalui jalan kuda beban lewat Pauh, Sitinjau Laut, Cupak, Selayo, Panyinggahan, Sumpur, Batipuh Baruh, Malabak, Tandikat, Koto Gadang ke Pekan Kurai.²⁾

Di dekat Pekan Kurai ini, di puncak bukit yang tertinggi, bernama Bukit Jirak, yang terdapat dalam kota Bukittinggi sekarang, dibangun benteng "de Kock" dalam rangka menumpas Gerakan Padri. Tanah tempat dibangunnya benteng tersebut diperoleh atas semufakat penghulu-penghulu Kurai yang sebelumnya telah membuat perjanjian akan saling bantu membantu dengan Belanda. Selanjutnya dibangun tangsi-tangsi serdadu di jalan rumah sakit sekarang, bersebelahan dengan Lapangan Atas Ngarai dibangun pula beberapa rumah opsir Belanda. Berikutnya dibangun lagi rumah Residen, rumah pegawai, gedung untuk rapat, sekolah-sekolah, kuburan-kuburan dan bangunan-bangunan lainnya. Bangunan-bangunan tersebut terletak dekat Bukit Jirek (Jirat), Bukit Sarang Gagak, Bukit Tambun Tulang, Bukit Cubadak Bungkok, Bukit Bulek, Bukit Malambung dan Parak Kopi.

Jadi setelah benteng dan gedung-gedung lain dibangun maka di atas Bukit Cubadak diadakan pasar oleh kepala-kepala nagari di Kurai kira-kira tempatnya di Pasar Atas sekarang. Dan mula-mula orang-orang Kurai diminta untuk meramaikan pasar itu oleh ninik mamak dan Kepala Nagari. Lama kelamaan pasar Bukittinggi semakin ramai juga dan bagi mereka yang beruang mendirikan kedai-kedai yang agak kokoh dan demikian pula orang dari luar Kurai juga orang Keling dan orang Cina pun ikut membangun kedai-kedai di sini. Kepada segala orang yang berkedai dan berwarung diminta uang iuran untuk perawatan pasar. Akan tetapi sebagian dari mereka tak mau membayar iuran tersebut karena beranggapan bahwa pasar tersebut adalah tanah mereka. Jadi pada saat ini belum ada berlaku suatu peraturan bagi pengurusan pasar itu.

Suatu peristiwa yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pasar dan kota Bukittinggi terjadi pada tahun 1858 ialah diserahkannya tanah oleh penghulu-penghulu di kenagarian Kurai kepada pemerintahan Belanda dengan hak pakai dan lamanya tidak ditentukan. Dengan ketentuan kalau tanah tersebut tak dipergunakan lagi maka akan dikembalikan kepada orang Kurai. Tanah tersebut ialah semua bukit-bukit sekeliling *Bambulaan* yang sekarang dinamakan Jalan DR. Rivai, Tembok, Aur Tajungkang, Gudang, Jalan rumah Obos dan tanah-tanah di muka rumah sakit militer. Dalam lingkungan tanah itu juga termasuk benteng (Bukit Jirek), Rumah Residen, Kuburan Belanda Lama, Wyk India, Kampung Nias dan Kebun Bunga (kebun binatang sekarang dan dahulunya kuburan Cina).

Pada mulanya apapun yang diperbuat Belanda atas pasar itu selalu dimufakatkan dengan penghulu-penghulu Kurai. Tetapi lama kelamaan pemerintah Belanda menguasai saja tanah pasar itu antara lain dengan mengizinkan orang-orang yang bukan orang Kurai untuk mendirikan kedai-kedai dan warung-warung pada tanah-tanah tersebut.

Pada tahun 1861 untuk membangun tangsi/komponen, rumah-rumah opsir dan Tanah Lapang militer di Fort de Kock (Bukittinggi) Belanda membeli tanah/sawah kepada orang Kurai seharga f 46092,- (gulden). Dan telah dibayar kepada sipemilik menurut besluit Gubernur Jendral Belanda tanggal 5 Mei 1861 No. 37 telah dicatat dalam surat akta tanggal 3 September 1861 No. 1 atas nama Gubernemen Belanda.

Berikutnya 24 November 1887 dipinjamkan lagi tanah oleh penghulu-penghulu Kurai kepada Belanda atas nama Residen Padang Darat J.L. Boyle dengan penjelasan sebagai berikut:

"Tanah-tanah yang digambarkan dalam peta yang dibuat oleh Opsir Genie di Fort de Kock adalah sebagian dari tanah-tanah yang dalam tahun 1858 dipinjamkan penghulu-penghulu untuk dipakai tiada ditentukan lamanya, kepada Gubernemen Hindia Belanda (voor onbepaalden tyden brukkilen afgestaan aan het Med Indische Gouvernement). Yang bertanda tangan di bawah surat ini ialah Residen Boyle, tiada berkeberatan tanah tersebut buat beberapa waktu diserahkan kepada Departemen Militer, yaitu tempat rumah Sakit Militer, benteng Steereschan (benteng pelindung) dan tanah lapang tempat latihan dan bila Militer tidak memerlukan tanah itu lagi, harus dikembalikan hak atas tanah itu kepada orang Kurai.³⁾

Benteng Sterreschan tersebut di atas pada tahun 1897 dibongkar dan dijual menurut bunyi surat Gubernur Sumatra Barat tanggal 27 Februari 1897 dengan besluit Residen Padang Darat tanggal 6 Maret 1897 No. 1054 dan tanahnya diambil alih oleh pemerintah Belanda.

Berikutnya tahun 1888 Belanda menetapkan batas kota Bukittinggi (Fort de Kock) menurut besluit Gouverneur General tanggal 1 Desember 1888 No. 1 sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur Laut dan sebelah Utara yaitu dari satu tempat di mana bandar sebelah Barat dari Bandar Malang melalui pancang (tiang) yang bertanda A pada jalan dekat Kuburan Cina lama dengan pancang (tiang) bertanda I terletak di jalan ke kampung Palupuh. Dan dari sini satu garis lurus lagi ke pancang (tiang) yang bertanda B yang terdapat pada jalan kecil ke kuburan Belanda baru.
- b. Sebelah Barat Laut, sebelah Barat dan sebelah Tenggara ialah jalan kecil (kuburan Belanda baru) tersebut di atas sampai ke kuburan Belanda Baru. Dan dari sini batas sebelah Barat Daya dari kuburan Belanda tersebut sampai ke pancang (tiang) bertanda C ini dengan sebuah garis lurus mengarah ke pancang bertanda D berhubungan dengan sebuah pancang berhuruf E. Berikutnya dari pancang E ini menuju pula pancang berhuruf F yang terletak $\pm$ 240 M jauhnya di sebelah Barat jalan arah ke Padang Panjang.
- c. Sebelah Selatan, dari pancang F ditarik satu garis lurus ke arah Timur sampai dengan titik temunya jalan arah ke Padang Panjang.
- d. Sebelah Timur. Dari titik temu tersebut di atas menghiriri Bandar Malang yang terbagi dua, pada bandar yang sebelah Barat sampai ke tempat pertemuan bandar ini dengan jalan ke Payakumbuh.⁴⁾

Selanjutnya pada tahun 1896 dibangun oleh Belanda sebuah los pasar sebab pasar semakin ramai juga dan bagi biaya pembangunannya sebahagian dipinjam dari "Singgalang Fonds" sebanyak f 4.000,— (gulden). Setelah los tersebut siap, dipersewakan kepada para pedagang. Berikutnya pada tahun 1898 dibangun pula sebuah los untuk menggaji para petugas pasar. Sewaktu Kontroler Y.C. Westenent bertugas di Bukittinggi, pasar banyak diperbaiki dan ditambah lagi pembangunan los serta mana yang tidak perlu dibongkar juga pendataran tanah dalam pasar tersebut. Bagi pembiayaan pemba-

ngunan sebagian uang banyaknya f 2.000,— Kepada N.Y. Escompto Maatschappy dan sebagai borg diberikan pasar Bukittinggi ini semua.

Dalam tahun 1898 penghulu-penghulu di negeri Guguk Panjang mengadu kepada Residen Padang Darat H.K. Prias dan mendakwa bahwa sebagian pasar Bukittinggi mereka yang punya dan mereka meminta sebagian dari keuntungan pasar. Karena sesudah Negeri Kurai dijadikan satu dengan Banuhampu mereka tak mendapat hasil lagi. Terutama pada masa Kontroler Y. Van Hengel, pengurus pasar Bukittinggi membagi-bagikan saja segala keuntungan pasar itu kepada Daerah Agam Tuo. Setelah diperiksa pengaduan tersebut oleh Kontroler H. Ris ternyata menurut Kontroler dakwaan tersebut tidak betul sebab pasar terletak di atas tanah orang Kurai yang terdiri dari lima jorong, dan Guguk Panjang hanya merupakan salah satu dari jorong. Kemudian Penghulu-penghulu Guguk Panjang menambahkan bahwa mereka mewakili negeri Kurai. Dan dijawab oleh Kontroler bahwa hal yang demikian tidak menurut adat, sehingga pengaduan tersebut tidak berhasil.

Berikutnya pada tanggal 30 Juli 1906 ada lagi pengaduan yang diajukan oleh 24 orang penghulu dari Kurai kepada Residen Padang Darat yang mengadukan "Het plzatselyk Bestuur van Fort de Kock (pemerintahan Nagari Bukittinggi). Penghulu-penghulu itu mengadukan Pemerintah Nagari Bukittinggi telah melanggar adat dan pusaka mereka. Telah mendirikan toko-toko, warung-warung dan bangunan lain diatas tanah yang sekarang tidak lagi bermufakat dengan mereka. Dahulu siapa yang memotong Kerbau atau Sapi mesti membayar f 4,— (empat gulden) kepada penghulu-penghulu, sekarang itu dihapuskan.

Begitu pula waktu Residen Prias pemerintah telah memancang saja tempat di mana akan dibangun los besi tidak setahu para penghulu. Setelah kami menyatakan keberatan

kepada Residen pancang itu dibuang tetapi sekarang didirikan saja los besi oleh pemerintah dengan tidak bermufakat dengan kami. Sekarang pemerintah mendapat saja sewa rumah, toko, sewa gudang, warung dan lain-lain di atas tanah kota dan Pasar Bukittinggi yang sesungguhnya milik kami orang Kurai.

Pada tanggal 4 Agustus 1906 Residen Padang Darat menyerahkan surat pengaduan dari para penghulu itu kepada Kontroler Agam Tuo L.C. Westerent untuk diperiksa. Menurut hasil pemeriksaan Kontroler di antara nama 24 orang penghulu yang mengadu itu 9 orang tukang hasut sebagai biang keladinya dan mereka yang 9 orang ini ditangkap dimasukkan ke dalam tahanan.

Bagaimana cara pemerintah Belanda merampas tanah kota dan pasar Bukittinggi yang asalnya milik orang Kurai dapat dikutip keterangan kontroler Westerent:

"Segala bukit (houvel) Bukittinggi, yang dilindungi oleh jalan Bambulaan, Tembok, Aur Tajunggang, Gudang, Jalan Sociteit dan lagi tanah buat rumah sakit dan tanah lapang di mukanya (exertierterrein dahulu) adalah diserahkan oleh penghulu-penghulu Kurai lamanya tidak ditentukan buat dipakai sebagai pinjaman kepada Gubernemen Belanda. Kontroler Westerent menerangkan lagi dengan macam-macam alasan bahwa hak atas tanah yang tersebut di atas adalah terletak pada Gubernemen Belanda dan bukan dalam tangan penghulu dari Kurai".

Tidak ada alasan bagi orang Kurai demikian dikatakan oleh Westerent selanjutnya karena:

Yang pertama : Pasar yang letaknya di atas bukit dahulu waktu kontroler J. Van Hengel dipertinggi dan diperdatar oleh penduduk Agam Tuo yang berodi dan juga di sana didirikan los-los dari batu oleh orang-orang rodi diseluruh Agam Tuo. Hal ini tidak akan terjadi kalau tanah itu bukan tanah Gubernemen.

- Yang kedua** : Jalan-jalan besar yang di atas dan sekeliling pasar itu selalu dipelihara oleh orang berada di seluruh onderafdeling, tiap Laras ada bahagiannya.
- Yang ketiga** : Tiap penduduk dari daerah pasar itu menerangkan, bahwa dia tinggal di atas tanah Kompeni, jadi satu tanda yang penghulu Kurai belum pernah menerangkan hak mereka kepada penduduk tanah tersebut, atau berusaha menerangkan hal itu.
- Yang keempat** : Di atas tanah itu terdapat kebun kopi Magek dan Baso.
- Yang kelima** : Belum pernah seorang Kurai menyanggah atas pendirian rumah-rumah di atas tanah-tanah itu. Rumah-rumah di pasar milik Tionghoa dan banyak rumah-rumah tempat tinggal orang Eropah, sebenarnya telah ber-puluh-puluh tahun berdiri di sana.

Dalam hal ini dapat kita katakan bahwa sikap licik Belanda itu memang nyata. Karena dari mulanya diketahui buat membangun benteng pertama, dan bangunan-bangunan yang berikutnya dipinjamkan tanah oleh penghulu-penghulu Kurai kepada Belanda yaitu: yang pertama pada tahun 1858 dan sebagainya. Mengenai lamanya peminjaman tidak ada ditentukan batasnya. Di sinilah Belanda mempergunakan kelicikannya karena batas waktu peminjaman tidak ditentukan maka Belanda seenaknya menganggap tanah tersebut kepunyaannya sendiri.

Jadi karena itu di Minangkabau suah menjadi pameo dalam masyarakat, kalau ada orang yang mempunyai sifat mula-mula meminta sedikit dulu, kemudian meminta sedikit lagi dan akhirnya semuanya mau diminta sampai habis.

Kemudian dalam rangka menghilangkan hak orang Kurai atas tanah pasar Bukittinggi itu Gubernur Sumatra Barat J. Ballot menulis seperti berikut: Pasar-pasar di Fort de Kock, Payakumbuh, Padang Panjang dan Fort van de Capellen didirikan oleh nagari-nagari dari masing-masing onderafdeling dan dibuka untuk nagari-nagari tersebut. Ringkasnya pasar Bukittinggi didirikan oleh segala nagari-nagari dalam onderafdeling Agam Tuo dan diexploitir untuk nagari itu.

Ketika terjadi lagi sengketa antara orang Kurai dengan Kontroler Westerent pada tahun 1907 karena Kontroler membangun los-los di pasar Bukittinggi dan melelangnya tanpa mufakat dengan ninik mamak/penghulu Kurai, maka Westerent memulangkan soal ini kepada Laras-laras di Agam. Laras-laras memberi keputusan, bahwa tanah itu tidak kepunyaan orang Kurai lagi melainkan kepunyaan orang Agam Tuo dan orang Kurai tetap tidak dapat menerima putusan Laras-laras tersebut.

Bahwa tiap-tiap laras mempunyai tanah sebagai pesanggerahan di pasar Bukittinggi bila banyaknya laras di Agam Tuo yaitu 11 orang maka terdapat 11 buah rumah. Ongkos pembuatan rumah ditanggung oleh kelarasan. Setelah jabatan laras ditiadakan lagi maka pada tahun 1915 rumah itu semuanya dijual. Sebagai gantinya didirikan saja 3 buah rumah di pasar Bukittinggi ini sebagai pesanggerahan Demang-demang, Aisten Demang dan Kepala-kepala Nagari kalau berkunjung ke Bukittinggi.

Belum ada penyelesaiannya Belanda menimbulkan masalah baru lagi terhadap orang Kurai yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Jendral Belanda tanggal 20 Mei 1930 No. 25 tentang batas-batas Gemeente Bukittinggi. Kembali dengan mencabut besluitnya tanggal 1 Desember 1888 No. 1 yang bunyinya: Ditetapkan batas-batas buat Gemeente Bukittinggi seperti berikut:

- Sebelah Utara** : Dari pancang yang bertanda A, yaitu tempat di mana jalan dari Kampung Pintu Kebun berbelok ke kampung Jirat, tepi utara jalan yang ada sekarang panjangnya 1470 m menuju ke Timur sampai dipancang yang bertanda B (letaknya 50 m ke sebelah Timur dari tempat di mana jalan berbelok ke Selatan).
- Sebelah Timur** : Satu garis dan pancang yang bertanda B di atas ditarik ke Selatan panjangnya 950 m sampai di jalan Bukittinggi – Payakumbuh (pancang yang bertanda C). Kemudian satu garis ditarik ke Tenggara panjangnya 1875 m, sampai di pancang yang ada sekarang dari kampung Tarok ke kampung Aur di sini pancang bertanda C.
- Sebelah Selatan** : Tepi Selatan jalan yang ada sekarang dari pembelokan, pancang yang bertanda E, ke barat yang panjangnya 555 m, sampai ke pancang yang bertanda F (tempat yang letaknya 50 m ke barat dari jalan Bukittinggi – Padang Panjang).
- Sebelah Barat Daya**: Satu garis tarik ditarik ke Barat Laut panjangnya 790 m ke pancang yang bertanda G, kemudian sepanjang tepi Selatan jalan kecil dari pancang yang bertanda C ke pancang bertanda H. Kemudian garis sambungan dari pancang yang bermerek I, sepanjang pancang-pancang yang sudah ada sekarang (yaitu 1 sampai dengan 9) ke pancang yang bermerek J sampai di pancang yang bermerek K panjangnya sama sekali 800 m dan penghabisan tepi Barat

jalan dari pancang K menuju ke utara panjangnya 575 M sampai di pancang yang bertanda A.

Disebabkan perobahan batas-batas kota Bukittinggi maka orang Kurai atas prakarsa Dt. Rajo Dilangit dan kawan-kawan mendirikan perkumpulan yang bernama P.O.K.O.K. (Permu-syawaratan Orang Oentuk Keselamatan) di Bukittinggi. Karena mereka keberatan dengan tindakan pemerintah Belanda dengan perluasan Gemeente Bukittinggi itu maka lebih separoh jorong Aur Birugo, dua pertiga dari jorong Guguk Panjang dan $\pm$ sepersepuluh bahagian dari Jorong Mandiingin yang masuk Gemeente Bukittinggi.

Sebenarnya sebelum ini Belanda dengan mengapproach ninik mamak alim ulama dan cerdik pandai lewat rapat yang diadakan untuk mencapai maksud mereka memperluas daerah Gemeente Bukittinggi tidak berhasil. Karena itu *Gemeente* mengambil kebijaksanaan sepihak.

Karena itu oleh perkumpulan P.O.K.O.K. diadakan Rapat Besar di tanah lapang Pakan Kurai di daerah Gurun Panjang untuk membicarakan ada bagian-bagian tanah orang Kurai yang dicaplok oleh Gemeente Bukittinggi. Pembicaraan Mohd. Zen Djambek mengatakan "bahwa orang Kurai berkeberatan, yang kampung-kampung mereka dimasukkan ke dalam daerah *Gemeente Fort de Kock*.

Mendengar perkataan/isi pidato pembicaraan maka Onderdistricthoofd (Asisten Demang) Bukittinggi melarang rapat diteruskan dan dibubarkan. Barangsiapa yang tidak mau meninggalkan rapat dipukuli oleh polisi yang tidak berpakaian dinas dengan pentung getah.⁵⁾

Pembubaran rapat dengan pemukulan pentung getah ini telah menjadi pembicaraan yang sengit dalam Volksraad di Batavia oleh dua orang anggotanya Teuku Nyak Arief dan Dt. Kayo. Oleh Procuruar dan Adviseur Decentralisasi di Batavia

meminta keterangan tentang kejadian tersebut kepada Gubernur Sumatra Barat dan Gubernur ini meminta pula informasi kepada Asisten Residen Agam Wi Groeneveldt.

Asisten Residen memberitahu kepada Gubernur rapat dibubarkan karena menurut timbangan Onderdistricthoofd Bukittinggi akan terjadi perkelahian kalau rapat diteruskan. Karena antara perkumpulan P.O.K.O.K. di satu pihak, dipihak lain ninik mamak dan Kepala Nagari yang telah menyetujui memperluas Gemeente Bukittinggi jika rapat diteruskan tidak boleh tidak akan terjadi perselisihan antara kedua kelompok tersebut.

Berdasarkan laporan Onderdistricthoofd yang dapat mengamankan daerahnya, Asisten Residen Groeneveldt memuji pula tindakan *Onderdistricthoofd*-nya.

Kesimpulan masalah tanah pasar dan kota Bukittinggi tidak ada penyelesaiannya. Pameo yang hidup di tengah masyarakat "*Sarupo Ulando* mintak tanah (seperti Belanda minta tanah) dari sedikit ke sedikit lama-lama semua tanah dikuasainya memang ada kebenarannya.

Demikianlah kota yang bermula dari benteng untuk mengalahkan kekuatan Padri kemudian berkembang menjadi pusat pengumpulan kopi, akhirnya menjadi pusat ekonomi, pendidikan dan pemerintahan di pedalaman Sumatra Barat. Namun dalam perkembangannya Bukittinggi tak pernah terlepas dari masalah yang paling penting, yaitu kedudukan dan pemilikan tanah. Hal ini, nanti di tahun 1950-an, akan menghambat pemekaran kota, yang akhirnya "memaksa" pemerintah harus memindahkan ibukota ke Padang.

Banyak peristiwa sosial, politik dan ekonomi yang mewarnai kehidupan kota ini, tetapi sampai dengan berakhirnya "peristiwa daerah" di tahun 1960-an, secara administratif luas kota Bukittinggi tidak mengalami perubahan. Sementara itu kota Bukittinggi, yang selama tahun-tahun 1930-an, merupakan pusat kegiatan politik di Sumatra Barat, di zaman pendu-

dukan Jepang (1942 – 1945) menjadi pusat pemerintahan sipil dan militer untuk seluruh Sumatra, terletak di daerah pegunungan di pedalaman, berada di tengah-tengah pulau Sumatra, serta cukup jauh dari daerah-daerah yang perlu dari sudut militer, adalah faktor-faktor alami yang tampaknya mempengaruhi pilihan tentara pendudukan Jepang ini.

Di samping transisi politik dan hal-hal yang bersifat sosial-ekonomis, tampaknya pertimbangan pada faktor-faktor alami ini juga mempengaruhi putusan untuk menjadikan Bukittinggi sebagai pusat perjuangan dalam Revolusi Kemerdekaan, hingga dikenal sebagai "Yogya ke-2".

Namun di saat tenang, masalah tanah dan hak tanah selalu menghantui.

CATATAN BELAKANG BAB III

1. B. Schrieke, *Indonesian Sociological Study* (Sumur Bandung, 1960), hal. 135.
 2. Wawancara dengan Rasjid Manggis, Bukittinggi 1 Oktober 1982.
 3. H. Mohammad Hadjrat, *Sedjarah Negeri Koerai V Djongrong*, (T.S. Ichwan, Bukittinggi, 1947), hal. 41.
 4. *Ibid*, hal. 43.
 5. Wawancara dengan Dt. Basa Balimo, Jorong Tigo Baleh Bukittinggi, 8 Oktober 1982.
-

B A B IV

PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL

1. Pendidikan di Sumatra Barat

Tahun 1825 sekolah pendidikan Barat yang pertama dibuka di Padang untuk anak-anak Kompeni. Pada tahun 1843 dibangun pula Sekolah Rendah untuk anak bumi putera di Bukittinggi, sebagai ibukota dari Keresidenan Padang Darat.¹⁾ Kemudian sekolah ini didirikan pada berbagai nagari di Padang Darat yang pada mulanya terletak di daerah pusat administrasi di dataran tinggi dan di pusat-pusat penghasil kopi. Sekolah itu dibiayai dan diawasi oleh masing-masing nagari. Pendidikan sekuler semacam ini berlangsung dari tahun 1840 sampai tahun 1860. Baru tahun 1870 pemerintah melaksanakan pembaharuan pendidikan.

Tujuan pokok dari pendidikan itu adalah melatih calon pegawai dan memberantas buta huruf. Ternyata pendidikan sekuler itu pada umumnya mendapat sambutan positif dari orang Minangkabau, terutama dari Bukittinggi dan nagari sekitarnya. Lebih khusus lagi, sambutan yang positif dan kreatif terhadap pendidikan Barat ini berasal dari nagari-nagari tertentu dan malahan dari keluarga-keluarga tertentu dalam nagari ini. Alasan kenapa daerah dan keluarga tertentu memperlihatkan minat yang lebih besar terhadap kesempatan baru itu, sementara nagari lainnya masih tetap bersifat apatis, adalah kombinasi dari kesempatan, variasi geografis dan sikap mental dari masyarakat tersebut. Kesempatan dan peranan baru yang terbuka di Bukittinggi itu betul-betul dimanfaatkan oleh desa-desa dan keluarga-keluarga tertentu dari Bukittinggi dan nagari sekitarnya.

Pada pergantian abad ke-19 jumlah orang Minangkabau yang ingin bekerja sebagai pegawai makin meningkat, sehingga

menimbulkan tekanan pada pemerintah untuk memperbanyak sekolah dan meningkatkan jumlah penerimaan murid.²⁾ Pernah pada tahun 1870 ini, murid dari Minangkabau yang tidak tertampung di Sumatra Barat mendaftarkan dirinya di sekolah yang berada di Aceh, melalui keluarga-keluarga mereka yang bekerja di sana. Bahkan kegiatan pendidikan yang berdasarkan Politik Etika di Sumatra Barat tidak dapat menampung keinginan masyarakat yang makin meningkat terhadap pendidikan sekuler. Namun di daerah Sumatra Barat Pemerintah cenderung untuk tidak menyalurkan kemajuan yang telah dicapai dengan tidak membuka sekolah-sekolah baru di daerah-daerah yang telah mencapai quotanya.³⁾ Pada tahun 1911 untuk seratus kursi yang tersedia pada sekolah Kelas I di Padang dan Bukittinggi, tercatat beribu-ribu calon yang mendaftar. Pemerintah tidak dapat menyediakan fasilitas yang diinginkan untuk memenuhi tuntutan yang meningkat terhadap pendidikan.⁴⁾ Sebagai jawabannya para terpelajar mendirikan sekolah swasta tanpa subsidi dari pemerintah. Pada tahun 1912 di Padang saja tercatat 23 buah sekolah swasta. Kita mengetahui di Bukittinggi juga ada sekolah swasta, namun kita belum memperoleh data mengenai jumlahnya. Pada waktu yang sama di Jawa dan Madura tercatat 53 sekolah swasta. Untuk menampung minat masyarakat Minangkabau terhadap pendidikan sekuler itu, surau pun ikut memberikan sahamnya, yaitu beberapa surau merubah lembaga pendidikan agama itu menjadi sekolah semi sekuler.⁵⁾

Dalam suasana inilah Sumatra Barat, khususnya Bukittinggi dan sekitarnya menjadi "daerah Islam", sebagaimana sumber Belanda mengatakan, yang paling "terdidik" dari sudut persentase penduduk yang bersekolah. Hal ini diukur dari perbandingan penduduk secara keseluruhan dengan mereka yang mengecap pendidikan. Di samping itu juga perbandingan persentase wanita yang bersekolah, dan akhirnya tinggi rendahnya angka *drop out*.

Tetapi kemajuan dalam bidang pendidikan ini tidaklah bisa dimengerti dengan baik kalau dua gejala lain tidak diperhatikan pula. Pertama, terjadinya spesialisasi lapangan kerja baru, yang menuntut latar belakang pendidikan yang sesuai, dan terbukanya kesempatan bagi mobilitas sosial yang vertikal. Makin jauhnya pengaruh politik-ekonomi, kolonial ternyata di samping merenggut kemerdekaan politik, tetapi juga menggoyahkan sistem pelapisan sosial selama kategori ras tidak terkena. Kedua, gerakan informasi Islam, atau lebih dikenal dengan julukan "Kaum Muda". Terdiri dari para ulama muda, gerakan ini mengadakan "pemurnian" dalam kehidupan agama dan menjadikan Islam sebagai ideologi dari perubahan sosial yang diusahakan. Di samping tabligh-tabligh, menerbitkan majalah dan buku-buku, serta mendirikan berbagai perkumpulan, usaha yang paling penting dari gerakan Kaum Muda ini ialah pembaharuan pendidikan agama dan pelebaran jaringan sekolah agama. Dengan kedua program ini gerakan Muda tidak saja memperkokoh hasrat pendidikan dan memberi tempat sekedarnya bagi mereka yang tidak diterima oleh sekolah pemerintah, tetapi juga menyediakan alternatif lain dalam orientasi pendidikan. Bukittinggi, di samping Padang Panjang, adalah salah satu pusat yang terpenting dalam lapangan ini.

2. Perkembangan Pendidikan Barat Masa Awal

Diperkenalkannya pendidikan Barat di pedalaman Sumatra Barat pada pertengahan abad 19, berkaitan dengan berkembangnya daerah tersebut sebagai penghasil kopi dan berdirinya pusat-pusat pengumpulan kopi pada beberapa tempat di pedalaman Sumatra Barat. Untuk menunjang kegiatan ekonomi ini, Belanda juga perlu memperkuat dan memperlancar administrasi pemerintahannya.

Pengembangan tanaman kopi dan administrasi pemerintahan Belanda tersebut memberi kesempatan profesi baru kepada orang Minangkabau yang pandai membaca menulis dalam

bahasa Melayu. Ternyata minat orang Minangkabau terhadap pekerjaan administrasi itu meningkat setelah mereka melihat bahwa pekerjaan tersebut memberi kekayaan, prestise dan wibawa tertentu pada mereka. Suatu hal yang mempermudah mereka terjun dalam kegiatan itu, karena bahasa Melayu dipakai Belanda sebagai bahasa resmi untuk administrasi dan diplomasi sejak zaman VOC, hampir bersamaan dengan bahasa mereka sendiri. Di samping itu keterlibatan orang Minangkabau dalam perdagangan di Indonesia, memudahkan mereka berkomunikasi dengan Belanda.⁶⁾

Walaupun demikian untuk pekerjaan itu diperlukan ke-trampilan dasar seperti membaca menulis dan berhitung. Pada mulanya mereka belajar secara privat sambil bekerja pada kantor perdagangan dan administrasi pemerintahan. Ternyata mereka ini memperlihatkan kesanggupan yang cukup menggemibirkan. Berbeda dengan kelompok ini, ternyata golongan bangsawan baik yang bekerja pada jaringan pemerintahan Belanda, maupun fungsionaris adat sedikit sekali memperlihatkan minat terhadap pendidikan sekuler, sebab kedudukan mereka secara umum telah dijamin oleh pemerintah tanpa memandang kualifikasi. Pada tahun 1843 di Bukittinggi sebagai ibukota Padang Darat dan pusat pengumpulan kopi yang terpenting didirikan sebuah sekolah rendah untuk penduduk bumi putera. Tujuan sekolah ini adalah untuk mengajarkan menulis membaca huruf latin dan berhitung. Fungsi utama sekolah itu ialah untuk melatih calon yang mungkin untuk jadi pegawai sipil.

Ide sekolah nagari direncanakan oleh Steinmetz sebagai model bagi sekolah-sekolah berikutnya sampai permulaan tahun 1870-an. Pada waktu itu pemerintah pusat memutuskan untuk menugaskan pengawasan pendidikan di Sumatra Barat kepada masing-masing nagari. Selama masa awal melalui putusan Balai Adat, didirikan sekolah nagari yang bertempat di Balai Adat dan Gudang Kopi. Sedangkan penduduk membuat meja dan alat lain yang dibutuhkan. Penduduk yang pandai

tulis-baca, biasanya kepala gudang, kerani dan pegawai pemerintahan, bertindak sebagai guru yang pertama. Gurunya dibayar dari keuangan nagari yang kemampuannya berbeda antara satu nagari dengan nagari yang lain. Di beberapa nagari penduduk berhasil mendesak Balai Adat untuk membeli perlengkapan sekolah, bahkan ada yang dapat menyediakan pakaian sebaik mungkin.⁷⁾ Pemerintah hanya melakukan pengawasan dan bimbingan seperlunya saja. Itupun tergantung kepada pejabat yang berwenang dalam pengawasan tersebut.

Oleh karena itu maju mundurnya sekolah tersebut sangat tergantung kepada dedikasi dan loyalitas Tuanku Laras dan Penghulu Kepala tempat sekolah nagari itu berdiri. Tuanku Laras Matur, terkenal sebagai Laras yang progresif terhadap pendidikan sekuler ini, sehingga ia menjadi pendorong masyarakatnya dalam pendidikan sekuler.

Begitu pula Koto Gadang di bawah pimpinan Larasnya (yang pernah pergi ke Negeri Belanda pada saat masih sedikit orang Indonesia ke sana), meletakkan dasar pendidikan sekuler di nagarnya, sehingga nagari ini menjadi nagari yang paling terdidik di Sumatra Barat. Sekolah nagari sebagai dasar bagi pendidikan sekuler di Sumatra Barat mempunyai kurikulum pokok yang dibagi atas 4 tingkat :

1. Di kelas 4 (kelas terendah) murid-murid mulai belajar membaca.
2. Di kelas 3 belajar menulis.
3. Di kelas 2 berhitung permulaan.
4. Di kelas 1 belajar mengarang, memegang buku (tata buku), geografi dan berhitung lanjutan.

Semua pengajaran diberikan dalam bahasa Melayu mulai dari tingkat rendah sampai kelas tertinggi. Ini mempermudah murid belajar karena bahasa Minangkabau hampir bersamaan dengan bahasa Melayu. Agama sebagai mata pelajaran dilarang secara khusus. Murid-murid secara eksplisit dilarang berpakaian Barat. Steinmetz sangat sensitif terhadap perasaan takut yang

diungkapkan oleh penduduk desa Minangkabau bahwa sekolah sekuler itu bermaksud menjadikan anak mereka menjadi Kristen dan akan dijadikan tentara Hindia Belanda. Keadaan ini menyebabkan orang tua di berbagai nagari melarang anaknya untuk mengikuti pelajaran di sekolah nagari. Dalam tahun 1845 Kontrolleur Rao melaporkan bahwa sejumlah ibu-ibu di daerahnya tetap melarang anak-anaknya masuk sekolah nagari karena akan dijadikan serdadu. Di Minangkabau sampai pecahnya perang dunia ke II menjadi serdadu, polisi (opas) Belanda dianggap sebagai pekerjaan yang kurang terhormat. Sepanjang sejarah sekolah nagari, perasaan cemas yang bersumber dari kebudayaan dan agama terhadap sekolah sekuler cenderung diutarakan oleh kebanyakan penduduk desa di mana terdapat sekolah tersebut, sedangkan rakyat yang tidak berminat dalam pendidikan sekuler mengusahakan cara yang lain.

Berbeda dari daerah-daerah lain, Bukittinggi dan sekitarnya menganggap sekolah nagari sebagai suatu kesempatan bekerja dalam birokrasi penjajahan Belanda. Di Padang Darat pada tahun 1846 sekolah nagari berhasil melepas 75 orang muridnya dan ditugaskan sebagai pegawai pemerintah dan di kantor-kantor kelurahan atau menjadi pengawas pada tanaman kopi. Kebanyakan dari mereka mungkin telah menerima pendidikan di Surau, di mana murid-muridnya belajar tulisan Arab, yang juga mereka gunakan untuk menulis teks bahasa Melayu. Selama masa awal pemerintahan Belanda di Sumatra, dokumen pemerintah yang perlu disebar luaskan ditranskripsi ke dalam tulisan Arab. Bahkan sampai pecah perang dunia ke II masih banyak pedagang menengah mempergunakan tulisan Arab untuk keperluan administrasi perdagangan mereka. Sikap positif Bukittinggi dan nagari-nagari sekitarnya (terutama daerah minus) terhadap sekolah sekuler itu ada hubungannya dengan tekanan geografis, faktor demografis dan peranan yang dimungkinkan oleh pendidikan tersebut. Nagari-nagari sekitar Bukittinggi seperti Sianok, Koto Gadang, Banuhampu dan Sungai Puar relatif adalah daerah-daerah minus. Pertambahan

penduduk dan tekanan ekonomi di daerah-daerah tersebut menyebabkan mereka pergi ke Bukittinggi baik sebagai pedagang, tukang dan penjual jasa lainnya. Sementara itu Bukittinggi berkembang dari Kota Benteng (Fort de Kock) ke kota pusat pengumpulan kopi, pusat administrasi pemerintah dan perdagangan yang sangat penting di daerah pedalaman Sumatra Barat. Perkembangan kota Bukittinggi tersebut memberi beberapa peranan baru bagi pendatang itu yang mempunyai arti ekonomis bagi mereka. Mereka inilah yang berkembang sebagai golongan menengah di kota itu baik sebagai pedagang maupun pengusaha dan kerani pada kantor-kantor dagang Belanda. Golongan menengah ini berminat terhadap sekolah nagari, karena dapat membantu pekerjaan mereka sebagai pedagang, pengusaha, kerani dan lain-lain. Bagi keluarga-keluarga golongan menengah kelas terendah, sekolah nagari membuka kesempatan menjadi pegawai rendah pada kantor-kantor pemerintah.

Sebagai ilustrasi dapat kita lihat latar belakang orang tua murid sekolah nagari Bukittinggi pada tahun 1860-an sebagai berikut:

1. 15% pedagang dan pengusaha swasta
2. 13% tukang
3. 7% petani, pemilik tanah yang luas
4. 16% penghulu
5. 7% bangsawan (penguasa adat)
6. 4% ulama
7. 18% pimpinan pemerintahan
8. 7% pegawai-pegawai pemerintah tingkat menengah
9. 1% juru tulis (pegawai rendah)
10. 2% pegawai pengawas.

Dari ilustrasi di atas juga terlihat bahwa penghulu nagari sekitar Bukittinggi (kecuali Kurai) mempunyai respon positif terhadap sekolah sekuler. Lain halnya dengan penghulu Padang. Sekolah nagari yang didirikan di Padang pada tahun

1825 terpaksa ditutup tahun 1826, karena penghulu menuduh sekolah itu mengkristenkan anak mereka, karena tuan Evan, guru sekolah itu melarang seorang muridnya mengaji di sekolah. Baru pada tahun 1853 sekolah nagari dibuka kembali di Padang.⁸⁾

Petunjuk pertama keberhasilan pendidikan sekuler itu dijumpai dalam laporan Gubernur Van Swietten. Ia melaporkan bahwa kebutuhan birokrasi yang makin meluas sejak tahun 1847 telah dapat diisi oleh orang Minangkabau yang pandai membaca dan menulis. Tanpa kerja keras, semua jabatan yang perlu diisi terpenuhi dengan baik. Sedangkan politik pemerintah Belanda tidak memimpin pendidikan sekuler secara intensif bahkan tidak sama sekali untuk pendidikan kepegawaian. Dari tahun 1840 sampai tahun 1860 pemerintah kurang memperhatikan pendidikan sekuler di Minangkabau. Pada masa ini inisiatif Tuanku Laras dan penghulu sangat menentukan maju mundurnya sekolah nagari, karena pembiayaan dan pengelolaan secara langsung di tangannya. Di samping itu sebagai pimpinan tradisional ia mempunyai ikatan solidaritas yang tinggi dengan orang yang dipimpinnya. Dalam ungkapan pepatah adat dikatakan "sehina — semalu". Begitu pula dalam pelaksanaan tugas nagari umum berlaku hukum yang mengatakan, "ringan sama dijinjing, berat sama dipikul". Antara penghulu dan anak buahnya ada ikatan adat dan geneologis yang memungkinkan suatu suku atau nagari mempunyai integritas yang kukuh dan kuat.

Belanda menganggap bahwa pendirian dari sekolah-sekolah nagari itu sebagai suatu keberhasilan karena memudahkan pemerintah memperoleh pegawai-pegawai rendah untuk dipekerjakan pada kantor-kantor pemerintah. Perkembangan sekolah nagari itu memang pesat. Pada tahun 1856 Padang Darat saja tercatat 66 *enrolmen* murid sekolah nagari. Setahun berikutnya tahun 1857 meningkat menjadi 145 calon murid yang mendaftar di sekolah-sekolah tersebut. Ini berarti kebutuhan

akan guru meningkat pula. Pemerintahan Belanda yang telah mengetahui akan peningkatan jumlah anak-anak yang akan masuk sekolah nagari untuk tahun-tahun mendatang pada tanggal 1 April 1856, didirikan Sekolah Normal (Belanda menamakannya Kweekschool) di Bukittinggi. Dalam tahun 1870-an administrasi pemerintahan menjadi lebih modern. Maka sarat-sarat objektif dan ketrampilan yang lebih tinggi dituntut untuk menjadi pegawai pemerintahan Belanda. Di samping itu perluasan daerah kekuasaan Belanda di Indonesia membuka kesempatan yang lebih banyak bagi rakyat. Menghadapi pertumbuhan yang demikian baik orang Minangkabau, maupun orang Belanda sama-sama menyadari bahwa sekolah nagari tidaklah memberi pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh pembaharuan yang tengah berlangsung. Hal ini juga menyebabkan kurangnya penilaian orang terhadap sekolah nagari. Namun keadaan keuangan yang serba kekurangan pada kebanyakan sekolah nagari menambah berkurangnya prestise sekolah itu. Guru-guru yang sering mengalami kesulitan keuangan, lebih suka bekerja sebagai pegawai pada kantor pemerintah daripada jadi guru.

Perbaikan mutu pendidikan di Minangkabau baru dimulai pada tahun 1870-an dengan memakai dana pemerintah untuk sekolah nagari dan menyusun kembali *Normal School* di Bukittinggi sebagai lembaga pendidikan yang terbaik di Hindia Belanda.⁹⁾ Masyarakat Minangkabau terutama penduduk kota mulai menaruh minat baru terhadap sekolah itu, karena secara nyata membuka kesempatan baik untuk bekerja pada pemerintah dan masyarakat. Sekolah-sekolah dasar pemerintah yang baru itu telah mempunyai kurikulum yang standard dan telah mulai memberi "pendidikan" dari pada sekedar "latihan" saja. Penghargaan rakyat dari berbagai golongan masyarakat mulai tumbuh terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah secara sungguh-sungguh.

Untuk kepentingan Sekolah Normal, maka Asisten Residen Van Ophuizen dari Solok dipindahkan ke Bukittinggi untuk bertindak sebagai pengawas lembaga itu dan kurikulumnya. Ia dipilih karena menurut Gubernur, ia telah memperlihatkan minat dan kemampuan yang khusus dalam pendidikan Melayu. Pelaksana harian Sekolah Normal berada di bawah seorang kepala sekolah yang bernama Abdul Latif, saudara dari Jaksa Kepala di Keresidenan Padang Darat. Penunjukan Abdul Latif berdasarkan pengaruh politik daripada kemampuan paedagogis. Calon siswanya tidak perlu tamatan sekolah nagari, tetapi mereka yang telah berumur paling kurang 14 tahun dan telah memperoleh ketrampilan membaca dan menulis dalam bahasa Melayu dan ilmu berhitung permulaan. Kurikulum yang 3 tahun itu meliputi: membaca dan menulis dalam bahasa Melayu (tulisan Arab dan Latin), geographi, tata buku, surat menyurat perkantoran dan membuat laporan resmi. Program pelajaran akan menyiapkan siswa untuk mengajar di sekolah nagari dan untuk melatih siswa menjadi pegawai dan pemimpin yang kompeten. Gaji guru, perlengkapan dan uang saku siswa ditanggung oleh pemerintah. Kewajiban guru bukan hanya mengajar tetapi juga mengawasi tingkah laku murid setiap hari, pakaian dan kesehatan siswa di luar kelas. Asisten Residen diperintahkan mengawasinya secara hati-hati dan memeriksa pelaksanaan tugas guru.

Kelompok siswa yang terbesar berasal dari nagari-nagari sekitar Bukittinggi dan sebagian kecil berasal dari Tanah Datar Solok dan Padang. Sejumlah siswanya berasal dari keluarga bangsawan tetapi mereka ini tidak selalu mayoritas, sejumlah besar dari keluarga pedagang dan selebihnya anak-anak dari tukang, klerk dan yang lain-lain. Menjelang tahun 1863, 9 buah Sekolah Nagari di Padang Darat menerima guru yang telah selesai pendidikan *Normal School* dan dua orang tamatan *Normal School* ditugaskan mengajar di Bengkulu. Kemudian tersebar pula tenaga guru orang Minangkabau pada beberapa tempat di Sumatra. Dalam tahun 1860, sepuluh orang jatah

murid untuk Sumatra Barat, 5 orang dari Padang Darat, 2 orang dari Tapanuli, seorang dari Padang, seorang dari Pariaman, seorang dari Rao. Walaupun demikian *enrolmen* selanjutnya kebanyakan berasal dari Padang Darat. Ternyata sebagian besar calon siswa tersebut datang dari daerah-daerah dekat Bukittinggi. Menurut suatu laporan, hal ini terjadi karena sekretaris kepala pada kantor Keresidenan Padang Darat, seorang berasal dari dekat Bukittinggi, mempergunakan kedudukannya untuk memasukkan keluarganya.

Yang sangat menarik pada pendidikan Normal School itu ialah di samping menjadi guru, mereka juga dapat menjadi pegawai sipil, terutama sebagai supervisor tanaman kopi, sekretaris dan kepala gudang. Selama dekade pertama dari kegiatannya, lembaga itu telah menerima 49 orang murid, tetapi dari 28 orang tamatannya, hanya 12 orang yang menjadi guru. Ternyata mengajar bukanlah suatu kedudukan yang tinggi. Dua puluh orang dari tamatan Sekolah Normal mengambil kedudukan bukan guru. Gubernur percaya bahwa orang Minangkabau yang dapat membaca dan menulis cukup baik sebagai guru tetapi orang Minangkabau yang berpendidikan lebih baik seharusnya diterima sebagai pegawai atau asisten pada administrator Belanda.

Tidak mengherankan bahwa siswa yang tamat sekolah guru itu akan memperoleh kemajuan yang penting dalam kompetisi untuk menjadi kepala gudang, jaksa dan kedudukan-kedudukan lainnya dalam kepegawaian sipil. Dalam pandangan orang Minangkabau, Sekolah Normal mempunyai daya tarik yang hebat karena murid-murid dibayar oleh pemerintah untuk belajar di sana. Keluarga tidak perlu mengeluarkan uang untuk belajar di sekolah itu. Ketika sekolah nagari mulai berkurang muridnya karena melihat tidak terdapat kemajuan yang besar dalam sekolah yang mereka usahakan, maka Sekolah Normal dikerumuni oleh calon-calon siswa sepanjang tahun. Tekanan dari calon-calon siswa ini berasalkan dari nagari-nagari sekitar Bukittinggi, terutama dari Koto Gadang.¹⁰⁾

Sekolah nagari di Bukittinggi adalah sekolah yang paling baik di Padang Darat, sehingga anak-anak dari daerah itu memperoleh persiapan yang baik untuk pendidikan lanjutan dari sekolah-sekolah nagari yang lain di Padang Darat.

Latar belakang orang tua murid Sekolah Normal Bukittinggi adalah sebagai berikut:

- a. 32% berasal dari anak pedagang dan pengusaha swasta
- b. 2% anak tukang
- c. 12% anak penghulu
- d. 17% anak golongan fungsionaris adat (di luar penghulu)
- e. 2% anak ulama
- f. 31% anak pejabat pemerintah
- g. 3% anak pegawai menengah pemerintah.

Mengenai anak penghulu, tidak selalu anak penghulu tersebut, tetapi mungkin kemenakannya atau kaumnya. Bahkan sering kemenakan bertali adat yang dimasukkan penghulu. Begitu pula pegawai pemerintah, tidak selalu anaknya yang dimasukkan ke Sekolah Normal, sering juga kemenakannya atau anggota keluarga kaumnya. Hal ini tak dapat dihindarkan karena struktur masyarakat Minangkabau menghendaki seorang laki-laki itu tidak saja bertanggung jawab terhadap anaknya, tetapi juga terhadap kemenakan dan orang kampung. Keberhasilan seorang laki-laki Minangkabau mengharuskannya mendistribusikan keberhasilannya kepada sanak keluarga dan orang kampungnya karena ia dianggap milik bersama kaumnya. Penghulu yang mempunyai tanah luas dan subur dengan jabatan yang terjamin dari pemerintah sering tidak menghargai sekolah sekuler maka sering jatahnya di Sekolah Normal diberikan kepada anak buahnya yang mempunyai anak yang cerdas otaknya. Siswa yang dididik di Sekolah Normal Bukittinggi bukan dari Sumatra Barat saja tetapi juga berasal dari daerah Bengkulu, Lampung, Riau, Bangka, Belitung dan Aceh. Jumlah murid yang terbesar berasal dari Sumatra Barat dan yang terkecil adalah Aceh dan Bangka. Antara tahun 1877-

1882 murid-murid yang berasal dari Sumatra Barat 59 orang, sedangkan dari Aceh hanya seorang.

Dalam rangka memperbaiki mutu sekolah nagari, maka sekolah tersebut dijadikan sekolah pemerintah. Karena itu yang jadi gurunya haruslah tamatan Sekolah Normal. Untuk itu Sekolah Normal juga ditingkatkan mutunya. Berdasarkan "peraturan baru", yang dikeluarkan di Batavia dalam bulan Desember 1872, kepala sekolah dan wakil kepala Sekolah Normal adalah orang Belanda, sedangkan pembantu wakil kepala sekolah adalah orang Minangkabau. Orang Minangkabau yang lainnya sebagai guru. Kepala Sekolah Normal dulunya ialah Chalik Labih. Prestise Sekolah Normal menyebabkan sekolah itu menjadi idaman orang banyak. Peningkatan uang saku dalam sistem baru ini menyebabkan *enrolmennya* menanjak. Untuk siswa kelas rendah menerima f. 12,—sebulan untuk kelas yang lebih tinggi f. 15,— (lima belas gulden) sebulan. Sedangkan kepala nagari hanya menerima f. 20,—sebulan.¹¹⁾

Sekolah Normal menjadi terkenal sebagai "Sekolah Raja", untuk membedakannya dari Sekolah Normal sebelum tahun 1872. Pelajar-pelajarnya juga menjaga prestise yang dipunyai oleh sekolahnya. Mereka berpakaian bagus menurut mode Eropa. Pada jam-jam istirahat, dengan bangga pelajar-pelajar Sekolah Raja itu menjalani jalan-jalan kota Bukit tinggi. Masyarakat mengenal mereka dengan baik. Seorang alumni Sekolah Raja yang bernama Rasyid Manggis menceritakan bahwa ketika ia dibawa oleh orang tuanya ke Pasar Bukit tinggi sangat kagum melihat pelajar-pelajar Sekolah Raja itu. Sehingga saat itu menjadi idamannya untuk menjadi pelajar Sekolah Raja, walaupun lingkungannya kurang mendukung memasuki sekolah itu.¹²⁾ Tambahan lagi mereka mempelajari berbagai mata pelajaran yang direncanakan untuk menghasilkan guru-guru yang berkemampuan dan terlatih yang dapat menjalankan tugas dengan baik. Seorang peninjau Barat memberi komentar bahwa:

"the effect of all this privilege was sure to produce dandified Minangkabau who fashioned themselves after the outward aspect of European culture with very little understanding of its inner values."

Komentar ini tidak semuanya benar, karena banyak dari alumni Sekolah Raja menjadi tokoh kebudayaan masyarakat Minangkabau. Rasyid Manggis berasal dari keluarga Kurai yang kurang berminat terhadap pendidikan Barat. Karena desakan yang kuat dari orang tuanya, ia dimasukkan juga ke Sekolah Raja tersebut. Setelah itu ia sempat melanjutkan pelajarannya ke negeri Belanda dan berkelana di berbagai negara di Eropa. Walaupun ia sangat mengenal kebudayaan Barat, namun ia adalah ahli adat Minangkabau yang diakui di Sumatra Barat. Bidang kesusasteraan dan sejarah Minangkabau pun menjadi perhatiannya. Ia hidup menurut nilai kebudayaan Minangkabau yang ia yakini bernilai tinggi.

Walaupun jumlahnya tidak berarti, namun ini membuka kesempatan baru bagi anak-anak Minangkabau. Lama kelamaan masyarakat Minangkabau akan berintegrasi dengan masyarakat kolonial Hindia Belanda yang lebih luas. Setelah tahun 1870 mengajar merupakan tugas yang lebih berprestise dan gaji yang diterimanya lebih besar.

Sekolah nagari yang diperbaharui oleh pemerintah diberi nama sekolah rendah (*Volksschool*). Dalam teori sekolah rendah pemerintah sesudah tahun 1871 dilaksanakan secara intensif dan pendidikan yang standar. Perobahan yang mungkin terjadi mungkin tidak semuanya cepat atau intensif, sebab pemerintah mulai membeda-bedakan sekolah nagari dan bahkan *enrolmennya* pun dipersempit. Keputusan pemerintah tahun 1871, membedakan sekolah rendah yang dikelola oleh pemerintah dan sekolah rendah yang dilaksanakan atas inisiatif nagari.

Selanjutnya dinyatakan bahwa secara khusus bahwa pendidikan terutama untuk anak-anak dari pemimpin masyarakat, walaupun anak-anak yang lain tidak dilarang secara khusus

untuk diterima. Kemudian dalam tahun 1873, pemerintah hanya mengakui sembilan sekolah nagari sebagai sekolah rendah pemerintah yang pertama seperti: Talu, Rao, Bukittinggi, Batu Sangkar, Solok, Payakumbuh dan Pariaman. Baru tahun 1882 sekolah nagari yang lain diakui pemerintah sebagai sekolah umum.¹³⁾

Latar belakang keluarga murid-murid sekolah tersebut adalah:

- a. pegawai/bangsawan
- b. pedagang/pengusaha
- c. petani.

Van Leinburg Brouwer, Inspektur pendidikan mengatakan bahwa murid dari daerah dataran tinggi kebanyakan dari anak tokoh masyarakat dan anggota masyarakat yang kaya, namun di daerah pantai kebanyakan anak-anak pedagang. Walaupun keluarga-keluarga pedagang dari dataran tinggi telah merantau namun tokoh-tokoh masyarakat daerah itu tanpa Belanda, terus membangun sekolah-sekolah yang berhasil atas inisiatif mereka sendiri. Ini adalah suatu kenyataan yang mencengangkan sejumlah pegawai Belanda yang percaya bahwa "pengembangan pendidikan rakyat adalah masalah sepanjang abad".¹⁴⁾

Kemajuan pendidikan di Sumatra Barat selama akhir abad XX berlangsung terus. Pada tahun 1892 pemerintah membagi sekolah rendah pemerintah menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Sekolah kelas I untuk anak bangsawan, tokoh-tokoh masyarakat dan orang kaya.
2. Sekolah kelas II untuk rakyat umum.

Gagasan ini kelihatannya merupakan langkah maju dalam pendidikannya. Tetapi dalam kenyataannya pembaharuan ini menimbulkan efek yang berlawanan. Peraturan pembaharuan itu merencanakan bahwa sekolah kelas II terdiri dari 3 jenjang pendidikan dan pelajaran yang diberikan haruslah yang berhubungan dengan kehidupan desa. Sedangkan sekolah rendah

yang telah ada mempunyai 5 jenjang (tingkat) yang menolong siswanya lepas dari kehidupan desa. Jika rakyat umum menginginkan anak-anaknya akan pendidikan yang sesuai dengan kehidupan desa, maka mereka akan memilih "Surau" bukan sekolah rendah. Begitu pula rencana sekolah kelas I kurang mendapat sambutan dari pemimpin-pemimpin tradisional daerah. Anak-anak mereka jarang memasuki sekolah, kalau mereka bersekolah juga maka mereka akan masuk Sekolah Rendah Desa yang bahasa pengantarnya bahasa Melayu.¹⁵) Sebagai akibatnya ialah sekolah-sekolah yang berstatus tinggi itu akan dipenuhi oleh anak-anak golongan menengah (pedagang) yang menginginkan sistim pendidikan yang lebih baik. Keinginan pemerintah Belanda untuk membentuk suatu kelompok elite dari kaum bangsawan bumi putera nampaknya mengalami kegagalan. Motivasi mereka kurang terhadap pendidikan sekuler dibandingkan golongan menengah. Golongan terakhir ini selalu mendesak pemerintah untuk perluasan dan peningkatan mutu pendidikan serta pendidikan lanjutan.

Ketika Belanda mendirikan STOVIA di Betawi (School Tot Opleiding Van Indische Artsen) tahun 1851, maka pendidikan lanjutan inipun jadi sasaran orang Minangkabau. Sejumlah orang Minangkabau telah belajar di lembaga itu sejak masa awalnya. Pada tahun 1856 telah ada 2 orang putra Minangkabau dididik di lembaga itu. Pada tahun 1898 STOVIA mengalami pembaharuan dalam rangka peningkatan mutunya. Tamatannya diwisuda sebagai dokter bukan tenaga medis. Tamatan sering disebut sebagai "Dokter Jawa". Setelah tahun 1900, jumlah orang Minangkabau meningkat secara dramatis belajar di sekolah Dokter Jawa. Antara tahun 1874 – 1900 hanya 7 orang Minangkabau yang belajar di STOVIA. Tetapi antara tahun 1900 – 1914 tercatat paling kurang 36 orang Minangkabau dari 200 mahasiswa yang belajar di sana. Tamatan sekolah itu dipanggil "Angku Dokter" oleh orang Minangkabau. Tamatan ini dianggap bernilai tinggi di samping jabatan guru dan Laras (Angku Guru, Angku Laras). Keluarga yang ter-

didik dan melek huruf menaruh perhatian yang khusus terhadap profesi dokter. Mereka ini meliputi pegawai sipil dan pedagang-pedagang. Bahkan pada waktu yang sama keluarga-keluarga kaya dan tokoh-tokoh masyarakat tradisional yang selama ini tidak begitu tertarik kepada pendidikan profesi mulai mempertimbangkan STOVIA sebagai lembaga pendidikan yang bermanfaat bagi karir anak-anak mereka.

Lembaga pendidikan profesional yang lain yang menarik perhatian orang Minangkabau ialah OSVIA (Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenar). Lembaga ini direncanakan secara khusus untuk melatih pegawai sipil bumi putera. Sekolah ini didirikan pada pergantian abad 20, di Bukittinggi. Sebelum ini ambtenar Minangkabau telah dilatih di Sekolah Raja. Seperti yang telah diketahui, banyak tamatan sekolah raja yang bekerja sebagai pegawai administrasi di samping sebagai guru.

Belanda mengharapkan Laras mengirim anak kemenakannya untuk dididik di sekolah itu untuk menjadi pemimpin pemerintah daerah (distrik). Tetapi yang terjadi bukan demikian. Kebanyakan murid-murid OSVIA adalah anak-anak pedagang, guru dan pegawai sipil. Tidak satupun kemenakan Laras yang belajar di sekolah itu. Hanya kira-kira 4 orang anak Laras yang belajar di lembaga tersebut. Siswa-siswa Minangkabau yang berbakat banyak pula melanjutkan studinya di Jawa pada OSVIA. Setelah tahun 1914 minat untuk dididik sebagai ambtenar meningkat ketika administrasi pemerintahan di Sumatra Barat tidak lagi berdasarkan keluarga bangsawan dan pemimpin tradisional, tetapi berdasarkan "a merit civil service" (perbaikan pelayanan umum). Jabatan Demang dan kepala nagari digantikan oleh Demang dan Asisten Demang, yang pada umumnya memperoleh kedudukan karena pendidikan dan keahliannya.

Peningkatan minat orang Minangkabau terhadap pendidikan Barat menjelang akhir abad 19 menimbulkan masalah lain dalam masyarakat. Pada pergantian abad 19, sekolah di

Sumatra Barat mulai menghasilkan lebih banyak orang-orang yang terdidik, sehingga administrasi pemerintahan yang berlangsung tidak dapat menampungnya. Situasinya menyebabkan tumbuhnya sekolah-sekolah sekuler swasta, yang dibuka oleh tamatan sekolah sekuler pemerintah yang tidak dapat pekerjaan. Menjelang tahun 1910 jumlah sekolah swasta di Sumatra Barat hampir separoh sekolah swasta sekuler yang ada di seluruh pulau Jawa.¹⁶⁾ Jumlah orang Minangkabau yang tertarik pada pendidikan Barat berkembang secara geometris menurut kelompok keluarga besar. Seorang laki-laki yang terdidik dapat mendorong dan membantu kemenakannya, anaknya, anak kaum dan sukunya serta orang kampungnya untuk memasuki sekolah sekuler Barat. Bahkan nagari Koto Gadang pernah mengirim mahasiswanya belajar ke Negeri Belanda dengan iuran masyarakatnya. Mereka merasa mempunyai kewajiban moral untuk memajukan pendidikan anak nagarinya sendiri.

Di samping Koto Gadang masih ada beberapa desa kecil di sekeliling Bukittinggi yang menjadi pusat utama golongan elite yang berpendidikan sekuler. Pada umumnya murid-murid desa itu berjalan kaki melintasi bukit dan lembah untuk pergi ke sekolah di Bukittinggi yang jaraknya relatif jauh untuk ditempuh anak sekolah. Oleh karena itu Koto Gadang dengan "dana nagari" melatih guru dan mendirikan sekolah desa mereka sendiri. Di samping itu ada juga di antara murid itu yang menumpang pada keluarga mereka yang menetap di Bukittinggi sebagai pedagang, tukang dan lain-lain.

Koto Tuo sebuah desa di kaki Gunung Singgalang dekat Bukittinggi yang dikenal sebagai nagari pedagang berkembang pula sebagai keluarga yang berpendidikan sekuler. Dalam satu generasi suatu keluarga pedagang mendidik anaknya menjadi guru dan pegawai sipil pemerintah. Umpamanya yang satu keluarga pedagang Koto Tuo yang mempunyai 4 orang anak laki-laki yang kemudian dengan melalui pendidikan sekuler, 2

orang menjadi guru, seorang menjadi Asisten Demang dan seorang lagi sebagai pegawai di tambang batu bara Sawah Lunto. Dokter yang pertama dari Koto Tuo adalah anak dari keluarga pedagang kaya.¹⁷⁾

Kemajuan pendidikan sekuler di Minangkabau makin kuat arusnya setelah pengembangan daerah-daerah di luar Jawa sebagai daerah onderneming, pertambangan, perdagangan, pemerintahan dan jaringan transportasi darat dan laut selama dekade pertama abad 20. Perkembangan ini diimbangi pula oleh pendiri berbagai jenis sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Sekolah yang baru ini di samping memberikan ketrampilan-ketrampilan tertentu juga dijadikan sebagai sarana pengembangan kebudayaan Barat terhadap penduduk Bumi putera. Bahasa Belanda menjadi pelajaran yang penting di sekolah tersebut. Kesanggupan berbahasa Belanda kadang-kadang merupakan syarat penting untuk melanjutkan pelajaran atau mendapatkan pekerjaan tertentu.

Pada tahun 1914 didirikan H.I.S. (Hollandsche Inlandsche School) di Bukittinggi. Pendidikan sekolah ini berlangsung selama 7 tahun dan kurikulum serta diplamanya diakui sama dengan Sekolah Rendah Eropa. Permintaan untuk belajar di H.I.S. selalu meningkat, namun tidak semua keluarga dapat mendaftarkan diri di sekolah ini. Kedudukan, jabatan dan kekayaan menjadi kriteria penting terhadap *enrolmennya*.

Kemudian diadakan pula sekolah khusus untuk anak orang Barat yang dinamakan E.L.S. (Europeesche Lagere School). *Enrolmen* dari E.L.S. adalah anak-anak orang Belanda, namun anak pegawai sipil bumi putera yang berpangkat tinggi dapat juga masuk sekolah ini. Masa belajar selama 7 tahun dengan jenjang kependidikan dari kelas I sebagai kelas terendah sampai kelas 7 sebagai kelas yang tertinggi.

Sementara itu sekolah rendah umum mengalami penataan kembali menjadi Sekolah Desa yang biasanya terdapat di tiap tiap kampung. Masa belajar sekolah ini selama 3 tahun dan

bahasa pengantarnya sering dipergunakan bahasa Minangkabau dan bahasa Indonesia. Pada tiap-tiap kenagarian terdapat pula Sekolah Gouvernement dengan masa belajar 5 tahun. Di sekolah ini bahasa pengantarnya bahasa Indonesia.

Menjelang akhir dekade kedua abad 20 didirikan pula Sekolah Menengah Pertama (M.U.L.O.). Karena tidak adanya Sekolah Menengah Atas (A.M.S.) dan sekolah tinggi di Sumatra Barat, maka banyak pemuda-pemudanya keluar daerahnya untuk melanjutkan studinya. Gerak keluar daerah ini didukung oleh tradisi merantau masyarakat Minangkabau. Merantau mendorong orang Minangkabau untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan mencari pengetahuan atau pendidikan sendiri menjadi salah satu tujuan merantau. Perkembangan pendidikan sekuler yang menonjol di Sumatra Barat menyebabkan orang Minangkabau memegang jabatan dalam berbagai bidang pemerintahan pada berbagai tempat di Sumatra. Kesulitan untuk masuk sekolah sekuler di Bukittinggi menyebabkan keluarga di Bukittinggi dan sekitarnya mengirim anak mereka belajar di luar daerahnya di mana tidak terdapat persaingan yang tajam untuk masuk sekolah. Dalam suatu laporan inspektur pendidikan tahun 1909, menyatakan bahwa banyak terdapat siswa orang Minangkabau, kebanyakan berasal dari Koto Gadang belajar di sekolah pemerintah di Aceh. Orang Koto Gadang dan orang Minangkabau yang lainnya yang bertugas di Aceh membawa anak-anaknya dan anak saudaranya ke daerah tersebut. Mereka ini bukan anak-anak pegawai saja tetapi juga anak-anak pedagang penting yang mempunyai hubungan rapat dengan pegawai sipil pemerintahan Belanda.¹⁸⁾

Dalam abad 19 Koto Gadang telah mengirim anak mereka untuk belajar di sekolah dokter Jawa walaupun jumlahnya belum banyak. Antara tahun 1900 – 1910, telah ada 2 orang mahasiswa Koto Gadang yang menamatkan studinya di sekolah tersebut. Dalam dekade berikutnya 11 orang Koto Gadang menyelesaikan pelajarannya di STOVIA, dan beberapa tahun

sebelum Perang Dunia I 27 orang lagi tamat STOVIA. Kelihatannya pendidikan sekuler menjadi sasaran utama Koto Gadang untuk menjadi elite birokrat. Lain halnya dengan Matur, di daerah ini di samping jadi pegawai sipil sasaran lain adalah jadi guru.¹⁹⁾

Sayangnya kita tidak memperoleh angka yang pasti tentang itu. Dalam tahun 1920 setiap keluarga di Matur paling kurang seorang yang menjadi guru. Seorang penghulu yang mempunyai 4 orang anak laki-laki semuanya tamatan Sekolah Raja. Setelah masa itu minat orang Matur mulai berkurang terhadap profesi guru. Hal ini disebabkan adanya berbagai jenis pekerjaan pada pemerintah sedangkan tamatan guru sering hanya menjadi guru swasta. Di nagari sekitar Bukittinggi karena masyarakatnya banyak yang menjadi pedagang, maka pelopor untuk mendorong pendidikan sekuler adalah pedagang-pedagang itu sendiri. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa dua orang Sianok yang mula-mula menjadi dokter berasal dari keluarga pedagang. Perlu kita ketahui bahwa rakyat dari nagari sekitar Bukittinggi yang telah berhasil pada pendidikan sekuler dan mempunyai jabatan pada berbagai instansi di Bukittinggi menetap di kota tersebut. Begitu pula pedagang dari Sianok, Koto Tuo, IV Koto dan lain-lain nagari di sekitar Bukittinggi juga bermukim di kota Bukittinggi. Dapat dikatakan mereka inilah yang telah hidup sebagai penduduk kota dan mereka pulalah yang mendominasi kehidupan sosial kota Bukittinggi. Keberhasilan mereka sebagai pedagang merupakan jenjang bagi kemajuan anak-anak mereka dalam pendidikan Barat. Perlu kita ketahui kebanyakan pedagang tersebut di nagari asalnya termasuk keluarga bangsawan pula. Dapat dikatakan bahwa perkembangan pendidikan Barat di Bukittinggi telah melahirkan sekelompok intelektual barat dan pedagang menengah yang kebanyakan berasal dari keluarga bangsawan dan pedagang. Kelompok mereka inilah yang menjadi pendorong ke arah perubahan sosial yang tengah berlangsung. Usaha mereka itu nampaknya mendapat sambutan dari masya-

rakatnya sendiri, karena dari sejak mula sudah sadar bahwa pembaharuan dan pembangunan itu memang perlu bagi peningkatan kesejahteraan sosial.

3. Pendidikan dan Perobahan Sosial

Pendidikan Barat yang diperkenalkan di Bukittinggi semenjak pertengahan abad 19 pada permulaan abad 20 telah menimbulkan perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Bukittinggi. Masyarakat Bukittinggi yang kita maksud adalah penduduk yang menetap di Bukittinggi karena berbagai macam tujuan. Kelompok yang pertama yang terbesar jumlahnya ialah penduduk asli daerah Bukittinggi yang disebut orang Kurai. Kelompok kedua adalah pendatang-pendatang yang berasal dari nagari-nagari sekitar Bukittinggi. Kelompok ketiga adalah orang Belanda yang bertugas pada berbagai bidang pemerintahan. Kelompok keempat adalah orang Cina dan Timur Asing yang menetap sebagai pedagang. Yang menjadi fokus pembicaraan kita adalah penduduk Bumi Putera yang menetap di kota Bukittinggi. Differiasi sosial ketika itu masih sederhana. Sejumlah kecil orang Kurai berfungsi pada birokrasi Belanda pada masa itu. Bahagian terbesar dari penduduk Kurai adalah petani-petani yang rajin dan jadi buruh di pasar Bukittinggi. Wanita Kurai pergi berdagang buah-buahan, sayur-sayuran dan kue-kue di Pasar Bukittinggi. Penghulu-penghulu yang tidak bertugas dalam sistem birokrasi Belanda, menjadi fungsionaris adat dalam nagari Kurai. Penduduk Bukittinggi yang datang dari daerah sekitarnya pada umumnya tidak terikat lagi pada tanah sebagai sumber ekonominya. Bahkan di nagari asalnya tanah tidak lagi memberi kehidupan yang cerah bagi kehidupan mereka. Daerah yang sempit dan kurang subur serta peningkatan jumlah penduduk dan lain-lain alasan menyebabkan mereka meninggalkan nagari asalnya. Mereka ini pada umumnya pedagang yang ulet dan berorientasi kepada keberhasilan, tukang-tukang dan pengrajin-pengrajin yang kreatif, sehingga sebagian besar loads pasar Bukittinggi sampai

saat ini masih ada beberapa deretan toko (yang dulunya loods) dikuasai oleh orang-orang dari Sianok. Pada masa itu ada loods-loods tertentu yang dikuasai oleh orang Sungai Puar, Koto Tuo, Balingka, Ampat Angkat dan lain-lain. Jiwa persaingan yang mereka miliki dapat berkembang dengan baiknya di pasar Bukittinggi. Sampai sekarang tradisi pengrajin terus hidup dan berkembang seperti: pandai besi dari Sungai Puar, penjahit pakaian jadi dari Ampek Angkat, pandai emas dari Koto Gadang dan lain-lain.

Maka ketika Belanda memperkenalkan pendidikan sekuler di Bukittinggi kelompok masyarakat ini memperlihatkan sikap positif dan inovatif terhadap sistem pendidikan ini. Dengan bekal pendidikan sekolah dasar saja, keturunan mereka telah dapat memanfaatkannya mulai di *serongkok-serongkok* (bangunan darurat yang terdiri dari 4 tonggak dan atapnya dari daun), pedagang Bukittinggi beserta keturunannya dapat menjadi pedagang impor dan mendirikan badan-badan usaha dalam bentuk C.V., N.V. dan Firma.

Ada baiknya di sini dikemukakan suatu contoh bagaimana usaha pedagang kecil Bukittinggi meningkatkan kegiatan perdagangannya dari berdagang kecil-kecilan menjadi perdagangan yang mampu mendirikan badan-badan usaha. Guna memupuk rasa persatuan dan adanya forum tempat bermusyawarah dalam membela kepentingan perdagangannya terutama menghadapi saingan yang berat dari Cina, pedagang-pedagang kecil mendirikan Cabang Himpunan Saudagar Indonesia (HSI) di Bukittinggi pada pertengahan November 1930. Sebagai pusat dari HSI ialah kota Padang. Pada tanggal 27 Desember 1930, melalui wadah HSI, pedagang Bukittinggi membentuk "ABUAN SAUDAGAR", semacam badan usaha yang bergerak dalam simpan pinjam uang kepada pedagang-pedagang kecil atau menurut istilah sekarang "Koperasi Simpan Pinjam". Sebagai tokoh pendirinya adalah : Anwar St. Saidi dan M. Tahir Marah Sutan. Awal tahun 1932 "ABUAN SAUDAGAR"

meningkatkan kegiatannya sebagai suatu Bank. Maka namanyaapun ditukar menjadi P.T. (dulu N.V.) Bank Nasional Abuan Saudagar, yang pusatnya berkedudukan di Bukittinggi. Sekarang P.T. Bank Nasional masih berdiri dengan cabangnya di Padang. Di bawah bimbingan P.T. Bank Nasional, berkembang pulalah badan-badan usaha dagang lainnya seperti : N.V. INKORBA, N.V. NUSANTARA, N.V. CANDI MINANG dan lain-lain.

Patut dikemukakan di sini bahwa P.T. Bank Nasional Bukittinggi juga mempunyai andil yang cukup besar dalam perjuangan pergerakan nasional dan revolusi nasional di Sumatera Barat, dalam bentuk material dan moral. Cukup menarik untuk dikemukakan di sini, bahwa dari 10 orang yang menjadi pendiri P.T. Bank Nasional Bukittinggi, 9 orang berpendidikan sekolah dasar sekuler dan seorang sekolah agama. Dari pendidikan sekuler itu mereka memperoleh ketrampilan dasar dalam membaca, menulis dan berhitung. Di samping itu agaknya sikap mental positif, kepribadian inovatif dan jiwa wiraswasta yang mereka miliki serta mau memanfaatkan komunikasi masa yang ada memungkinkan mereka membuat lebih besar dari pendidikan sekuler yang mereka peroleh.

Salah seorang dari pendiri P.T. Bank Nasional Bukittinggi bernama Haji Sarkawi menceritakan bahwa karirnya sebagai pengusaha toko buku diwarisi dari bapaknya yang memulai berdagang buku secara kecil-kecilan di Pasar Bukittinggi. Di bawah pengelolaan Haji Sarkawi toko buku itu telah memesan buku dari Timur Tengah dan Al Quran dari Singapura. Dengan menempuh jalan darat dari Bukittinggi ke Pangkalan dan dari Pangkalan menaiki perahu ke Bangkinang dan dengan menempuh jalan darat lagi ia terus ke Pekanbaru dan selanjutnya ke Singapura. Di sana ia membeli Al Quran yang didatangkan pula dari India. Kemajuan pedagang-pedagang Bukittinggi itu, menyebabkan pedagang bumi putera berhasil menjadi pedagang kelas menengah yang selama ini hanya dikuasai oleh Cina.

Cina memang diakui sebagai saingan perdagangan mereka yang kuat, namun apa yang patut dipelajari atau ditiru dari pedagang mereka lakukan secara sadar.²⁰) Pedagang Bukittinggi yang ingin meningkatkan usahanya menjadi pedagang besar biasa mencobanya di kota-kota besar di Indonesia seperti Padang, Medan, Jakarta dan lain-lain.²¹)

Dari ilustrasi di atas kelihatan adanya mobilitas vertikal pada masyarakat pedagang, yakni dari pedagang kecil meningkat menjadi pedagang menengah dan pedagang/pengusaha besar. Di samping itu juga terjadi penganeka-ragaman kegiatan perdagangan/perusahaan antara lain perdagangan barang-barang kerajinan, kelontong, tekstil, buku, percetakan, jasa angkutan, jasa Bank dan lain-lain. Di samping untuk memajukan usahanya, pedagang Bukittinggi juga melihat bahwa pendidikan sekuler membuka kesempatan baru bagi anak-anak mereka. Dari *enrolmen* sekolah-sekolah sekuler yang ada di Bukittinggi, kita telah melihat bahwa jumlah terbesar adalah anak-anak pedagang dan pengusaha. Dengan keuletan dan semangat persaingan yang tinggi, anak-anak mereka berhasil menyelesaikan pendidikan Barat dengan baik dan ini sering mencengangkan peninjau-peninjau Belanda. Ketajaman pandangan ekonominya menyebabkan mereka mengadakan pilihan-pilihan tertentu terhadap sekolah sekuler yang ada. Karena pendidikan Barat mereka hubungkan dengan jabatan-jabatan yang mempunyai arti ekonomis, maka mereka cenderung melanjutkan studi anaknya ke sekolah-sekolah yang bisa mengangkat derajat ekonomis setelah anak mereka ditugaskan. Oleh karena itu OSVIA dan STOVIA (Sekolah Dokter Jawa) menjadi sasaran utama mereka. Sekolah Normal juga menjadi sasaran mereka, tetapi ketika tamatan sekolah ini tidak mendapat tempat pada sekolah pemerintah, maka minat mereka untuk memasukkan anaknya ke sekolah tersebut berkurang. Jabatan Demang, Dokter dan Insinyur menjadi idaman mereka. Lebih-lebih ketika jabatan elite birokrasi tidak lagi didominasi oleh kaum bangsawan, maka STOVIA adalah sasaran

utama mereka. Lain halnya pada masyarakat Kurai. Pada umumnya mereka tidak tertarik pada pendidikan sekuler, bahkan ada di antara mereka yang prasangka terhadap pendidikan Barat itu. Kenapa kami harus menaruh anak-anak kami payah-payah belajar di sekolah Belanda itu, hasil padi kami saja melimpah ruah, dan tidak habis dimakan dari tahun ke tahun.²²⁾

Di samping itu ada semacam kecemasan pada masyarakat Kurai (juga beberapa masyarakat lainnya di Minangkabau) bahwa pendidikan Barat itu akan menyebabkan anak-anak akan terlepas dari masyarakat dan adatnya. Bahkan ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu secara ekstrim menyatakan bahwa anak-anak mereka akan menjadi Belanda dan kafir. Kecemasan masyarakat ini pernah dibicarakan pada kongres pertama "Persatuan Guru-guru Bumi Putera Sumatra" (PGBS) di Bukittinggi pada tahun 1930. Dalam kongres itu diusulkan agar adat istiadat Minangkabau diajarkan di sekolah Gouvernement. Untuk mengatasi keluhan masyarakat bahwa anak-anak tamatan sekolah sekuler tidak bisa lagi mencangkul (bertani) dan kerajinan tangan, maka sidang kongres juga mengusulkan agar di sekolah pemerintah juga diajarkan pertanian, pertukangan dan kerajinan tangan. Dengan kekuatan uangnya, pedagang-pedagang Bukittinggi mulai membeli tanah-tanah orang Kurai yang terletak dekat pasar atau di pusat kota. Kebiasaan laki-laki Kurai ketika itu seperti kawin sampai 4 atau 5 kali, mengadu balam dan berjudi dan lain-lain menyebabkan penjualan tanah orang Kurai banyak terjadi. Begitu pula penghulu Kurai dengan mudah dibujuk Belanda untuk meminjamkan tanahnya kepada pemerintah dan pada saat tanah itu tidak dipakai lagi oleh pemerintah tanah tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya. Akibatnya orang Kurai terdesak dari pusat kota dan pada saat ini dapat kita lihat bahwa tempat pemukiman orang Kurai pada umumnya berada di daerah pinggir-pinggir kota Bukittinggi. Tanah yang menjadi dasar kriteria pelapisan sosial mulai mengabur. Uang

dan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan dipegang oleh masyarakat Bukittinggi yang berasal dari nagari sekitarnya menyebabkan kelompok ini naik strata sosialnya. Di samping penghulu, pedagang-pedagang kaya, Demang, Dokter, Guru dan orang cerdik pandai lain-lainnya berada pada lapisan sosial atas pada masyarakat Bukittinggi. Sedangkan pada lapisan kedua berada pedagang menengah, pegawai menengah, petani, pemilik tanah dan pengusaha-pengusaha menengah. Sedangkan pada lapisan terbawah berada pegawai-pegawai rendah, pedagang-pedagang kecil, pengrajin yang bekerja secara individu, petani penggarap, tukang, kusir dan lain-lain. Sedangkan budak-budak yang dibebaskan berdasarkan instruksi pemerintah Belanda tahun 1875 juga berada pada lapisan bawah.

Penduduk kota Bukittinggi yang berasal dari luar Bukittinggi makin lama makin terlepas dari ikatan desa dan adat nagarinya. Sejalan dengan itu ikatan geneologis dalam bentuk rumah gadang, paruik, kampung dan suku mulai menipis dan kehidupan kota (urban) menyebabkan proses individualisasi makin meningkat. Hubungan keluarga batih (ibu dan anak) makin intim. Tanggung-jawab terhadap anak sepenuhnya berada di tangan bapak, terutama mereka yang telah berhasil dalam kehidupan ekonomi. Namun kecintaan terhadap kaum, kampungnya tidaklah hilang sama sekali. Jadi proses individualisasi hendaklah diterjemahkan bahwa dalam kehidupan seorang bapak terutama memperjuangkan kepentingan keluarga batih, namun mereka tidak memutuskan sama sekali hubungan dengan kaumnya atau kampungnya. Sebab pada masa itu orang masih mempedomani ungkapan "sejauh-jauh terbang bangau akhirnya akan ke kubangan juga".

Bagaimana penerimaan masyarakat Minangkabau terhadap perantau-perantau yang kembali itu sangat tergantung kepada apa bakti yang pernah diberikan kepada kaumnya atau kampungnya. Oleh karena itu seorang perantau yang kurang berhasil jarang kembali ke kampungnya. Kepada mereka ini sering dijuluki "rantau Cina". Berdirinya P.T. Bank Nasio-

nal di Bukittinggi ada kaitannya dengan peningkatan perasaan dalam tantangan yang mereka hadapi masa itu. Antara tahun 1929 – 1930 ekonomi dunia mengalami kesuraman yang sering disebut sebagai zaman *Malaise*. Ekonomi Indonesia ketika itu juga mengalami kemerosotan yang langsung dirasai akibatnya oleh rakyat banyak. Rakyat Minangkabau yang merasai akibat kemerosotan itu menamai masa itu sebagai "zaman *maleset*" artinya suatu zaman yang tidak dapat memberi kepastian dalam kehidupan ekonomi. Orang tua-tua Minangkabau sering pula menamakannya "zaman *bakareh baka-ricih*" artinya zaman di mana untuk mendapatkan harga beras yang relatif murah orang harus mendapat *karcis* (kupon) lebih dulu dari pemerintah. Para pedagang Bukittinggi juga mengalami kemerosotan dalam perdagangan mereka. Peranan persaingan dengan Cina yang telah lama berlangsung menjadi tajam pada zaman ini. Bantuan dan fasilitas yang diberikan Belanda kepada Cina pada zaman ini dirasakan mereka sebagai persekongkolan untuk meniadakan aktifitas perdagangan bumi putra. Sementara itu beberapa orang pedagang Jepang yang bermukim di Bukittinggi, di antaranya bernama Oda menghasut pedagang Bukittinggi atas tindak tanduk Belanda dan Cina itu untuk menghadapi tantangan ini, "nasionalisme Indonesia" nampaknya merupakan respon yang rasional dari pedagang-pedagang Bukittinggi.

Didirikannya suatu Bank dengan nama "Nasional" oleh pedagang Bukittinggi tidak dapat tidak ada hubungannya dengan perasaan Nasionalisme yang tumbuh pada diri mereka. Saluran perasaan nasionalisme pedagang Bukittinggi bukan hanya melalui lembaga ekonomi saja, tetapi juga melalui lembaga pendidikan. Ketika Belanda membatasi enrolmen sekolah sekuler dalam rangka penghematan menghadapi kemerosotan ekonomi, atas inisiatif Anwar Sutan Saidi (salah seorang pendiri P.T. Bank Nasional) didirikan suatu lembaga pendidikan nasional yaitu Taman Siswa di Bukittinggi. Sambutan terhadap

lembaga pendidikan ini cukup besar. Dalam waktu yang relatif pendek berdiri pula perguruan Taman Siswa pada beberapa kota di Sumatra Barat. Sekolah-sekolah sekuler swasta yang didirikan oleh kaum intelektual Minangkabau juga mereka bantu.

Seperti kita ketahui pada dekade ke 3 abad XX masalah penempatan tamatan sekolah sekuler makin kentara di Sumatra Barat. Keadaan ini menjadi masalah yang sukar diatasi pemerintah karena ekonomi Hindia Belanda sedang parah pada masa itu. Kelompok intelektual sekuler yang menganggur ini berusaha mendirikan sekolah-sekolah sekuler swasta dan mengajar di sekolah tersebut. Atas usaha Aziz Sutan Kenaikan (tamatan sekolah Landbow Bogor) didirikanlah "Yayasan Ivoorsa (Instituut Voor Sociale Arbeid) tahun 1939 di Bukittinggi. Sekolah yang didirikan oleh yayasan ini ialah : 1. M.U.L.O. IVOORSA; 2. Kweekschool Islamiyah. Sekolah-sekolah ini berazaskan nasionalisme, bahasa Belanda byvak dan bahasa Indonesia hoofdvak sedangkan bahasa Inggris, Jerman dan Arab fakultatif.^{2 3}) Pentingnya pendidikan untuk kemajuan, juga mendapat perhatian kaum wanita Bukittinggi. Atas usaha Siti Rohana dan Rohana Kudus berdiri pulalah sekolah untuk anak wanita. Sekolah itu dikenal dengan nama "Sekolah Rohana Kudus".

Untuk menampung anak yang tidak diterima di H.I.S. maka Persatuan Guru Indonesia di Bukittinggi mendirikan H.I.S. — P.G.I. pada tahun tiga puluhan. Nampaknya organisasi modern sebagai alat baru untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan dan sekaligus menjadi alat menghadapi penjajahan disadari oleh berbagai kelompok masyarakat Bukittinggi. Atas inisiatif Oesman Keadilan berdiri pula suatu lembaga yang menerbitkan mingguan yang bernama "BERITA" di Bukittinggi. Mingguan ini berazaskan Nasional dan anti penjajahan. Kaum intelektual sekuler berpartisipasi terhadap penerbitan dalam bentuk karangan-karangan yang membawa masyarakat ke arah kemajuan. Untuk mempertahankan eksistensi adat dalam menghadapi perubahan yang sedang berlang-

sung maka kaum intelektual adat membentuk suatu organisasi yang bernama "Syarikat Kombinasi Adat Minangkabau" yang diketuai oleh Bagindo Jamaluddin. Dari uraian di atas kelihatan bahwa pendidikan sekuler telah menyebabkan lahirnya berbagai lembaga modern yang selama ini belum dikenal dalam masyarakat Minangkabau. Sejalan dengan itu perasaan nasionalisme Indonesia makin tersebar dan tertanam pada berbagai lapisan masyarakat Bukittinggi. Selanjutnya hubungan sosial masyarakat meningkat dari hubungan yang semula berdasarkan adat dan genealogis menjadi hubungan yang berdasarkan kepentingan. Hal ini memungkinkan terjadinya pembauran orang dari berbagai nagari dalam mencapai tujuan atau kepentingan yang sama.

4. Kaum Muda, Pendidikan dan Pergerakan ²⁴)

Kemajuan dalam pendidikan umum ini tidaklah dapat dimengerti dengan baik kalau kita tak memperhitungkan pula pengaruh gerakan keagamaan yang dilancarkan oleh apa yang kemudian dikenal sebagai Kaum Muda. Ada tiga ciri utama dari gerakan Kaum Muda, yang dipelopori oleh para ulama muda yang baru pulang dari Tanah Suci ini, yaitu menghapuskan segala *bid'ah* dalam kehidupan keagamaan, menekankan peranan akal (di samping iman), dan menjadikan Islam sebagai dasar ideologis dari perobahan sosial. Dalam usaha memerangi *bid'ah* para ulama Kaum Muda memperkenalkan corak dakwah yang baru, yaitu *tabligh* dan memakai bahasa "Melayu" atau Minangkabau dalam khotbah-khotbah. Mereka menolak sikap *taqlid*, yang hanya menerima ketentuan yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama lama. Dalam usaha menolak sikap *taqlid* dan menekankan akan terbukanya pintu *ijtihad* (bagi mereka yang mempunyai akal dan kemampuan ilmu), mereka menerbitkan brosur, buku-buku dan majalah-majalah di berbagai kota. Dan dalam mewujudkan Islam sebagai dasar dari perobahan sosial mereka mengadakan pembaharuan dalam lapangan pendidikan dan ikut serta mendirikan berbagai organisasi sosial dan pendidikan.

Pembaharuan dalam lapangan pendidikan dilakukan dalam beberapa cara. Pertama, sistem klas diperkenalkan di surau-surau (pesantren), yang biasa memakai sistem *halaqah* (guru duduk di tengah para murid yang sibuk menyimak keterangan guru tentang teks-teks yang sedang dipelajari). Dengan sistem kelas ini, tentu saja, murid-murid yang telah lanjut ilmunya dan kadang-kadang usia, bisa ditempatkan pada kelas yang terpisah dari murid-murid yang baru belajar. Kedua, mata pelajaran yang tak langsung berhubungan dengan ilmu-ilmu agama diperkenalkan. Ketiga, madrasah-madrasah baru, yaitu sekolah agama yang mengajarkan juga vak-vak umum, didirikan di mana-mana. Keempat, sekolah-sekolah umum, seperti H.I.S. dan *Schakel School*, yang bernafaskan Islam didirikan atau disokong. Sekolah yang tertua dan paling terkenal ialah H.I.S. Adabiyah, yang didirikan oleh Dr. H. Abdullah Ahmad dengan bantuan para pedagang dan pegawai di kota Padang. Pada perkembangan selanjutnya ketika organisasi pendidikan dan sosial dari Kaum Muda ini telah makin berkembang, sekolah untuk orang dewasa pun didirikan pula. Sejak tahun 1925, ketika Normal Islam dibuka oleh P.G.A.I. (Persatuan Guru-guru Agama Islam; di bawah pimpinan Dr. H. Abdul Ahmad) di Padang, maka sekolah-sekolah tingkat menengah dan atas Islam pun mulai pula dibangun di kota-kota besar di Sumatra Barat, seperti Bukittinggi, Padang Panjang dan Payakumbuh. Dengan dibukanya sekolah Diniyah Putri (1921) oleh Rahmah el Junusyah di Padang Panjang, maka pendidikan Islam bagi kaum wanita pun telah pula dirintis. Dengan begini, maka prosentase wanita yang bersekolah di Sumatra Barat pun meningkat dengan cepat. Tentang wanita yang bersekolah ini, menurut statistik Belanda, Sumatra Barat menduduki tempat yang tertinggi di antara daerah-daerah yang beragama Islam. Dari statistik tahun 1910-an ini jadi sebelum Diniyah Putri dibuka ternyata pula Bukittinggi menduduki tempat tertinggi. Di tahun 1913, 27% dari murid-murid sekolah adalah wanita. Dari uraian terdahulu, kenyataan ini tentu tidaklah mengherankan.

Bukan saja Bukittinggi telah sejak dulu "membuka diri", akibat perkembangan kota, yang makin menjadi pusat dagang dan pemerintahan, tetapi juga peristiwa di kota Gadang cukup memberi pengaruh terhadap perkembangan kota. Di tahun 1911, umpamanya, wanita-wanita Kota Gadang telah mendirikan organisasi wanita yang pertama, *Kerajinan Amai Setia*, yang bergerak dalam lapangan pendidikan dan kerajinan wanita. Jadi menaikinya aktivitas pendidikan dari Kaum Muda, yang berdasarkan Islam, menambah saluran pendidikan wanita dan juga memperteguh dasar ideologisnya.

Meskipun di Parabek, nagari dekat Bukittinggi, terdapat pesantren Kaum Muda yang besar, di bawah pimpinan Syekh Ibrahim Musa, kota ini tidaklah merupakan pusat pendidikan Islam. Kedudukan ini dipegang oleh Padang Panjang, kota yang terletak 19 km sebelah Barat. Jadi, memang bukan dari Bukittinggi banyak berasal ide-ide pembaharuan yang berdasarkan Islam. Bahkan sudah sejak awal 1920-an sekolah-sekolah agama di kota ini berada di bawah pengawasan para penghulu. Tidak seperti di Padang, di tahun 1910-an, ketika terjadi perpecahan antara ulama penganut aliran Kaum Muda dengan penguasa adat dan para pendukungnya, di Bukittinggi perubahan dalam pemikiran keagamaan dan pendidikan Islam lebih bersifat bertahap, tanpa keluar dari suasana konsensus.

Dalam hal ini di samping peristiwa yang traumatis di tahun 1908, ketika terjadi pemberontakan Kamang, sistem kepenghuluan Kurai serta sifat Bukittinggi sebagai kota dagang, peranan Syekh Jamil Jambek (meninggal 1946) tak dapat dilupakan. Tidak seperti H. Rasul (Dr. H. Abdul Karim Amarullah), guru utama Sumatra Thawalib (sampai tahun 1924), Syekh Jambek bukanlah seorang yang berapi-api. Ia seorang yang tenang. Juga bukan seperti H. Abdullah Ahmad, yang pintar menulis dan biasa bergaul dengan para pejabat dan kaum terpelajar Barat, Syekh Jambek lebih menyibukkan diri dengan pengajian-pengajian dan tabligh yang diadakan di su-

raunya. Di samping terkenal sebagai ahli ilmu falak, Syekh Jambek, anak seorang penghulu kepala, memang mempunyai pengaruh juga di kalangan penghulu-penghulu adat, di samping di kalangan para pedagang di Pasar Bukittinggi. Karena itu tidaklah mengherankan kalau Van Ronkel dalam laporannya tentang percaturan agama di Sumatra Barat (1916) menyebut sebagai "praktikus".

Dengan latar belakang situasi sosial keagamaan ini, maka bisa pulalah dimengerti mengapa Bukittinggi memainkan peranan sangat penting dalam pergerakan Islam dan nasionalisme. Meskipun secara rutin Padang Panjang atau Padang lebih berperan. Padang Panjang dengan Thawalib dan Diniyahnya, Padang dengan pemikiran-pemikiran dan usaha para pedagang — Tetapi saat-saat yang menentukan terjadi di Bukittinggi. Tanpa adanya dukungan situasi sosial memang payah bisa dibayangkan peristiwa-peristiwa penting itu harus terjadi di kota dingin ini.

Pada tahun 1925 pemerintah mengeluarkan Guru Ordonansi yang telah diperbaharui. Peraturan baru itu mengharuskan siapapun juga yang akan mengajarkan kepada orang lain, "yang bukan keluarga dekatnya" haruslah memberitahunya pada bupati atau patih (di Jawa) atau kepala daerah (di luar Jawa). Pemberitahuan ini haruslah dengan memakai formulir yang telah tersedia, dan lebih penting lagi, calon guru tersebut harus mempunyai surat registrasi. Dari ketentuan ini nyatalah, bahwa tujuan utama dari pemerintah adalah justru mengekang perkembangan Islam. Bukanlah surat registrasi pada dasarnya hanyalah bisa diberikan kepada yang dianggap telah mendaftar? Dengan sendirinya tantangan terhadap ordonansi baru ini bermunculan. Reaksi bertambah kuat setelah Mukhtar Muhammadiah (1928). Namun, secara bertahap pemerintah memaksakan ordonansi itu di daerah-daerah. Menjelang 1928 hanya tinggal beberapa keresidenan saja yang belum diharuskan menjalankan Guru Ordonansi. Salah satu daripadanya ialah Keresidenan Sumatra Barat.

Sejak awal 1928 mulailah kompetisi yang hebat. Para ulama Kaum Muda, di bawah pimpinan Syekh H. Abdul Karim Amarullah (H. Rasul), di satu pihak dan pemerintah, yang dipercayakan kepada Dr. de Vries, di pihak lain. Persaingan ini sangat hebat, sehingga Dr. de Vries pernah melaporkan bahwa di kalangan daerah, di mana pengaruh Kaum Muda sangat kuat, para ulama telah bersedia mempertimbangkan kemungkinan penerimaan mereka atas ordonansi itu. Bahkan ulama-ulama di Bukittinggi telah bersedia menerima. Ini terjadi di bulan Juni, tetapi menjelang Juli, mereka menjadi ragu-ragu lagi.

Sementara itu beberapa ulama mendirikan Komite Permusyawaratan Ulama Minangkabau, di bawah pimpinan H. Abdul Madjid, seorang ulama moderat dari golongan Kaum Tua. Maksud utama dari Komite ini ialah menolak ordonansi. Inilah yang mereka lakukan.

Dan bukanlah hal yang kebetulan kalau Bukittinggi dipakai sebagai tempat permusyawaratan. Bukannya di kota ini ada surau Syekh Jambek, tokoh yang bisa diterima oleh segala pihak, tetapi juga para penghulu di kota ini merasa hak mereka, sebagai pengawas sekolah-sekolah agama. Demikianlah, dengan mengambil tempat di surau Syekh Jambek konferensi ulama Minangkabau diadakan pada tanggal 19 Agustus 1928. Dihadiri oleh tak kurang dari 800 orang ulama yang mewakili 115 organisasi keagamaan dan organisasi setempat, dengan suara bulat menerima resolusi yang menolak ordonansi. Dihadapan para pejabat Belanda, H. Rasul dengan penuh semangat berhasil meyakinkan yang hadir bahwa ordonansi akan mencelakakan Islam.

Peristiwa ini sangat penting bagi kesadaran politik dan Islam di Sumatra Barat. Sebab, meskipun Residen telah mengancam bahwa bagaimanapun juga Guru Ordonansi akan diperlakukan di Sumatra Barat, akhirnya Gubernur Jendral memutuskan bahwa di Sumatra Barat Ordonansi tidak akan dijalan-

kan. Maka setelah Plakat Panjang (1833), Guru Ordonansi kemudian menjadi mithos politik baru di bawah pimpinan ulama kaum muda penentangan terhadap pemerintah kolonial.

Pengalaman-pengalaman yang terjadi sesudah itulah yang terutama memperkuat mithos ini. Tak lama kemudian Tafsir Thantawi dilarang beredar, sebab dianggap terlalu "nasionalistis". Pada waktu yang bersamaan Syekh Thaher Jalaluddin, guru dari banyak ulama Kaum Muda, yang telah bermukim di Tanah Semenanjung, ditangkap, ketika ia datang mengunjungi keluarganya di Bukittinggi. Hanya dengan campur tangan Inggris, penguasa Tanah Semenanjung, Syekh Thaher dibebaskan kembali. Sejak itu ia tak pernah lagi berkunjung ke tanah kelahirannya.

Ketiga peristiwa ini — Guru Ordonansi, pembeslahan dan pelarangan Tafsir Thantawi dan penangkapan Syekh Thaher, menghangatkan suasana politik di Sumatra Barat. Maka kembali surau Syekh Jambek di Bukittinggi memegang peranan. Di bawah pimpinan Saalah St. Mangkuto, tokoh Muhammadiyah, pada tanggal 4 Nopember 1928, dengan dihadiri oleh tak kurang dari 1500 peserta, yang terdiri atas penghulu, ulama dan "cerdik pandai", pertemuan besar kedua diadakan. Pertemuan ini memutuskan akan membentuk federasi dari semua organisasi di Minangkabau.

Tetapi suasana persatuan ini berakhir dengan anti-klimaks, Federasi gagal mewujudkan diri. Meskipun demikian semacam suasana sosial politik di Bukittinggi telah tercipta. Dalam suasana inilah dua peristiwa besar lainnya terjadi di kota dingin ini. Kedua peristiwa itu adalah Mukhtar Muhammadiyah se Indonesia dan pembentukan Persatuan Muslimin Indonesia.

Pada tahun 1925, Muhammadiyah dibawa ke Minangkabau oleh Syekh H. Abdul Karim Amarullah, yang telah mengundurkan diri dari Sumatra Thawalib yang telah dikuasai Sarikat Rakyat. Perkembangan Muhammadiyah berjalan cepat setelah pemberontakan Silungkang (komunis) di awal 1927.

Tanpa dimaksud Muhammadiyah, organisasi pendidikan dan keagamaan yang di Jawa tidak ikut berpolitik, di Minangkabau menjadi wadah dari segala aspirasi keagamaan, sosial dan politik. Dengan begini maka Muhammadiyah yang berkembang cepat itu, terlibat dalam berbagai konflik dengan pejabat se tempat, dan terutama dengan para penghulu dan pemerintahan nagari. Namun dengan bantuan para pedagang dan perantau Muhammadiyah masih dapat mendirikan sekolah-sekolah mereka.

Dengan kemajuan dan segala keterlibatan Muhammadiyah dalam berbagai gerakan yang bersifat politik ini, putusan untuk menjadikan Minangkabau sebagai tempat kongres besar Muhammadiyah se Indonesia tidaklah terlalu mengherankan. Dan Bukittinggi adalah pilihan yang paling masuk akal pula. Syekh Jambek yang didukung para penghulu dan pedagang serta dipercayai pejabat cukup jaminan akan keberhasilan kongres besar tersebut. Apalagi anak-anak beliau adalah pula tokoh-tokoh muda Muhammadiyah di kota Bukittinggi.

Demikianlah, di bawah bimbingan spiritual Syekh Jambek dan Syekh Karim Amarullah dua ulama yang tak pernah secara resmi menjadi anggota Muhammadiyah pada tanggal 14 – 21 Maret 1930 kongres yang terbesar yang pernah diadakan Muhammadiyah berlangsung. Bukan saja 240 tamu-tamu, yaitu wakil dari 99 cabang di Jawa, satu Kalimantan dan satu di Sulawesi, serta 15 cabang dan 30 seksi Aisyah dari Minangkabau yang hadir, juga hampir semua organisasi lokal di Minangkabau mengirimkan peninjau. Puncak dari peristiwa ini ialah ketika diadakan rapat besar. Lebih kurang 20.000 pengunjung menghadirinya (di Jawa paling tinggi rapat akbar dihadiri oleh ± 2.000 orang, dan ini terjadi di Pekalongan).

Kongres ini adalah peristiwa yang paling berkesan bagi Muhammadiyah di Minangkabau. Nama Muhammadiyah tambah harum di luar Jawa. Tetapi akibat pidato yang berapi-api dalam rapat besar, Muhammadiyah dan Syekh Jambek tak lagi

dipercayai pemerintah di Bukittinggi. Bahkan tabligh-tabligh Muhammadiyah, yang diselenggarakan oleh penghulu-penghulu (di Sarik dan Parit Rantang) dihalang-halangi. Tetapi lebih penting lagi kongres juga menandai dimulainya "konsolidasi" Muhammadiyah — anasir-anasir politik dari tubuh organisasi secara bertahap mulai mengundurkan diri dan menjabarkan aspirasi politik anti kolonial mereka ke organisasi lain.

Saluran ini sebenarnya telah juga tersedia. Pada akhir Nopember 1928, kongres reuni Sumatra Thawalib (yang telah berserakkan sebagai akibat pengaruh Sarikat Rakyat/PKI), diadakan di Padang Panjang. Pada saat inilah diresmikan berdirinya Persatuan Sumatra Thawalib. Tahun berikutnya organisasi baru ini makin menampakkan dirinya dalam kongres kedua. Akhirnya mencapai puncaknya dalam kongres ketiga, yang diadakan pada tanggal 20 — 21 Mei 1930. Pada kongres inilah diputuskan dileburnya Persatuan Sumatra Thawalib ke dalam organisasi baru, yaitu Persatuan Muslimin Indonesia (P.M.I., atau kemudian lebih dikenal sebagai Permi). Corak organisasi ini segera kelihatan ketika putusan pertama dikeluarkan. P.M.I. tidak akan meminta *rechtspersoon*, hak hukum. Pada konferensinya pertama, di bulan Agustus 1930, dengan menjadikan "Islam dan kebangsaan" sebagai dasar ideologis, maka sifat politik dari organisasi ini telah tak pernah diperdebatkan lagi.

Ke dalam Permi-lah anasir-anasir politik dari Muhammadiyah pindah. Dan di Bukittinggi-lah pusat kegiatan awal dari Permi. Meskipun di tahun 1932, secara resmi, Permi memindahkan pusat kegiatannya ke Padang. Tetapi sementara itu, dengan berbagai kegiatan yang telah dirintis, peranan Bukittinggi dalam pergerakan rakyat tak bisa digantikan begitu saja. Di kota inilah Permi mendirikan kursus-kursus politik dan merintis sekolah agama yang sangat nasionalistis. Maka tidaklah pula terlalu mengherankan jadinya, jika di kota ini pula polisi makin aktif.

Permi dan segala aktivitasnya menentang kolonialisme Belanda, dan terutama usahanya untuk memperkenalkan dasar ideologi perjuangan yang baru, yaitu "Islam dan kebangsaan" adalah bagian yang tak terlepas dari sejarah pergerakan nasional secara keseluruhan. Namun dari sudut sejarah kota Bukittinggi, Permi bukan saja melanjutkan radikalisme politik yang telah dirintis oleh Muhammadiyah Minangkabau (suatu corak yang pada waktu itu berbeda dengan Muhammadiyah yang berpusat di Yogya), tetapi juga memperlihatkan betapa berbagai perkembangan sosial ekonomis telah menjadikan kota tersebut sangat sensitif terhadap perkembangan yang bercorak nasional. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi, perekonomian yang cukup maju antara lain karena berkembangnya industri rakyat di sekitarnya, sistem pemerintahan adat, dan sebagainya, semuanya memberikan pada Bukittinggi suatu suasana sosial yang mempertinggi kemungkinannya untuk menerima, bahkan kemudian seperti diperlihatkan oleh Muhammadiyah dan Permi, memberi sesuatu yang baru ke dalam kancan pergerakan nasional.

Maka jika kemudian di jaman revolusi merebut kemerdekaan Bukittinggi kembali memainkan peranan yang sangat penting, latar belakang sosial-historisnya telah bisa dilihat sejak tahun 1930-an ini. Tetapi sebelum itu, berbagai peristiwa harus dialami. Pada tahun 1933, dimulai dengan pengusiran Hatta (1932), yang pulang kampung, dan mencapai puncaknya dengan penangkapan para tokoh Permi, seperti H. Mochtar Lutfi, H. Ilyas Jacob (dua pentolan yang telah mengenyam pendidikan dan pengalaman pergerakan di Mesir), suasana *met en orde* mulai menguasai Bukittinggi. Larangan rapat, larangan meninggalkan daerah, dan sebagainya melumpuhkan kehidupan pergerakan.

Tetapi bibit pergerakan telah menyebar. Kesadaran nasional, baik yang berdasarkan Islam maupun yang bukan, telah

bersemi. Inilah kemudian yang antara lain menjadi masalah Bukittinggi untuk tampil sebagai pusat perjuangan kemerdekaan di Sumatra. Bukanlah sia-sia pula, jika pada waktu revolusi nasional, kota dingin ini disebut sebagai "Yogya kedua".

CATATAN BELAKANG BAB IV

1. Taufik Abdullah, "Minangkabau 1900 – 1927 : Preliminary Studies in Social Development", (*Master's Thesis*, Cornell University, 1967), halaman 46.
2. Elizabeth E. Graves, "The Ever-Victorious: How Minangkabau of Indonesia Solved Their Colonial Question" (*a thesis for the degree of Doctor of Philosophy*, University of Wisconsin), halaman 416.
3. *Ibid*, halaman 418.
4. Taufik Abdullah, *op. cit.* halaman 60.
5. Elizabeth E. Graves, *op. cit.* halaman 419.
6. *Ibid*, halaman 248.
7. *Ibid*, halaman 256.
8. *Ibid*, halaman 262.
9. *Ibid*, halaman 337.
10. *Ibid*, halaman 271.
11. *Ibid*, halaman 349.
12. Wawancara dengan M. Rasid Manggis, Bukittinggi, 17 Juli 1982.
13. Elizabeth E. Graves, *op. cit.* 362.
14. *Ibid*, halaman 363.
15. *Ibid*, halaman 364.
16. *Ibid*, halaman 365.
17. *Ibid*, halaman 366.
18. *Ibid*, halaman 367.
19. Wawancara dengan Yussyuf Syuib, Bukittinggi, 27 Juli 1982.
20. Wawancara dengan H. Syarkawi, Bukittinggi, 27 Juli 1982.
21. Wawancara dengan Yussyuf Syuib, Bukittinggi, 27 Juli 1982.
22. Wawancara dengan M. Rasid Manggis, Bukittinggi, 17 Juli 1982.
23. *Ibid*.

24. Bagian ini diolah dari:

- a. Taufik Abdullah, "Minangkabau 1900 – 1927 : Preliminary Studies in Social Development", (*Master's thesis*, Cornell University, 1967).
 - b. Taufik Abdullah, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra 1927 – 1933* (Ithaca, NY : CMIP, Cornell University, 1972).
-

B A B V

MASA PENDUDUKAN JEPANG

1. BUKITTINGGI IBUKOTA SUMATRA

Kekalahan Pemerintah Hindia Belanda terhadap Balatentara Jepang tanggal 8 Maret 1942, sekaligus merubah status kota Bukittinggi. Sejak saat itu resmi ditegakkan kekuasaan Pemerintah pendudukan Jepang.

Jepang membagi Indonesia dalam tiga kekuasaan pemerintahan pendudukan, yang semuanya berada di bawah Komando Marsekal Terauchi, Panglima kekuasaan Tentara ke VII, yang sejak awal penyerangan ke selatan berpusat di Singapura itu adalah:

- a. Daerah kekuasaan Tentara keenambelas di pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Batavia (kemudian dinamakan Jakarta).
- b. Daerah kekuasaan Tentara keduapuluhlima di pulau Sumatra dengan pusatnya di Bukittinggi.
- c. Daerah kekuasaan Armada Selatan Kedua untuk pulau-pulau: Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat; dengan pusatnya di Makasar (sekarang Ujung Pandang). Semula merupakan bagian dari Armada Barat Daya yang berpusat di Penang. Tetapi kemudian digabung di bawah Komando Terauchi.

Pada awal pendudukan Jepang Pulau Sumatra masih diurus langsung dari markas Tentara VII di Singapura. Baru pada pertengahan tahun 1943 daerah teritorial Malaya yang diduduki Tentara ke 29 dan Sumatra dipisahkan. Sejak itu pimpinan Tentara Keduapuluhlima mempunyai wewenang sendiri mengurus Sumatra dari markasnya di kota Bukittinggi. Sungguhpun demikian hubungan pemerintahan di Sumatra lebih erat ke Singapura dari pada ke Jawa.

Tidak banyak perbedaan antara Struktur pemerintahan yang telah dibuat Pemerintah Hindia Belanda dengan apa yang diciptakan tentara Jepang di Sumatra. Perbedaan yang menyolok kelihatan pada nama-nama yang diberikan. Demikianlah, istilah keresidenan pada masa Hindia Belanda diganti Syu pada jaman pendudukan Jepang. Syu dikepalai oleh Shucokan. Di bawah Syu ada *Buco* (luhak/kabupaten). Seterusnya *Gun* (distrik/kedemangan) yang dikepalai oleh *Gunco*. Tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah *Son* (kenagarian) yang dipimpin oleh *Sonco*. Khusus untuk kota Padang dan Bukittinggi dibentuk pemerintahan kota (*Shi*) yang dikepalai oleh Walikota (*Shico*). Dengan demikian Bukittinggi di samping sebagai Ibukota Sumatra juga merupakan kotapraja.

Pada saat itu di Sumatra dibentuk 10 Syu, yakni: Aceh, Sumatra Timur, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung, Bangka – Biliton. Sebagai pusat pemerintahan militer di Sumatra di Bukittinggi berkedudukan panglima tentara (*Gunsyireikan*) yang kemudian disebut *Saiko Syikikan*. Di bawah *Saiko Syikikan* terdapat *Gunseikan* (kepala pemerintah militer yang biasanya dijabat oleh Kepala Staf Tentara Keduapuluhlima). Pemerintahannya disebut *Gunseikanbu*, yang memiliki departemen-departemen sebagai berikut:

- Departemen Dalam Negeri
- Departemen Kepolisian
- Departemen Kehakiman
- Departemen Industri
- Departemen Keuangan
- Departemen Pekerjaan Umum
- Departemen Perhubungan
- Departemen Pembukuan
- Departemen Penerangan
- Departemen Pemindahan dan Pengiriman
- Departemen Meteorologi.

Masing-masing departemen dipimpin oleh seorang direktur yang berada di bawah pengawasan Departemen Dalam Negeri sebagai wakil dari *Gunseikan*. Setiap Syu (keresidenan) hanya mempunyai tiga departemen, yakni: Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, dan Departemen Kesejahteraan Sosial.

Seirama dengan perkembangan di Jawa di mana Jepang mendirikan Cuo-Sangi-in (Badan Pertimbangan Pusat), maka di Sumatra badan sejenis juga didirikan di Bukittinggi. Anggota Cuo-Sangi-in Sumatra diambil dari wakil-wakil Syu. Sedangkan masing-masing Syu dibentuk pula Cuo-Sangi-Kai (Badan Pertimbangan Daerah).

2. SIKAP JEPANG TERHADAP MASYARAKAT

Tentara pendudukan sedikit demi sedikit terus memanfaatkan kedudukannya di masyarakat. Sejalan dengan itu berbagai peraturan dikeluarkan. Peraturan yang dikeluarkan *Saiko Sikikan* disebut *Tomi Seirei otu*. Sedangkan yang dikeluarkan *Gunseikan* (kepala pemerintahan) disebut *Tomi Kanrei Otu*. Dan peraturan yang ditetapkan oleh *Sucokan* disebut *Syurei*. Karena peraturan-peraturan baik yang dikeluarkan *Saiko Sikikan* maupun *Gunseikan* berawal dengan *Tomi*, maka masyarakat Sumatra, khususnya penduduk Bukittinggi menyebut pemerintahan pendudukan dengan "Pemerintahan Tomi".

Sejajar dengan pemantapan kekuasaan, Jepang juga mulai dengan aksi mempengaruhi penduduk. Seperti juga di Jawa perhatian pertama adalah kepada para pemuda. Di kota Padang didirikan Komite Rakyat, yang disponsori Jepang. Organisasi Sosial ini bertujuan:

- a. Mengurangi ekses perang terhadap rakyat Sumatra Barat.
- b. Membantu Jepang di bidang keamanan dan makanan.
- c. Mendirikan sekolah.
- d. Memelihara semangat kemerdekaan.

Organisasi sosial ini mendapat sambutan baik dari masyarakat. Masyarakat menganggap Komite Rakyat akan dapat dijadikan sebagai penyalur aspirasi mereka yang beberapa tahun sebelumnya dikekang Belanda. Dalam waktu singkat berdiri cabang-cabang Komite Rakyat. Salah satu di antara cabang itu berada di Bukittinggi.

Kebijaksanaan Jepang dengan cepat berubah. Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang sebelumnya diperbolehkan untuk dinyanyikan, kemudian dilarang. Begitu juga izin untuk menaikkan bendera merah putih juga dicabut. Tidak lama kemudian Komite Rakyat juga dibubarkan.

Seperti juga di Jawa, Jepang mulai mendekati tokoh-tokoh masyarakat. Kursus-kursus diadakan. Pada akhir tahun 1942 Jepang mendirikan apa yang disebut pendidikan "Barisan Pemuda Asia Raya". Di Sumatra Barat pendidikan ini dinamakan Pemuda Nippon Raya, di bawah pimpinan Chatib Sulaiman. Rupanya para pembina Pemuda Nippon Raya, mencoba untuk memanfaatkan organisasi ini untuk kepentingan Indonesia. Dan karena itu Jepang kemudian membubarkannya.

Tidak kalah pentingnya adalah usaha Jepang dalam bidang pendidikan. Langkah pertama adalah memusnahkan buku-buku pelajaran yang berbahasa Belanda. Prinsip *Seisin* atau semangat yang tidak lain berisi *Nippon-Seisin* dimasukkan dalam kurikulum untuk semua tingkatan. *Seisin* ini ternyata diterapkan pada hampir seluruh kegiatan masyarakat, seperti olah raga, rukun tetangga, gotong-royong dan sebagainya.

Sekolah dasar diseragamkan. Hanya bahasa Indonesia dan Jepang yang boleh dipergunakan sebagai bahasa pengantar. Hal ini sekaligus menunjang pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional.

Di setiap sekolah Nippon-Seisin digiatkan dengan cara:

- a. Kyoren (latihan kemiliteran/baris berbaris)
- b. Taiso (senam)
- c. Kinno Hosyi (gotong royong secara paksa).

Dalam banyak hal latihan militer atau semi militer dan gotong-royong banyak menyita waktu para murid. Hal itu sering mengorbankan jam-jam pelajaran. Akibatnya pelajaran tidak lagi menjadi tujuan utama. Maksud terselubung pemerintah pendudukan Jepang tidak lain adalah men-Jepangkan para remaja Indonesia. Bentuk-bentuk Seinendan, Keibodan, mirip dengan latihan-latihan pemuda di Jepang. Dan apa yang dilakukan Jepang di Jawa juga dilaksanakan di Sumatra. Sedikit perbedaan mungkin terletak pada nama pasukan Pembela Tanah Air (PETA) di Jawa, di Sumatra pasukan semacam itu dinamakan Sumatra Gyugun. Dan Bukittinggi merupakan salah satu pusat latihan Gyugun di Sumatra. Banyak di antara lulusan Gyugun ini kemudian pada masa Indonesia merdeka menjadi tokoh-tokoh terkemuka pada Divisi Banteng di Sumatra Barat. Upacara penghormatan *Sei Keire* dengan merukuk ke arah Tokyo atau hormat kepada Tenno Heika merupakan nilai baru yang agak menggoncangkan masyarakat, terutama golongan agama. Bagi para ulama upacara Sei-Keire yang berarti sujud kepada kaisar Jepang Tenno Heika, berarti merubah agama mereka. Kaisar Jepang dianggap sebagai dewa (Tuhan) yang menganugerahkan kehidupan bagi kepulauan Yamato, dengan keturunan dewa Matahari yang bernama Amaterasu Omikami tidak sama dengan Tuhan Allah seperti yang disembah ummat Islam. Di antara kaum ulama yang paling keras menentang "Sei Keire" tersebut ialah Dr. H. Karim Amarullah. Beliau dianggap sebagai pemula dari satu revolusi jiwa kepada Jepang di Indonesia (FA).

Terhadap mass media juga Jepang melakukan sensor yang ketat sekali. Di Sumatra Barat satu-satunya surat Kabar yang diizinkan terbit pada masa pendudukan ini ialah Padang Nippo

di Padang. Sedangkan di tempat lain tidak satupun majalah yang terbit seperti sediakala. Di samping harian Padang Nippo ada lagi satu harian yang khusus untuk orang Jepang (dalam bahasa Jepang) yang bernama Sumatra Shinbun dengan huruf Kanji. Surat kabar ini pada mulanya terbit di Padang, kemudian entah karena apa lalu pindah ke Padang Panjang sampai Jepang menyerah.

Sebagai kantor berita (persbureau) yang menjadi pusat pekabaran untuk Sumatra pada masa itu ialah Domei berkedudukan di Bukittinggi. Semua ulasan dan pemberitaan dari surat kabar atau kantor berita pada masa itu hanya bersifat propaganda dan memuji-muji pemerintah dan tentara Jepang.

Begitu pula dalam bidang perfilman Jepang melakukan sensor yang ketat. Urusan perfilman ini dikelola oleh suatu badan yang bernama "Eiga Heikyusha". Film-film yang berasal dari Barat terutama dari negeri Sekutu dilarang. Yang diutamakan ialah film yang bersifat propaganda perang. Film ini merupakan suatu mass media yang intensif dalam proses penjepangan masyarakat. Dan yang menjadi sasaran utama propaganda film ini ialah anak sekolah. Mereka sering diberi kesempatan untuk secara gratis. Melalui media film ini Jepang ingin menjadikan pemuda sebagai "Atarashii Nippon Jim" (Orang Jepang Baru).

Demikianlah sikap Jepang terhadap masyarakat pada masa awal pendudukannya. Barang siapa yang berani melanggar diberlakukan hukum perang. Dalam hukum seperti itu sering jiwa menjadi tantangannya.

Bagaimana kekejaman pemerintah Jepang itu di Sumatra Barat digambarkan HAMKA dalam pantunnya yang berbunyi:

"Beras yang putih untuk Jepang
Untuk kita jagung campur ubi
Banyak bicara kena lampang
Kalau melawan hukum mati.

(Beras yang putih untuk Jepang
Untuk kita jagung campur ubi
Banyak bicara kena tempeleng
Kalau melawan dihukum mati).

CATATAN BELAKANG BAB V

1. Hamka, *Ayahku*, (Jakarta, uminda, 1982), halaman 220.
 2. -----, *Kenang-kenangan hidup* (Jakarta, Gapura, 1982), halaman 73.
-

B A B VI

SUATU TANTANGAN DAN PENGHARAPAN DALAM MASA PENDUDUKAN JEPANG.

1. Suatu tinjauan sosial pada awal pendudukan Jepang:

a. Sikap masyarakat terhadap Jepang

Kedatangan Jepang di Bukittinggi disambut masyarakat dengan berbagai perasaan. Walaupun beberapa waktu sebelumnya ancaman perang terus dirasakan, namun dapat dipastikan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui kapan Jepang akan memasuki Bukittinggi. Karena itu ketika Balatentara Jepang betul-betul memasuki kota, sebagian mereka bergembira, sebagian lagi cemas, was-was, ada pula yang memiliki harapan-harapan baru.

Serentetan kemenangan Jepang yang sangat cepat di Asia Timur dan Asia Tenggara membuat kagum sebagian masyarakat. Kekalahan tentara Hindia Belanda menaikkan prestise Jepang di mata masyarakat. Sebagian rasa kagum itu berkembang menjadi pro Jepang. Pandangan masyarakat ini menjadi lebih sempurna dengan aktivitas mata-mata Jepang yang telah disebarkan ke mana-mana beberapa saat sebelum Jepang memasuki kota Bukittinggi. Dan ketika tentara Jepang datang sebagian masyarakat berdiri di pinggir jalan sambil berteriak "*banzai Nippon*". Meskipun sulit mengukur dalamnya kesungguhan perasaan pro Jepang di kota ini, namun sikap seperti itu rupanya sudah menjadi gambaran umum di berbagai tempat di Indonesia bahwa ketika tentara Jepang memasuki satu kota atau daerah, mereka disambut oleh sebagian masyarakat sebagai pahlawan.

Penduduk kota Bukittinggi tidak terpengaruh atas kehadiran tentara Jepang yang baru saja memasuki kota mereka. Masyarakat masih bebas berjalan ke berbagai pelosok kota.

Walaupun mengalami kesulitan komunikasi bahasa, namun saling melempar senyum dan ucapan *banzai Nippon* merupakan suasana baru pada penduduk ini.

Seperti juga di kota-kota lainnya di Indonesia, pada awal masa pendudukannya Jepang memperbolehkan penduduk kota Bukittinggi untuk mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan cara itu Jepang berharap bahwa penduduk betul-betul merasakan bahwa mereka sudah terlepas dari penjajahan barat.

Suasana dengan segera mulai berubah. Keinginan terse-lubung dari semboyan "Asia untuk bangsa Asia" mulai muncul kepermukaan. Berbagai larangan dikeluarkan, termasuk di antaranya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera Merah Putih. Sejalan dengan itu sikap bersahabat yang pernah diperlihatkan prajurit Jepang pun sudah berubah. Perampasan harta milik rakyat seperti sepeda, arloji dan sebagainya terjadi di mana-mana. Bagi yang mencoba melawan pasti kena tempeleng atau dipukul. Penduduk berusaha menyembunyikan barang-barang mereka, terutama barang-barang yang mungkin mengundang keinginan tentara Jepang merampasnya. Pada permulaan kedatangan tentara Jepang jumlah orang yang datang ke pasar agak berkurang. Namun bulan-bulan berikutnya aktivitas pasar kembali normal, walaupun masih diwarnai oleh ketakutan atas pendudukan Jepang.

Kaum pergerakan di Bukittinggi menanggapi kehadiran Jepang dengan berbagai sikap.

1. Golongan pertama menggantungkan harapan seakan-akan kedatangan Jepang akan membawa kebebasan serta masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia.
2. Golongan kedua tidak yakin, bahwa Jepang akan memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.
3. Golongan ketiga berpendapat bahwa bagaimanapun juga bekerja sama dengan Jepang dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia dapat dipertimbangkan.

Golongan yang tidak percaya sedikitpun akan maksud baik dari kedatangan Jepang meneruskan perjuangan mereka secara diam-diam "di bawah tanah".

Pendapat golongan ketiga yang ingin bekerja sama dengan Jepang sambil menarik keuntungan daripadanya demi terwujudnya cita-cita bangsa terpengaruh pada jalan pikiran Bung Karno, sewaktu beliau berada di Sumatra Barat setelah bebas dari tahanan Belanda di Bengkulu. Politik bekerjasama tersebut dicetuskan dalam pertemuan antara Kolonel Fujiyama dengan Bung Karno di Bukittinggi.

Gagasan tersebut mendapat sambutan dari sebagian tokoh masyarakat, khususnya kaum cerdik pandai, kaum ulama dan golongan pemuda di Bukittinggi. Hasil dari pendekatan ini akan terlihat beberapa saat kemudian.

b. Bekerjasama dengan Jepang sambil menumbuhkan kekuatan sosial

Di samping segi-segi negatifnya zaman pendudukan Jepang ini ada pula segi-segi positifnya. Bahasa Indonesia mendapat kesempatan luas untuk berkembang menjadi bahasa resmi di kantor-kantor pemerintah, sekolah-sekolah menggantikan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai bahasa pergaulan, juga menjadi bahasa resmi dalam rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan.

Pertikaian yang pernah diciptakan Belanda terutama pada tokoh-tokoh agama, adat cendekiawan barat dan sebagainya untuk sementara terdorong ke belakang menghadapi tantangan-tantangan yang ditimbulkan Jepang. Mereka berjabat tangan dan bekerjasama dalam menolak bencana, melindungi rakyat banyak, adat dan agama dari kehancuran keganasan Kompetai dan propaganda Jepang.

Pejabat-pejabat Jepang pada umumnya tidak mengetahui seluk beluk pemerintahan dan perusahaan-perusahaan Belanda. Mereka juga tidak memahami bahasa Belanda maupun bahasa

Indonesia. Karena itu orang-orang Indonesia yang semula ditugaskan menjadi wakil pegawai Jepang menjalankan tugas seolah-olah sebagai pimpinan di kantor-kantor tersebut. Tanpa disengaja, Jepang telah mendidik pejabat-pejabat Indonesia di daerah ini untuk memperoleh pengalaman sebagai pimpinan. Manfaatnya terasa pada masa kemerdekaan.

Cinta tanah air kian berkembang dan meluas akibat penindasan yang dilakukan Jepang. Hal ini besar sekali artinya di waktu menyambut datangnya Revolusi Kemerdekaan pada periode berikutnya.

Karena semakin luasnya daerah yang dikuasai Jepang, mereka memerlukan tenaga untuk mempertahankannya. Untuk itu Jepang membuka kesempatan bagi pemuda di daerah-daerah untuk menjadi pasukan Sukarela (Heiho) yang bertugas sebagai pembantu tentara. Penerimaan Heiho dilakukan melalui saluran pemerintah setempat dan berfungsi sebagai tentara yang dibayar.

Latar belakang pembentukan Heiho yang bertujuan untuk menjadi tentara bayaran dan karena itu Jepang bebas melamparkan mereka ke medan perang manapun seperti ke Burma, Siam, Morotai dan Halmahera. Karena itu Heiho kurang mendapat sambutan dari pemuda-pemuda di Sumatra Barat. Menjadi serdadu, apalagi serdadu bayaran dan berperang untuk mencari uang dengan menjual nyawa untuk pembeli beras bagi menghidupi anak isteri adalah pekerjaan yang kurang terpendang pada masyarakat Minangkabau. Penilaian ini telah hidup berurat berakar dalam masyarakat berdasarkan pengalaman pada masa-masa sebelumnya. Bahwa serdadu-serdadu yang didatangkan Belanda untuk menumpas perlawanan-perlawanan rakyat di daerah Sumatra Barat dulunya adalah serdadu bayaran yang bukan berkulit putih. Mereka digunakan Belanda untuk membunuh dan menembaki saudara-saudara mereka

yang masih sebangsa. Dalam banyak hal mereka lebih kejam dari tuannya. Karena itu gambaran serdadu bayaran kurang baik pada masyarakat.

Dalam rangka Perang Asia Timur Raya Pemerintah Militer Jepang berhasil memaksa ulama Minangkabau untuk menfatwakan Perang Asia Timur Raya sebagai "Perang Sabil". Pengertian tentang isi "Perang Sabil" itu berbeda dengan konsepsi yang terdapat dalam Islam. Bagi para ulama "Dai Toa Senso" adalah "Perang Sabil" yang diartikan sebagai menghancurkan kekuasaan Jepang di tanah Minangkabau. Hal itu karena Jepang dengan tidak sengaja membuat masyarakat menjadi syirik dengan memaksa rakyat menduakan Tuhan yakni dengan bersujud kepada Tenno Heika dan merobah Kiblat; tidak lagi ke Mekah/Ka'bah tetapi ke Tokyo. Karena itu hukumnya wajib bagi rakyat Minangkabau untuk berjihad mengangkat senjata untuk memerangi musuh Agama mereka.

Dalam rangka itulah ulama-ulama di Minangkabau seperti Inyik Jambek dan Syekh Daud ar Rasuli "merestui" untuk berdirinya Gyu-Gun semacam tentara Pembela Tanah Air di Jawa. Gyu-Gun dianggap bukan tentara bayaran dan oleh sebab itu mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Pembentukan Gyu-Gun dipropagandakan oleh Chatib Soeleman dan Rasuna Said sebagai wakil pemuda Islam. Juga didukung oleh golongan cendekiawan seperti Mohd. Syafei dan Abdullah Dt. Rumah Panjang. Begitu juga oleh golongan ninik mamak yang tergabung dalam Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (M.T.K.A.A.M.).

Pemimpin rakyat di daerah ini mulai mempertanyakan slogan dan propaganda Jepang seperti "Asia buat bangsa Asia". Mereka telah memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi antara lain ketika Jepang telah bertekuk lutut. Melalui kampanye berbisik dan berita-berita dari surat kabar (Pedang Nippo) serta siaran radio Jepang tentang "keadaan Tentara Kerajaan" rakyat diyakinkan bahwa Jepang satu saat

akan kalah. Kekalahan Jepang cuma menunggu waktunya saja, dan itulah yang ditunggu-tunggu masyarakat. Kekalahan Jepang pada berbagai front Pasifik membuat Jepang semakin kalap melalui "Juho" atau mata-matanya pada tiap-tiap Kantor, kedai, restoran, balai-balai pertemuan, sekolah-sekolah dan tempat keramaian-keramaian. Mereka memata-matai setiap orang yang berani mengekspose berita peperangan yang merugikan pihak Jepang. Bagi yang dicurigai akan berurusan dengan "Kompetai".

Masyarakat melakukan protes secara diam. Salah satu bentuk protes mereka adalah pantun yang memang berkembang dengan suburnya di daerah ini.

Panakiak pisau sirawik
Ambiek kagalah batang lintabuang
Salodang tariak baniru
Nan satitiak jadikan lawik
Nan sakapa jadikan gunuang
Alam takambang jadi guru.

(Penakik Pisau seraut
Ambil kegalah batang lintabung
Selodang jadikan niru
Yang setitik jadikan laut
Yang sekepal jadikan gunung
Alam terkembang jadikan guru).

Jadi dianjurkan oleh pantun itu adalah dunia yang terkembang jadikan guru/pedoman. Makanya tak usah ragu lagi, Jepang sudah mulai sekarat. Satu kegemaran lain orang Minangkabau ialah main layang-layang yang biasanya dimainkan sehabis panen. Pertandingan layang-layang biasanya diadakan di sawah. Dipertandingkan antar kampung atau antar nagari. Siasat melepas layang-layang adalah mengulur benang sewaktu angin kencang dan menggulung benang sewaktu angin reda.

Konsep ini diterapkan masyarakat dalam menghadapi Jepang di daerah ini. Mereka menafsirkan konsepsi main layangan itu sebagai berikut: sewaktu Jepang keras ikuti saja dulu dan ketika mulai lunak baru ditarik. Dalam ungkapan itu mengandung arti secara lahiriah membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, tetapi pada bathinnya mempersiapkan diri untuk mencapai kemerdekaan.

Begitu pula ketika di sekolah-sekolah diajarkan nyanyian kepahlawanan Jepang. Pemuka masyarakat memberi pengertian lain, misalnya lagu "Aikoku Kosain Kyoku" (Lagu cinta tanah air) bait pertama berbunyi: *Myo to o Kai no sora akete* (Pandanglah langit fajar di laut Timur), diartikan bahwa fajar kemerdekaan telah menyinggung disebelah Timur, dan memberi pengharapan bagi bangsa. Juga sekalian alat pertahanan yang disiapkan untuk kepentingan *Dai Toa Senso* (Perang Asia Timur Raya) juga dibelokkan untuk mempersiapkan bangsa setelah Jepang menyerah. Tujuannya untuk memperoleh ilmu kemiliteran bagi pemuda-pemuda yang sewaktu-waktu diperlukan.

Karena itulah badan Gyu Gun cepat berdirinya dengan nama KOENKAI yang berkantor di Padang yang disebut (Kantor Pengurus Gyu Gun) KOENBU.

Peranan Majelis Islam Tinggi (M.I.T.) tak dapat dilupakan dalam mendorong pemuda-pemuda untuk memasuki Gyu Gun (Lasykar Rakyat). Majelis Islam Tinggi (M.I.T.) adalah lembaga para ulama seluruh Sumatra Barat untuk bermusyawarah menghadapi politik pemerintah Jepang. M.I.T. mendapat dukungan dari rakyat karena mayoritas masyarakat menganut agama Islam. M.I.T. menempatkan Mahmud Junus sebagai wakilnya pada kantor *Syu Cho Kan* (Residen) yang bertugas sebagai penasehat. Mahmud Junus adalah seorang ulama berpendidikan Mesir. Sejak zaman Belanda ia telah aktif mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti "Sekolah Normal Islam" di Padang, mengarang berbagai buku pelajaran

agama Islam dan menerbitkan Tafsir Alquran, serta aktivitas lainnya dalam bidang agama.

Pada awal pembentukan Gyu Gun, Mahmud Junus, Chatib Suleman, Rasuna Said dan Dt. Simarajo duduk dalam panitia persiapan pembentukan Gyu Gun (Ko En Kai). M.I.T. mengeluarkan fatwa bahwa mempelajari ilmu kemiliteran dianjurkan dalam agama Islam dalam rangka membela tanah air. Di sini terlihat bahwa pengaruh golongan adat/ninik, mamak, cendekiawan, dan ulama sangat diperlukan kekuatan kolonial untuk melaksanakan satu kebijaksanaan. Satu fatwa yang dikeluarkan ulama umpamanya sangat berharga sebagai bekal dalam menghadapi revolusi Kemerdekaan. Fatwa yang telah dikeluarkan oleh M.I.T. berbunyi "bahwa berjuang dalam mempertahankan agama, bangsa dan tanah air adalah perjuangan suci; siapa yang gugur dalam perjuangan ini akan mati syahid".

Rakyat Minangkabau yang sebelumnya tidak begitu tertarik menjadi tentara, karena fatwa para ulama menyediakan diri untuk menjadi serdadu, walaupun tidak dibayar. Dalam waktu yang relatif singkat sikap mereka berubah. Menjadi tentara bagi mereka bukan lagi membela kepentingan penjajah seperti dahulu zaman penjajahan Belanda, melainkan menjadi Lasykar Rakyat yang berjuang untuk rakyat dan dihidupi rakyat.

Guna melancarkan penerimaan Gyu Gun tiap-tiap Kabupaten dan Kota didirikan Kantor Cabang bahkan sampai ke negari-negari. Para petugas penerimaan biasanya terdiri dari tokoh-tokoh setempat.

Seperti telah dijelaskan bahwa Gyu Gun adalah Lasykar Rakyat dan secara resmi tidak digaji pemerintah Jepang. Memang pada mula didirikan para pimpinan rakyat Sumatra Barat menghendaki agar Lasykar Rakyat tidak dibiayai oleh Jepang. Karena Gyu Dun dianggap bukan sebagai tentara profesional. Rakyat Sumatra Barat hanya menginginkan suatu

Lasykar pembela tanah air dan agama yang dibiayai oleh rakyat sendiri.

Untuk mengurus masalah perbekalan dibentuk lagi suatu badan pengasuh yang terdiri Kaum Ibu. Badan ini juga mempunyai cabang-cabang di kabupaten/daerah serta di berbagai kota-kota di Sumatra Barat. Tugasnya mengumpulkan beras genggaman dari tiap-tiap rumah, dan bantuan yang diberikan oleh keluarga Gyu Gun. Pada latihan Gyu Gun angkatan pertama diikuti oleh putera-putera ulama, penghulu/ninik mamak dan kaum cerdik pandai di Minangkabau. Di sinilah Bukittinggi menerima fungsi baru. Seperti telah diketahui bahwa Bukittinggi pada masa pendudukan Jepang merupakan Kota yang penting di seluruh Sumatra. Selain sebagai pusat pemerintahan militer untuk Sumatra, juga menjadi pusat latihan pasukan Gyu Gun. Pemuda-pemuda yang lulus dalam pemeriksaan badan kemudian pada tanggal 4 Oktober 1944 buat pertama kali menjalani latihan di asrama Bukit Ambacang di pinggir kota Bukittinggi.

Para pengasuh/pendiri Gyu Gun berhasil mengumpulkan tenaga dan kekuatan yang diperlukan. Setelah angkatan pertama, rombongan berikutnya terdiri dari berbagai lapisan masyarakat seperti guru-guru partikelir, tenaga koperasi dan perusahaan-perusahaan. Dibalik minat yang besar untuk memasuki Gyu Gun itu, dibelakang agar para tokoh pendirinya menyelipkan tujuan lain sebagai mendidik pemuda Indonesia untuk menjadi dasar tentara Indonesia di masa depan.

Salah seorang pengasuh/pembina Gyu Gun terkemuka seperti Chatib Suleman pernah berkata kepada salah seorang teman akrabnya. "Kepala kita akan bercerai dengan badan manakala Jepang dapat mencium cita-cita kita ini".

CATATAN BELAKANG BAB VI

1. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau 1945 – 1950* (Djakarta, B.P.S.I.M, 1980) halaman 68.
 2. Ali Audah (ed), *Memoir Mohammad Hatta, Jakarta, Tintamas, 1979*, halaman 415.
 3. George Mc. Turnan Kahim, *Gouvernment and Politics of Southeast Asia*, (Ithaca New York Cornell University Press, 1959) halaman 172.
 4. George S, Kanahele, *The Japanese Occupation of Indonesia; Prehide to Independence*, (Ph.D. thesis, cornell university, 1967), halaman 62.
 5. Drs. M.D. Mansur Cs, *Sejarah Minangkabau*, (Djakarta, Bharatara, 1970), halaman 219.
-

B A B VII

SUATU TINJAUAN SOSIAL POLITIK KOTA BUKITTINGGI DALAM MASA REVOLUSI

1. Sumatra Barat di sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945

Radio Sumatra yang berpusat di Bukittinggi sejak tanggal 15 Agustus 1945 tidak lagi mengudara. Heiho dan Gyu Gun telah dilucuti dan disuruh pulang ke tempat masing-masing. Pada tiap-tiap kantor Jepang sibuk membakar dokumen-dokumen dan barang-barang yang dirasa tidak perlu. Seluruh penguasa Jepang terlihat lesu dan sedih. Rakyat melihat dengan keheheranan. Semuanya kemudian menjadi jelas setelah diterimanya berita Proklamasi.

Seorang pegawai P.T.T. Bukittinggi Ahmad Basya yang berada di kantor berita Domei pada malam tanggal 17 Agustus 1945 menangkap berita Proklamasi itu. Berita tersebut kemudian diketik rangkap sepuluh oleh Asri Aidid gelar St. Rajon Sati dan secara berhati-hati diselundupkan keluar dan ditempelkan di tempat-tempat penting di Bukittinggi pada malam itu juga. Pagi harinya berita Proklamasi tersebut sudah dibaca oleh beberapa orang dan secara berbisik-bisik menyebar dari mulut ke mulut. Adinegoro yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris *Chuo Songi In* juga menerima berita itu. Adinegoro rupanya agak ragu-ragu untuk menyebarkannya. Sedangkan suasana mengharuskan untuk bertindak cepat. Sekelompok pemuda mendatangi Adinegoro pada malam tanggal 18 Agustus 1945 dan meminta kembali surat Kawat berita Proklamasi itu dan keesokan harinya diserahkan kepada Mohd. Syafei. Sorenya beliau berangkat ke Padang Panjang dan langsung mengadakan pertemuan di rumah Dr. Rasyidin yang dihadiri antara lain oleh Khatib Suleman. Setelah didiskusikan, diputuskan untuk memperbanyak berita itu agar bisa disebar-luaskan pada masyarakat.

Masyarakat menyambut berita Proklamasi dengan berbagai sikap. Sebagian menerima dengan gembira, sebagian ragu-ragu dan sebagainya. Sebagian pemuda menganjurkan untuk mengibarkan bendera "Sang Saka Merah Putih" pada tiap-tiap rumah penduduk sebagai tanda bahwa bangsa Indonesia telah merdeka.

2. Berdirinya Komite Nasional Indonesia Daerah (K.N.I.D.) dan pengangkatan Residen Sumatra Barat

Seperti juga di Bukittinggi, sejumlah pemuda di Padang setelah menerima berita Proklamasi segera mengadakan aksi-aksi. Pada tanggal 25 Agustus 1945 di Pasar Gadang Padang beberapa pemuda berhasil mendirikan Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI). Organisasi ini diketuai oleh Ismael Dengah yang bertugas untuk memberi penjelasan kepada siapa saja yang memerlukannya tentang Proklamasi dan perjuangan selanjutnya. B.P.P.I. ini juga berhasil mensponsori pemilihan pejabat Residen Sumatra Barat, yang kemudian dijabat oleh Mohd. Syafei. Mohd. Syafei menerima pilihan itu setelah mengadakan serangkaian konsultasi dengan beberapa tokoh terkemuka saat itu seperti Chatib Suleman dan Anwar Sutan Saidi. Setelah ada kesepakatan tentang penunjukan Residen Mohd. Syafei, tanggal 26 Agustus 1945 diadakan pertemuan lebih luas. Pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan masyarakat dan pemuda bertempat di Kantor Hokokai Sumatra Barat di Muara (Padang). Hal yang penting dibicarakan adalah:

1. Penyebaran berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah Sumatra Barat.

Sehubungan dengan pokok pertama disusun "Pernyataan" dukungan oleh rakyat Sumatra terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945, lengkapnya teks itu berbunyi:

Permakloeman
Kemerdekaan Indonesia

Mengikoeti dan mengoeatkan pernjjataan Kemerdekaan Indonesia seperti Proklamasi pemimpin-pemimpin besar kita Soekarno — Hatta atas nama Bangsa Indonesia seperti berikoet:

Proklamasi

Kami Bangsa Indonesia dengan ini menjatakan

Kemerdekaan Indonesia

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekoeasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Djakarta
Hari 17 boelan 8 tahoen 1945
Atas nama Bangsa Indonesia

Soekarno — Hatta

Maka kami Bangsa Indonesia di Soematra dengan ini mengakoei Kemerdekaan Indonesia seperti dimaksud dalam Proklamasi di atas dan mendjoendjoeng keagoengan kedoea pemimpin Indonesia itoe.

Boekittinggi hari 29 boelan 8 tahoen 1945
Atas nama Bangsa Indonesia di Soematra

Moehammad Syafei

Pernyataan dukungan tersebut diperbanyak dan disebarakan. Tugas selanjutnya adalah mempersiapkan aparat-aparat pemerintahan daerah. Selain itu badan legislatif yang akan mendampingi pemerintah daerah itu perlu juga dipikirkan.

Pembicaraan mengenai Komite Nasional, didasarkan kepada kawat dari Jakarta tentang hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), khususnya pembicaraan mengenai pembentukan Komite Nasional Daerah. Dalam pertemuan tersebut diputuskan pula untuk membentuk Komite Nasional Daerah (KNID) Sumatra Barat dengan susunan pengurus:

Ketua	: Muhammad Syafei
Ketua I	: R. Dt. Perpatih Beringek
Ketua II	: Dr. M. Jamil Dt. Rangkyo Tuo
Setiausaha/Bendahara	: Mr. St. Muhammad Rasyid.

Beberapa anggota pengurus lainnya:

1. Bagian Persatuan dan Pendidikan :
 - Mr. Nasroan dan Saaduddin Jambek
2. Badan Penolong Keluarga Korban Perang :
 - Khatib Suleman, Ismael Lengah, Suleman, H.A. Wahab Amin, dr. Nazruddin dan Burhanuddin.
3. Badan Keamanan Rakyat :
 - Ismael Lengah, Ahmadin, Dt. Berbangsa, Sulaiman, Rd. Sulaiman.
4. Kesejahteraan Rakyat :
 - Dt. Majo Urang, Umar Marah Alamsyah, Dr. Atos Ansri, Mr. Nazaruddin.
5. Kaum Ibu :
 - Rky. Dt. Tumenggung, Syamsidar Yahya, Zubaidah Munar, Hapilah Lanjunin.

Buat sementara K.N.I.D. berkantor di Pasar Gadang di kantor Persatuan Saudagar Indonesia, karena bekas Kantor *Seikai Ganshu Hokokai* direncanakan sebagai Kantor Residen. Semenjak selesai pembentukan K.N.I.D. tersebut anggota-anggota berpecah ke seluruh Sumatra Barat untuk membentuk K.N.I. cabang di tingkat kewedanan serta K.N.I. ranting.

Pada Sidang Pleno K.N.I.D. tanggal 1 Oktober 1945 bertempat di Pasar Gedang yang membicarakan sekitar Jabatan Residen Sumatra Barat, terpilih Mohd. Syafei sebagai Residen R.I. Sumatra Barat yang pertama. Keputusan K.N.I.D. Sumatra Barat masih memerlukan penetapan/pengesahan dari pemerintah pusat. Baru secara resmi surat ketetapannya, keluar tanggal 8 Oktober 1945 oleh Gubernur Sumatra atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

Setelah terpilih Residen, K.N.I.D. mengadakan Sidang Pleno ke II (4 sampai dengan 5 Oktober 1945). Sidang memutuskan bahwa segala golongan dan aliran dalam masyarakat harus mempunyai wakil dalam K.N.I.D. Dan dibentuk pula satu Komisi untuk mendaftarkan orang-orang yang patut duduk dalam K.N.I.D., sehingga K.N.I.D. betul-betul mencerminkan seluruh golongan masyarakat. Hasil dari penunjukan Komisi adalah penambahan 39 orang baru menjadi anggota K.N.I.D. sehingga semuanya berjumlah 80 orang.

Selanjutnya dengan dikeluarkan maklumat Wakil Presiden No. X/45 tentang fungsi legislatif KNIP dan Badan Pekerja KNIP, serta undang-undang No. 1/1945 tentang Komite Nasional Indonesia Daerah, maka KNI daerah harus dipisahkan dari Pemerintah Daerah.

Sebelum MPR dan DPR terbentuk Komite Nasional Indonesia Pusat disertai kekuasaan Legislatif dan ikut menetapkan garis-garis haluan negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari berhubungan dengan pentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung-jawab kepada K.N.I.P.

Dengan keluarnya Maklumat itu maka Gubernur Sumatra mengadakan penyesuaian untuk K.N.I.D. dan mengirim surat kawat ke daerah-daerah yang isinya:

1. Ketua K.N.I. Daerah tidak boleh memimpin pemerintahan dalam daerahnya.

2. K.N.I. Daerah harus diperkuat sebagai badan jelmaan keamanan rakyat.
3. Dalam K.N.I. mesti lengkap masuk segala lapisan dan golongan rakyat. Dalam K.N.I. mesti ada Wakil dari pamongpraja, Polisi dan pegawai, Serikat sekerja, Koperasi dan orang politik yang terkemuka.
4. Buat sementara K.N.I. harus merupakan Badan Perwakilan yang membantu pekerjaan pemerintah.

Karena instruksi itu maka diadakan rapat pleno K.N.I. Sumatra Barat, di mana diangkat ketua baru untuk menggantikan Mohd. Syafei yang telah dipilih sebagai Residen.

Sebagai Ketua dimufakati Dr. Jamil Dt. Rangkayo Tuo.

Wakil Ketua I : Mr. St. Mohd. Rasyid

Wakil Ketua II : Mr. Nasrun.

Selanjutnya jumlah anggota ditambah lagi menjadi 107 orang. Lengkapnya para anggota terdiri dari golongan Pamongpraja, Kepolisian, Pegawai, Serikat Sekerja, Badan-badan Koperasi, Partai Politik, Kaum Adat, Golongan Agama, Badan Perekonomian, Kaum Ibu, Kaum Tani, Para Guru, Kaum Wanita, Kaum Pelaut, Pemuda, Pekerja Ombilin, Pekerja D.K.A. dan 40 orang anggota yang mewakili Kewedanaan.

Pada pemerintahan yang ke II Residen Sumatra Barat yang dipilih dalam rapat K.N.I.D. tanggal 15 Nopember 1945 Rusad Dt. Perpatih Baringek menggantikan Mohd. Syafei, terjadi beberapa perkembangan yang penting pula dalam lembaga K.N.I.D. Dalam Sidang Pleno ke IV K.N.I.D. telah diputuskan:

1. Pembentukan Dewan Harian dan Dewan Eksekutif, yang diketuai oleh Dr. Jamil Dt. Rangkayo Tuo dengan anggota: Bachtaruddin, Syarif Usman, Marzuki Jatim, Darwis Thaib, Usman Keadilan, Abdullah Kamil, Saolat Mangkuto dan Dewan Eksekutif terdiri:

Ketua : Residen
Wakil : Mr. St. Moh. Rasyid
Anggota : Mr. Nasrun, Khatib Suleman, Anwar St. Saidi dan Abdullah.

2. Memilih 20 anggota yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Sumatra.
3. Menunjuk Mr. Nasrun untuk duduk di Komite Nasional Pusat.
4. Selain itu pleno mengusulkan kepada pemerintah antara lain:
 - a. Mengatur distribusi bahan makanan.
 - b. Membentuk pejabat Penerangan, pejabat Sosial dan pejabat Agama.
 - c. Mengatur bakti-bakti dari rakyat.
 - d. Mengatur pembelanjaan T.R.I. dan mengambil over barisan ke T.R.I.
 - e. Mengatur pengangkutan bermotor.

Selanjutnya dalam rangka koordinasi dan kerjasama K.N.I., maka tanggal 23 Januari 1946 K.N.I. Sumatra Barat mengeluarkan Maklumat sebagai berikut:

Oleh karena K.N.I. sekarang sudah mulai merupakan Dewan Perwakilan Rakyat, maka tiap-tiap usul, atau permohonan atau ketentuan dari rakyat hendaklah disampaikan dengan perantaraan:

1. Anggota K.N.I. Sumatra Barat, jika mengenai Sumatra Barat.
2. Anggota K.N.I. Kewedanan, jika mengenai Kewedanan.
3. Anggota K.N.I. Negeri, jika mengenai Negari.

Pada sidang Pleno K.N.I. ke V (14 sampai dengan 16 Maret 1946) ditetapkan bahwa di Sumatra Barat ada tiga tingkatan D.P.R. yakni: Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra Barat, Dewan Perwakilan Kota dan Dewan Perwakilan Negari. Untuk menyusun rencana peraturan rumah tangga dan cara pemilihan

anggota Dewan dibentuk satu panitia dari Adinegoro Jamin Dt. Bagindo, H. Basyrah Lubis. Dan dalam sidang pleno ke V ini juga para anggota mengusulkan Dr. Djamil Dt. Rangkayo Tuo menjadi Residen Sumatra Barat menggantikan Residen M. Rusyad Dt. Perpatih Baringek yang diperbantukan pada kantor Gubernur Sumatra Utara di Medan.

Sejalan dengan pergantian Residen, maka Dewan Harian dan Dewan Eksekutif juga mengalami perubahan:

Dewan Eksekutif :

Ketua	: Residen
Wakil Ketua	: Mr. M. Nasrun
Anggota	: Marzuki Yatim, Syarif Said, B.M. Thahar, Aziz Khan dan Sidi Baharudin.

Dewan Harian terdiri dari :

Ketua	: Mr. M. Nasrun
Wakil Ketua	: Rustam Thaib
Anggota	: M. Mahmud Junus, Abdullah.

Badan ini dilengkapi dengan bagian Kebudayaan, Perjuangan, Sosial dan Ekonomi. Dengan dikeluarkan Maklumat Gubernur Sumatra No. 8/M.G.S. yang antara lain menyatakan:

1. K.N.I.D. dijadikan Badan Perwakilan Daerah dan bersama-sama dengan Dewan Eksekutif dan dipimpin Kepala Daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Peraturan yang luas darinya.
2. Oleh K.N.I.D. dipilih beberapa orang, sebanyak-banyaknya 5 orang sebagai badan Eksekutif dan bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pemerintahan sehari-hari dalam daerah itu.
3. Selanjutnya Ketua K.N.I. yang lama harus diangkat sebagai Wakil Ketua Badan Perwakilan ini dan jika tidak

ada Ketua lama, maka Wakil Ketua harus dipilih oleh K.N.I. sendiri.

Dalam rapat antara Dewan Eksekutif dan Dewan Harian pada tanggal 27 April 1946 diputuskan mulai saat itu Dewan Harian dihapus sedangkan Dewan Eksekutif diroboh susunannya menjadi:

Ketua : Dr. M. Jamil Dt. Rangkyo Tuo (Residen).
Wakil Ketua : Marzuki Yatim
Anggota : Aziz Khan, Syarif Said dan B.M. Thahar.

Pada periode pemerintahan Residen Dr. Jamil Dt. Rangkyo ketegangan/bentrokan antara R.I. dan Belanda semakin memuncak dan beliau terkenal anti kompromi. Ucapan beliau yang termasyhur: "apa saja yang berbau anti Republik, lipat saja".

Satu hal yang perlu dicatat pada masa pemerintahan Residen Dr. Jamil ialah "pendemokrasian pemerintahan negari". Ditetapkan pemerintahan negari terdiri dari 3 unsur:

1. Kepala Negari
2. Dewan Perwakilan Negari (dipilih langsung)
3. Dewan Harian Negari (dipilih secara tak langsung).

Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Negari dilakukan serentak pada tanggal 25 Juni 1946 dan pemilihan Wali Negari pada tanggal 10 Juli 1946. Semua Keputusan di atas dituangkan dalam Maklumat Residen Sumatra Barat No. 20/46, No. 21/46 tanggal 21 Mei 1946. Juga dalam masa pemerintahan Dr. Jamil keluar keputusan Gubernur Sumatra No. 143 tertanggal 2 Juli 1946. Keputusan tersebut dilandasi oleh keputusan rapat Dewan Perwakilan Sumatra yang diadakan dari tanggal 17 April sampai dengan 19 April 1946. Dalam keputusan itu ditetapkan propinsi Sumatra dibagi atas 3 sub propinsi yaitu:

1. Sub propinsi Sumatra Utara
2. Sub propinsi Sumatra Tengah
3. Sub propinsi Sumatra Selatan.

Masing-masing sub propinsi dikepalai oleh Gubernur Muda. Untuk Sub propinsi Sumatra Tengah Gubernur Mr. Teuku Moh. Hasan menunjuk Dr. Jamil Dt. Rangkayo Tuo sebagai Gubernur Muda.

Pada rapat pleno K.N.I.D. ke VII di Padang Panjang terpilih pengganti Dr. M. Jamil yaitu Mr. St. Moh. Rasyid jadi Residen Sumatra Barat yang sebelumnya menjabat wakil Ketua K.N.I.D. (1946).

Sidang juga mengganti anggota Dewan Eksekutif yang meletakkan jabatan dengan anggota yang baru. Dengan eksekutif yang baru bersifat Koalisi, terdiri dari:

1. Marzuki Yatim Wakil Ketua K.N.I. Sumatra Barat.
2. I. Tejasukmana dari fraksi Sosial.
3. Aziz Khan dari fraksi Agama.
4. R.O. Ganto Suaro dari fraksi Nasionalis.
5. Syofyan dari fraksi golongan ekonomi.
6. Sidi Bakaruddin dari fraksi golongan Pemuda dan Teknik.

Permulaan dari pemerintahan Residen yang ke 4 ini ditandai oleh situasi perjuangan yang makin memuncak dan ibukota keresidenan di Padang tak aman lagi. Pihak sekutu bersama Nica semakin mengganas meningkatkan tekanannya terhadap Republik dan berusaha untuk meluaskan wilayahnya. Dan mereka berusaha mengambil berbagai kantor pemerintahan dan menurunkan bendera Merah Putih dan bahkan berani menahan Residen M. St. M. Rasyid sendiri. Akibat keadaan semakin genting maka kantor-kantor jawatan dan kantor Residen dipindahkan ke Bukittinggi. Sehingga Bukittinggi menjadi pusat pemerintahan Sumatra Barat. Satu hal kecil yang perlu dicatat bahwa Ulang Tahun I Republik Indonesia dirayakan dengan meriah buat pertama kalinya di Bukittinggi.

3. Terbentuknya barisan Keamanan Rakyat (B.K.R.)

Mengenai pembentukan Badan Keamanan Rakyat ditetapkan antara lain bahwa badan ini adalah satu bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang, sebagai induk organisasi yang harus mengerjakan dan memelihara keselamatan masyarakat. Yang mengepalai Badan Keamanan Rakyat mulai dari pusat sampai daerah-daerah menjadi Pengurus Harian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang dan yang mengepalai (B.K.R.) tersebut harus menjalankan kepercayaan dengan sukarela. Pada tanggal 23 Agustus 1945 keputusan itu diwujudkan dalam bentuk Seruan Presiden agar Peta, Heiho, prajurit pelaut serta pemuda lain yang penuh dengan semangat pengorbanan masuk dan bekerja dalam Keamanan Rakyat.

Seruan Presiden tersebut di Sumatra Barat dilaksanakan setelah K.N.I.D. itu memutuskan akan membentuk B.K.R. dan telah ditetapkan anggota-anggota yang akan mengelolanya. Karena dirasa keputusan tersebut tak sesuai dengan situasi pada saat itu maka dalam rapat tanggal 2 September 1945 pengurus B.K.R. disempurnakan susunannya:

Penasehat : A. Dt. Berbangso dan R. Suleman
Pengurus : Jamalul Yahya (Ketua), Marah M. Thaher,
Ismail Lengah, S.Y. St. Mangkuto, H. Sirajuddin Abbas dan ditambah dengan 24 anggota lainnya.

Seiring dengan pembentukan K.N.I. di daerah maka diserukan pula untuk daerah Sumatra Barat, seruan K.N.I.D. ini tak mengalami rintangan apa-apa, sebab B.P.P.I. sesungguhnya telah mengandung jiwa dan semangat seperti yang dicantumkan dalam maklumat Presiden tanggal 23 Agustus 1945. Karena itu dapat dikatakan lama sebelum B.K.R. berdiri di Sumatra Barat embryo-embrionya telah ada dalam tubuh B.P.P.I.

Sebab itu ketika instruksi diturunkan pemuda-pemuda yang berasal dari Heiho, Gyu Gun, Seinendan dan lain-lain masuk ke dalam B.K.R. sedangkan sebagian lainnya tetap ter-

gabung dalam B.P.P.I. Pembentukan B.K.R. ini tak hanya terbatas pada pusat B.P.P.I. Padang saja, tetapi juga sampai ke-wedanaan dan negari-negari, karena di mana-mana cabang B.P.P.I. bergerak seperti halnya dengan yang di Padang. Dalam proses pembentukan B.K.R. dari daerah-daerah sampai dengan kekenegarian sangat besar jasanya bekas perwira-perwira Gyu Gun dan Heiho. Latar belakang dari kegiatan mereka ini, telah bermula dari zaman Jepang seperti diketahui kepada para Gyu Gun selalu dipompakan semangat dan jiwa nasional. Sebab itu ketika Jepang menyerah dan menerima ultimatum dari Sekutu maka di Sumatra Barat rencana pertama Jepang ialah membubarkan Gyu Gun dan melucuti senjata mereka. Setelah Gyu Gun dilucuti dan dibubarkan beberapa bekas perwiranya seperti Dahlan Jambek, Ismael Lengah, Syarif Usman, A. Thalib yang masih berada di Padang mengadakan rapat. Dalam rapat itu diputuskan bahwa anggota Gyu Gun harus bersatu pada saat perjuangan bangsa membutuhkan tenaga mereka. Untuk mengorganisir para bekas Gyu Gun ditetapkan:

1. A. Thalib untuk daerah Kerinci/Pesisir Selatan.
2. Dahlan Ibrahim untuk daerah Tanah Datar.
3. Dahlan Jambek untuk daerah Agam.
4. Syarif Usman untuk daerah Muara Labuh/Solok.
5. Ismael Lengah untuk daerah Padang dan sekitarnya.

Mereka kemudian pergi ke daerah yang telah ditunjuk untuk masing-masing mereka. Jika dilihat spontanitas para Gyu Gun serta susunan B.K.R. kemudian *bukan suatu kebetulan jika bekas-bekas* Gyu Gun menduduki posisi penting dalam masa perjuangan kemerdekaan.

Sebagai Koordinator dari B.K.R. diangkat Ismael Lengah, dan pimpinan B.P.P.I. diserahkan kepada Sulaiman. Dalam rangka tugas yang baru Ismael Lengah selaku Koordinator berkunjung ke daerah-daerah dan memberikan latihan-latihan kepada para pemuda. Untuk membentuk B.K.R. kewedanaan KNI - KNI turut berpartisipasi menunjuk atau merestui orang-

orang yang bertugas membentuk BKR-BKR tersebut. Perlu dicatat nama-nama yang telah berjasa dalam hal ini seperti : Makinuddin, Anwar dan Nurmatias di Payakumbuh, Mahyuddin Tonek di Pariaman, Zainal Arifin di Sijunjung, Mustafa Kamal, Ramli Dahlan, Anas Kasim di Padang Panjang, Dahlan Jambek di Bukittinggi, Dahlan Ibrahim di Batusangkar, Kamal Mustafa di Pasar Usang, Ahmad Husen, Anwar Badu, Yusuf Ali di Padang dan Alwi St. Marajo di Painan dan lain-lainnya.

Salah satu syarat dari suatu negara yang telah merdeka dan mempunyai pemerintah harus ada tentara yang resmi. Maka untuk maksud tersebut, perubahan B.K.R. menjadi T.K.R., T.R.I. dan seterusnya T.N.I., juga dialami oleh Sumatra Barat.

BUKITTINGGI DALAM GERAK PERJUANGAN KEMERDEKAAN

1. Terbentuknya Pemuda Republik Indonesia (P.R.I.) di Bukittinggi

Seperti juga di kota Padang dan kota-kota lainnya di Sumatra Barat, di Bukittinggi setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 para pemuda bergerak menyambut berita proklamasi. Pada mulanya belum terkoordinir, tetapi tujuannya sama yaitu berjuang mempertahankan Kemerdekaan Negara RI yang baru diproklamlirkan.

Beberapa tokoh pemuda mengambil prakarsa membentuk organisasi pemuda yang dapat memberi pimpinan dan arah kepada para pemuda dalam bertindak. Pemuda Nusyirwan, Zainal Zainur dan beberapa pemuda lainnya tanggal 21 Agustus 1945 bertempat di Kantor Majelis Islam Tinggi/Surau Syekh Jamil Jambek di Bukittinggi mengadakan pertemuan. Nusyirwan sebagai salah seorang pemuda dari Jawa memberi pengarahan tentang kewajiban serta peranan pemuda dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan tanah air.

Empat hari sesudah itu di kantor Perseroan Dagang Bumi putra jalan Tembok No. 32 (Bukittinggi) dilanjutkan dengan rapat pembentukan organisasi pemuda. Rapat ini dihadiri oleh wakil-wakil organisasi Kepanduan, Hizbulwathan, P.M.I. Siap dan organisasi pemuda H.P.P.I. yang pada masa pendudukan Jepang tak boleh bergerak. Pada rapat yang kedua ini terbentuklah organisasi Pemuda Indonesia (P.I.) di Bukittinggi yang kemudian menjadi Pemuda Republik Indonesia (P.R.I.) meliputi kota Bukittinggi dan Agam Tua. Pemuda Indonesia ini dipimpin oleh: Ketua I: Mara Karma dan Ketua II: Sabaruddin Syamsuddin, Sekretaris: Adlinsyah Jeni dan Syofyan Tamar serta beberapa anggota pengurus lainnya. Segera sesudah ini didirikan cabang serta ranting-ranting P.R.I. di kota Bukittinggi dan Agam Tua. Aktivitas gerakan mulai dilancarkan tidak saja memberi penerangan tentang situasi tanah air pada saat itu, tetapi yang penting ialah mengobarkan semangat perjuangan rakyat, memelopori tindakan pengambil-alihan gedung-gedung pemerintahan yang masih dikuasai Jepang, merampas mobil-mobil dan senjata dari tangan Jepang bagi keperluan perjuangan serta menjaga keamanan di kampung serta desa. Atas desakan para pemuda maka guru Bermawi ditunjuk sebagai pejabat Walikota Bukittinggi yang pertama.

2. Terbentuknya "Badan Keamanan Rakyat" Bukittinggi

Dalam rangka mengkonsolidasi tenaga perjuangan di seluruh Sumatra Barat pada umumnya yang dipelopori oleh bekas opsir Gyu Gun, dibentuk Badan Keamanan Rakyat (B.K.R.). Dan di Bukittinggi dibentuk pula B.K.R. yang dipimpin oleh Dahlan Jambek bekas Letnan I gyu Gun. Setelah terbentuknya B.K.R. ini secara berangsur terhimpun kembali bekas anggota Gyu Gun, Seinendan dan Heiho dan pemuda-pemuda lainnya di dalam suatu badan yang terorganisir, bukan saja berasal dari Bukittinggi juga dari daerah sekitarnya. Pada mulanya B.K.R. Bukittinggi ini baru terbentuk kelompok-kelompok kecil dan baru kemudian disusun menurut

hierarchi kemiliteran. Karena jumlah anggota semakin bertambah banyak, kemudian ditempatkan pada beberapa asrama dalam kota Bukittinggi seperti di Surau Pinang, Kampung Pulasan dan Ujung Karang. Persenjataan B.K.R. diperoleh dari berbagai cara, ada yang berasal dengan merampas senjata Jepang, dibeli atau tukar dengan barang-barang keperluan lainnya.

3. Aksi pengibaran Sang Saka Merah Putih di puncak Jam Gadang Bukittinggi dan aksi lainnya.

Seperti telah diketahui bahwa kota Bukittinggi merupakan salah satu Kota yang penting di Sumatra Barat pada masa pendudukan Jepang. Rakyat di kota dan di daerah sekitarnya menyambut Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan penuh semangat. Salah satu aksi mereka adalah mengibarkan bendera Merah Putih di tiap-tiap rumah, bendi-bendi, mobil, topi/kopiah dan bahkan pakaian ditemplei dengan merah putih. Kelompok-kelompok pemuda bersenjata mulai bermunculan seperti dari Tarok yang dipimpin oleh kepala premannya (jagoannya). Para pemuda dari berbagai kampung mengumpulkan senjata yang ada seperti: "badia balansa" (bedil buatan sendiri), pistol, granat, pedang, tombak dan rudus serta lainnya dalam rangka bersiap untuk berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan.

Pemuda-pemuda Bukittinggi belum puas dengan pengibaran Sang Saka Merah Putih di rumah-rumah dan di kendaraan-kendaraan saja. Mereka menginginkan agar bendera Merah Putih dapat pula berkibar di tempat yang paling tinggi dalam kota Bukittinggi, yaitu di puncak Jam Gadang (Jam Besar). Untuk melancarkan rencana tersebut masa rakyat dikerahkan dari negeri-negeri sekitar Bukittinggi seperti: Sungai Puar, Tilatang Kamang, Baso, Tanjung Alam, Matur, Kota Gadang, Sianok dan lain-lain. Sambil berjalan mereka meneriakkan "Merdeka".

Tentara Jepang yang berada di Bukittinggi telah berjaga-jaga di dalam kota dan di sekitar Jam Gadang dengan sangkur terhunus. Pada saat kritis dan yang menegangkan itu diadakan perundingan kilat dengan penguasa Jepang. Pihak rakyat (Republik) diwakili oleh Mara Karma, dan dihadiri para pemimpin lainnya seperti Dahlan Jambek, Abd. Halim, Iskandar Teja Sukmana dan beberapa tokoh masyarakat lainnya. Akhirnya massa rakyat berhasil juga mengibarkan bendera Merah Putih pada puncak "Jam Gadang" yang diiringi sorak sorai dan pekik "Merdeka". Dengan telah berkibarnya bendera Merah Putih di atas Jam Gadang itu rakyat merasa bahwa Jepang resmi kalah dan Indonesia menang (merdeka).

Suatu insiden terjadi pula beberapa hari sesudah itu dengan tiga orang Belanda yang baru datang dari Pekan Baru di stasiun kereta api Bukittinggi. Mereka dengan memakai nama Sekutu berusaha mencoba menaikkan bendera Belanda, tetapi para pemuda dapat menghalangi usaha ketiga orang Belanda tersebut. Dalam waktu singkat para pemuda datang membanjiri stasiun, membawa senjata apa saja untuk mengeroyok orang Belanda itu. Untung datang Dahlan Jambek yang berhasil meredakan luapan kemarahan para pemuda dan Bendera Merah Putih tetap berkibar di Stasiun Bukittinggi. Ketiga orang Belanda yang menjadi penyebab insiden itu diantarkan ke Hotel Centrum (Hotel Merdeka).

Jika situasi dalam kota Bukittinggi relatif tenang, tidak demikian halnya di Sungai Tenang yakni satu kampung di Padang Luar, di luar kota Bukittinggi. Pemuda yang tergabung dalam P.R.I. Padang Luar yang akan menaikkan bendera Merah Putih di pabrik Kertas yang ada di situ dihalangi oleh pasukan Jepang. Pemuda datang beramai-ramai seakan-akan hendak mengepung pabrik tersebut. Mereka membawa senjata tajam, pistol, senapan dan granat. Karena melihat situasi yang tidak menguntungkan, tentara Jepang berusaha untuk mempertahankan diri dan mengancam akan meledakkan pabrik jika pemuda terus maju. Pemuda merasa kewalahan dan me-

nelpon ke Bukittinggi, meminta agar P.R.I. Bukittinggi turun tangan. Akhirnya pimpinan pemuda Bukittinggi Mara Karma dapat mencapai kata sepakat dengan Jepang di mana "Sang Saka Merah Putih" dapat dikibarkan sampai jam 06.00 sore dan keselamatan Jepang yang ada di sana dijamin oleh rakyat.

4. Bukittinggi basis perjuangan di daerah

- a. Untuk mendapatkan senjata pemuda-pemuda Bukittinggi yang dipimpin oleh Dahlan Jambek berangkat ke Lubuk Sikaping, di utara Bukittinggi. Tujuannya untuk merebut senjata dari Jepang. Di tempat ini terjadi pertempuran. Dalam pertempuran itu pemuda Lubuk Sikaping dan daerah sekitarnya seperti Talu juga turut membantu. Pencarian senjata juga dilaksanakan di Perkebunan Ophir dan di sini berhasil memperoleh 4 buah senapan.

b. Pertempuran di Sungai Tanang

Setelah insiden bendera, Sungai Tanang juga menjadi tempat pertempuran. Pertempuran ini terjadi di pabrik Kertas Sungai Tanang yang ditempati pasukan Jepang. Dalam pertempuran ini gugur seorang pemuda, bekas Gyu Gun Bukittinggi dan dimakamkan di pemakaman Aur Kuning di Bukittinggi. Sedangkan dipihak Jepang gugur sembilan orang.

Pertempuran Sungai Tanang itu memberi kesan yang mendalam kepada pejuang, bahwa pemuda Indonesia dapat juga mengimbangi bangsa asing yang pernah menjajah mereka. Hal tersebut menambah keyakinan dan kepercayaan para pemuda dalam perang kemerdekaan selanjutnya.

5. Masalah Volksfront (Persatuan Perjuangan)

Pembentukan badan-badan baru untuk memperlancar jalannya perjuangan terus dilaksanakan di samping barisan-barisan telah ada. Sementara itu atas prakarsa Ibrahim gelar Tan Malaka pada permulaan tahun 1946 di Solo didirikan Volksfront (Persatuan Perjuangan). Gerakan ini terkenal de-

ngan program 7 pasalnya yang dipakai sebagai dasar perjuangan.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan di Jawa di Sumatra Barat dibentuk pula Volksfront. Jika di Jawa Volksfront dibentuk atas prakarsa pemimpin-pemimpin terkemuka dan tokoh partai, maka di Sumatra Barat Volksfront dibentuk oleh K.N.I.D. Di sini terlihat bahwa anggota K.N.I.D. tidak banyak mengetahui tentang keadaan di Jawa waktu itu.

Pada tanggal 14 Maret di Bukittinggi diadakan rapat yang dihadiri oleh Gubernur Sumatra, Residen Sumatra Barat, Residen Karim Ms, Adinegoro (Wakil Pemerintah buat urusan umum Sumatra), Ketua K.N.I. dan Komandan Divisi Banteng, membicarakan tentang pembentukan Volksfront. Salah seorang pembicara dalam rapat itu, Khatib Suleman menerangkan bahwa Persatuan Perjuangan akan mengendalikan tenaga dan keamanan rakyat serta untuk mempertahankan kedaulatan negara dari semua daya yang datang dari luar maupun dari dalam, yang hendak mencemarkan kemerdekaan negara. Rapat yang dipimpin oleh Marzuki Yatim itu memutuskan bahwa Volksfront mempunyai badan-badan seperti:

1. Dewan Perjuangan terbagi atas siasat dan laskar.
2. Dewan Pembangunan.
3. Dewan Penyelidik.
4. Dewan Pengendalian.
5. Badan Sekretariat yang terbesar pada setiap Luhak, kedemangan-kedemangan Muda dan Kenegarian.

Juga Volksfront mempunyai tugas selain dari tugas yang tercakup dalam dewan-dewan di atas, ialah dalam pengurusan Pura Nasional. Dewan-dewan mempunyai bagian-bagian. Di atas Dewan dibentuk Majelis Permusyawaratan Persatuan Perjuangan yang bertugas mengambil keputusan yang berada di luar wewenang Dewan. Sebagai Dewan Pimpinan ditunjuk 7 orang yaitu:

1. Khatib Suleman (Partai Sosialis).
2. Iskandar Tejaksukmana (Partai Sosialis).
3. Bariun AS (P.B.I.).
4. Bachtaruddin (P.K.I.).
5. Basyrah Lubis (SOBSI).
6. Sulaiman (P.R.I.).
7. Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim (Tentara).

Sebagai suatu lembaga baru Persatuan Perjuangan di Sumatra Barat betul-betul penuh aktivitas. Kadang-kadang dalam menjalankan kebijaksanaannya sukar membedakan mana yang Volksfront dan mana yang pemerintah. Hal ini sering membingungkan masyarakat, karena seolah-olah terjadi dualisme dalam pemerintahan. Sebagai himpunan berbagai organisasi, Volksfront dapat mengusulkan sesuatu, bahkan kadang-kadang seakan-akan mendikte Pemerintah, walaupun putusan terakhir tetap berada pada Pemerintah.

Adakalanya Volksfront telah jauh bertindak dan Pemerintah diam saja. Volksfront kemudian beranggapan bahwa tindakan itu disetujui Pemerintah. Residen waktu itu adalah Dr. Jamil, seorang dokter yang baru mengenal seluk beluk organisasi pemerintahan.

Namun demikian Pemerintahan Residen Dr. Jamil ini berhasil mengangkat semangat masyarakat. Pada tiap-tiap pidato beliau menghimbau terhadap musuh dan kaki tangannya. Seruan ini sering disalah-gunakan, sehingga tak jarang kejadian bukan musuh atau kaki tangannya yang ditindak, tetapi ada juga yang hanya dicurigai kemudian juga ditangkap. Setelah diperiksa ternyata yang bersangkutan tidak bersalah dan dibebaskan. Hal semacam ini pernah dialami oleh Sulaiman Effendi sebagai seorang polisi.

Suatu kenyataan yang tak dapat dibantah dalam masa pemerintahan Dr. Jamil bahwa gejolak revolusi dan tindakan-tindakan yang revolusioner sering terlihat terlampau berani dan bahkan menimbulkan hal-hal yang tak sesuai dengan kebi-

jaksanaan pemerintah. Situasi dan kondisi yang demikian memberi peluang pada Volksfront untuk berbuat lebih jauh dari wewenangnya.

Pada tanggal 1 April mereka mengeluarkan maklumat yang menganjurkan kepada rakyat Sumatra Barat untuk menyimpan uang kertas F 100,— Jepang di Bank Pemerintah dalam tempo satu bulan. Sesudah lewat satu bulan peredaran uang F 100,— itu tidak berlaku lagi. Maklumat ini kemudian disusul dengan maklumat 4 April yang berbunyi: barangsiapa menyimpan uang kertas kecil (di bawah uang kertas f. 100,—) lebih dari f. 500,— hendaklah memberitahukan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan barang siapa yang menahan (menumpuk) uang kecil tersebut dengan tidak ada surat keterangan dari Bank, uang boleh disita. Volksfront mengeluarkan Maklumat itu karena mereka menganggap bahwa tugasnya juga menanggulangi masalah ekonomi. Maka dicoba mengatasi masalah tersebut karena di bidang keuangan disinyalir telah terjadi sabotage oleh Belanda/Sekutu yang menghamburhamburkan uang Jepang nilai f. 100,— yang dapat dirampas mereka dari Jepang.

Namun demikian kedua maklumat di atas menyangkut kehidupan perekonomian yang seharusnya diurus Pemerintah Daerah. Walaupun Volksfront telah di serahi tugas mengontrol perekonomian ini oleh Pemerintah, namun mereka sudah sangat jauh bertindak. Masalah sirkulasi uang adalah hal yang prinsipil dan sangat menentukan karena dapat menggoncangkan kehidupan negara. Pemerintah beranggapan bahwa Volksfront di luar wewenangnya. Pemerintah kemudian bertindak dengan menangkap pemimpin Persatuan Perjuangan tersebut.

Akibat dari keluarnya dua maklumat itu menggelisahkan masyarakat dan dalam peredaran uang kertas f. 100,— tidak diterima lagi oleh masyarakat. Sedangkan di daerah lain uang ini masih berlaku. Akibatnya uang ini mengalir keluar dan diperjual-belikan dengan separoh harga. Uang kertas di bawah

f. 100,— sulit didapat, barang hilang dari pasaran dan harga melonjak, dan terjadi pasar gelap (black market). Tanggal 5 April 1946 Pemerintah menyatakan bahwa uang kertas f. 100,— tetap berlaku. Hari itu juga keluar Maklumat bersama antara Pemerintah dan Volksfront, yang isinya mencabut hak Kontrol Ekonomi yang pernah diberikan kepada Volksfront.

Para pemimpin-pemimpin Volksfront yang ditangkap dan ditahan di Padang, kemudian dipindahkan ke Hotel Merdeka di Bukittinggi. Kemudian diadakan pertemuan antara Residen Dr. Jamil Dt. Rangkyo Tuo dengan para pemimpin Volksfront yang ditangkap tersebut di kediaman Residen di Jalan Atas Ngarai Bukittinggi. Pada pertemuan tersebut Residen memberi penjelasan mengenai penangkapan, sehingga diperoleh saling pengertian antara Pemerintah dan para pemimpin Volksfront. Pada hari itu juga mereka dibebaskan Pemerintah.

6. Terbentuknya partai-partai dan Barisan-barisan

Maklumat Pemerintah Pusat tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai, juga diikuti di Sumatra Barat. Tanggal 18 November 1945 para politisi mengadakan rapat di Padang Panjang. Dari kalangan pemerintah hadir Mohd. Syafei, sebagai Residen Sumatra Barat. Dalam sidang itu disetujui resolusi yang disusun oleh satu komisi beranggotakan Khatib Sulaiman dan Usman Keadilan yang berbunyi:

1. Untuk mengokohkan Negara Republik Indonesia yang demokratis hendaklah segala paham politik dari masyarakat dapat disalurkan dengan teratur ke dalam partai-partai.
2. Berhubung dengan pemilihan Wakil-wakil Rakyat dalam Badan-badan Perwakilan Rakyat yang ada akan dijalankan dalam waktu yang pendek hendaklah sedapat-dapatnya pemilihan itu dimajukan atas nama dan disokong oleh partai-partai yang menggambarkan kemauan rakyat.
3. Untuk menggelorakan semangat rakyat agar tahu ber-

tanggung-jawab atas pemerintahan sendiri sehingga N.R.I. menjadi pokok dasarnya dan terus menerus mendapat kemajuan yang pesat, hendaklah rakyat diberi keinsyafan politik dan dibawa berjuang oleh partai-partai politik.

4. Untuk membuktikan bahwa N.R.I. adalah berdasarkan demokrasi bukan bercorak fasisme, Pemerintah menyalurkan pendirian partai-partai dan ini adalah hal yang semestinya dan sesuai dengan kemauan rakyat yang sebenarnya.

Berikutnya dinyatakan dalam resolusi itu bahwa dalam perjuangan sengit seperti sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan atau kedaulatan kita dari pihak manapun partai-partai politik jangan hendaknya saling bercakaran sesamanya dan berjuang sepenuhnya untuk mengokohkan Front Nasional seerat-eratnya bagi pertahanan negara.

Karena resolusi ini diterima oleh rakyat Sumatra Barat sepenuhnya dan telah memutuskan:

1. Akan memakai kesempatan yang seluas-luasnya mendirikan dan mengembangkan partai-partai politik.
2. Menjunjung tinggi restriksi dari Pemerintah Agung tentang pendirian partai-partai politik tertanggal 3 November 1945.

Dalam waktu singkat dibentuk Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) pada tanggal 12 November 1945; Partai Syarikat Islam Indonesia (P.S.S.I.) pada tanggal 18 November 1945. Begitu juga M.T.K.A.A.M dan M.I.T. diresmikan jadi partai politik, masing-masing pada tanggal 20 Desember 1945 dan 25 Desember 1945. Demikian pula Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) diresmikan jadi partai politik pada tanggal 26 November 1945. Juga suatu partai Islam yang berpusat di Yogyakarta berdiri di Sumatra Barat yaitu Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada bulan Februari 1946. Partai Sosialis berdiri

tanggal 12 Januari 1946, dengan keluarnya St. Syahrir serta kawan-kawan dari Partai Sosialis maka di Sumatra Barat berdiri pula Partai Sosialis Indonesia (P.S.I.) pada tanggal 12 Februari 1948 yang merupakan bagian Partai Sosialis yang dipimpin oleh St. Syahrir.

Di Lubuk Basung berdiri Partai Komunis Indonesia Lokal Islamy (P.K.I. Lokal Islamy) dan selanjutnya muncul pula cabang Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), Partai Islam Indonesia (P.I.I.), Partai Politik Tarikat Islam (P.P.T.I.). Partai Muslimin Syatariyah Indonesia (Pemsyi), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Republik Indonesia (Pari) yang pada masa penjajahan Belanda pendudukan Jepang bergerak di bawah tanah.

7. Terbentuknya barisan-barisan

1. Barisan Hizbullah

Di Sumatra Barat selain angkatan perang dan kepolisian oleh partai-partai dibentuk pula Barisan-barisan bersenjata. Barisan yang pertama kali ialah Hizbullah. Atas inisiatif pimpinan Muhammadiyah tanggal 1 Oktober 1945 dikumpulkanlah para pemuda Muhammadiyah dan ex pandu Hizbuewathan di Padang Panjang untuk memperoleh penjelasan mengenai pembentukan Barisan Hizbullah di Sumatra Barat ini. Sesudah memperoleh kursus 10 hari lamanya, mereka disebarkan ke tempat masing-masing untuk membentuk Hizbullah. Dan pada tanggal 22 November 1945 diresmikanlah berdirinya Barisan Hizbullah di kota Padang Panjang, yang kemudian juga menyebar ke Bukittinggi.

2. Barisan Hulubalang

Pada zaman perjuangan-perjuangan kemerdekaan golongan adat melalui M.T.K.A.A.M. yang diorganisir oleh Dt. Simarajo pada tanggal 10 Oktober 1945 meresmikan pula berdirinya Barisan Hulubalang di Padang Panjang di bawah R.O. Gando Sinaro. Begitu juga di tempat-tem-

pat lain termasuk Bukittinggi para ninik mamak menghimbau serta menghimpun anak kemenakan dan membentuk Barisan Hulubalang.

3. Barisan Sabilillah

M.I.T. yang pada zaman Jepang merupakan organisasi sosial dan pernah berfatwa tentang perang sabil dan mati syahid dalam membela bangsa dan agama, kemudian menjadi partai politik. M.I.T. membentuk satu barisan yang bernama Sabilillah dan bermarkas di Bukittinggi. Barisan ini di bawah pimpinan A. Gafar Jambek dengan cabang-cabangnya yang tersebar hampir seluruh Sumatra Barat. Dalam beberapa saat terhimpun 1 Divisi Sabilillah yang terdiri 4 Resimen.

Resimen I berkedudukan di daerah Padang Pariaman.

Resimen II berkedudukan di daerah Solok.

Resimen III berkedudukan di daerah Pesisir Selatan.

Resimen IV berkedudukan di daerah Payakumbuh.

Latihan diberikan kepada calon perwira dan setelah latihan para opsir selesai maka dilantik pada tanggal 16 Maret 1946 bertempat di lapangan Atas Ngarai Bukittinggi.

4. Tentara Merah Indonesia

Oleh P.K.I. terbentuk Tentara Merah Indonesia (TEMI) pada tanggal 2 Januari 1946. Barisan ini berubah nama menjadi BAMI (Barisan Merah Indonesia) yang tersebar hampir di seluruh Sumatra Tengah, termasuk Bukittinggi.

5. Lasykar Muslimin Indonesia

Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) membentuk Lasykar Muslimin Indonesia (LASYMI) pada tanggal 24 Desember 1945 dan kemudian dilengkapi dengan barisan puteri Lasykar Muslimat. Pada tiap cabang dan ranting PERTI terdapat barisan ini. Setelah pembentukan barisan ini selesai Syeikh Suleman Arrasuli melantik para opsirnya di Bukittinggi dan pada tanggal 23 Juni 1946

dilantik pula Lasykar Muslimat. Lasymi dipimpin oleh Syofyan Siraj.

8. Gerakan P.K.I. Baso

Seperti telah dikemukakan juga pada halaman terdahulu bahwa tujuan pemerintah dengan mengizinkan berdirinya partai-partai terutama adalah agar semua aspirasi masyarakat dapat disalurkan dan ditampung.

Pada awal tahun 1946 P.K.I. di Kecamatan Baso yang terletak 11 km sebelah Timur kota Bukittinggi telah menyalahgunakan maksud baik pemerintah tersebut. Gerakan ini dipimpin oleh dua bersaudara Tuanku Nan Hitam dan Tuanku nan Putih. Pusat gerakannya di Sarik Lawas di atas Bukit dekat Baso dan pengaruh gerakan ini sampai ke Kota Tengah, Suaian dan lain-lain. Menurut ajaran kedua tokoh P.K.I. Baso ini, bahwa agama adalah bohong belaka. Tuhan Allah itu tidak ada, surga dan neraka cuma ada di dunia saja bukan di akhirat. Barang siapa yang mengerjakan sembahyang ditangkap. Gerakan ini mempunyai barisan sendiri, dan mempunyai pos-pos penjagaan di antara jalan Bukittinggi dan Payakumbuh di sebuah jalan sepi yang bernama Ujung Guguk. Anggota gerakan ini melakukan perampokan, pencurian, penculikan, dan pembunuhan-pembunuhan terhadap orang yang dianggap mereka sebagai lawan-lawan atau yang tak disenangi. Kerbau, sapi, beras dan padi menjadi sasaran pencurian dan perampokan. Pada malam hari mereka merampok berkeliling kampung. Menurut kepercayaan pemimpin mereka, orang yang tidak masuk gerakan mereka, boleh dibunuh dan orang itu dianggap sebagai Kapitalis. Sebab itu banyaklah orang-orang yang mereka tuduh Kapitalis hilang atau terbunuh. Orang-orang yang berdagang dari pekan ke pekan seperti Payakumbuh dan Bukittinggi menurut mereka adalah kapitalis, sebab itu banyak di antaranya yang dibunuh.

Buat membuktikan ajaran kedua pemimpin gerakan ini mereka mendirikan apa yang dikatakan Neraka dan Surga itu

ada di dunia. Para kapitalis yang menurut mereka itu diculik pada malam hari di Bukittinggi dan Payakumbuh dikawal dengan mobil ke suatu tempat yang dirahasiakan. Di tempat itu para tahanan disiksa dalam neraka ciptaan mereka. Di neraka mereka inilah seorang tokoh masyarakat Patih Lanjunin/Datuk Temanggung yang pernah menjadi anggota Volksraad, diculik dari rumahnya di Bukittinggi dan dibunuh.

Setelah diperoleh cukup bahan tentang perkembangan gerakan P.K.I. Baso ini operasi penumpasan diadakan di bawah Komandan Resimen I T.R.I. Divisi III Banteng yang dilancarkan pada tanggal 14 April 1946. Daerah-daerah yang menjadi sasaran operasi ini ialah kampung-kampung Simarasok, Sungai Sarik, Pincuran Putih, Ujung Guguk, Kotatinggi dan hampir seluruh daerah kecamatan Baso. Operasi penumpasan berhasil menangkap puluhan anggota-anggota P.K.I. beserta kedua pemimpin mereka Tuanku Nan Hitam dan Tuanku Nan Putih melalui serentetan pertempuran. Gerakan operasi penumpasan berlangsung sampai tanggal 16 April 1946 dan dapat ditahan ratusan anggota P.K.I. baik lelaki maupun perempuan bahkan para gadis-gadis.

Setelah oprasi penumpasan selesai rakyat di sekitar Baso mengucapkan terima kasih kepada pihak T.R.I., karena merasa terlepas dari ancaman, tekanan, dan rasa ketakutan. Segera setelah disiarkan berita bahwa gerakan P.K.I. Baso telah ditumpas maka suatu pernyataan dari Komite P.K.I. Sumatra Barat dikeluarkan, bahwa P.K.I. Sumatra Barat tidak tahu menahu dengan organisasi P.K.I. Baso. Walaupun telah ditumpasnya suatu gerakan yang sungguh sangat membahayakan ini namun halnya tidak sampai di sini saja. Karena gejala-gejala besar atau kecil dalam periode perang kemerdekaan disinyalir masih ada, namun dapat diatasi oleh kesatuan T.R.I.

9. Peristiwa 3 Maret 1947

Peristiwa ini mempunyai sebab-sebab dari berbagai faktor yang telah menumpuk dalam diri masyarakat yang kemudian

lebih diwarnai oleh rasa ketidak-puasan beberapa golongan tertentu terhadap golongan lainnya.

Dengan telah disusunnya pemerintahan maka jabatan dalam susunan lembaga baru ini diduduki oleh bangsa Indonesia. Agar dapat tersalurkan berbagai aspirasi masyarakat berdirilah partai-partai. Supaya partai-partai tersebut lebih berbobot di tengah-tengah perjuangan maka masing-masing membentuk barisan-barisan bersenjata yang berdampingan dengan tentara resmi T.R.I. (Tentara Republik Indonesia).

Peristiwa 3 Maret 1947 itu pada hakekatnya merupakan percekocokan antara berbagai kekuatan-kekuatan sosial, khususnya pertentangan antara dua kekuatan sosial, yaitu pemerintah dengan T.R.I. nya dengan tokoh-tokoh cendekiawan berpendidikan Barat disatu pihak, dengan pihak partai-partai serta barisan-barisan bersenjata yang dipelopornya.

Manifestasi dari ketidakpuasan berbagai golongan masyarakat itu dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Dari sejumlah golongan agama timbul rasa tidak puas, karena menurut mereka Pemerintah sangat dipengaruhi oleh golongan sosialis, komunis serta orang-orang yang diragukan perjuangan masa lampaunya.
2. Di dalam tubuh pemerintahan dan T.R.I. terdapat cendekiawan yang berpendidikan Barat yang dianggap lebih berorientasi kepada hidup keduniawian dan mengabaikan agama.
3. Golongan yang merasa tidak puas melihat sikap pemerintah yang menurut penilaian mereka terlalu memberi angin kepada Sekutu/Nica dan dengan demikian dianggap melambankan jalannya revolusi.
4. Rasa tidak puas melihat kehidupan mewah dari sejumlah perwira Divisi IX Banteng di garis gelakang (Bukittinggi), serta kebijaksanaan yang diambil mereka terhadap orang-orang yang dianggap Nica (Rantai Mas). Rasa tidak puas

ini ditambah lagi dengan anggapan bahwa korupsi mulai meresapi segolongan perwira.

5. Juga rasa tak puas itu berasal dari kalangan tentara sendiri terhadap sikap teman-teman mereka satu korps.
6. Pada barisan-barisan timbul rasa tidak puas terhadap T.R.I. karena kebanyakan perwira-perwira T.R.I. yang terkemuka dalam Divisi IX Banteng mempunyai pandangan yang agak rendah (under estimate) terhadap perwira-perwira di kalangan barisan-barisan. Dikatakan bahwa perwira-perwira dari barisan kebanyakan mempunyai latar belakang pendidikan yang kurang memadai seperti dari madrasah/sekolah agama dan lain-lain. Perbedaan itu terlihat umpamanya ketika diadakan penggabungan lasykar ke dalam T.N.I., perwira-perwira barisan mengalami penurunan pangkat tiga sampai empat tingkat.

Rasa tak puas ini mulai timbul sewaktu barisan dan T.R.I. sama berada di front. Barisan-barisan merasa dianak tirikan seperti mengenai pembagian pakaian. Begitu juga dalam membagi sumbangan-sumbangan dari masyarakat dan hasil rampasan terdapat ketidak-adilan. Timbul semacam ocean di kalangan barisan bahwa T.R.I. mendapat gaji dari pemerintah sedangkan barisan hidup dari belas kasihan masyarakat. Perasaan tidak puas itu semakin berkorbar ketika muncul perbedaan pendapat di kalangan partai yang ada, dan perselisihan itu semakin dipertajam melalui barisan-barisan.

Selanjutnya perasaan tidak puas itu berasal dari masalah kekuasaan. Posisi kunci dalam pimpinan perjuangan dipegang oleh T.R.I. Hizbullah yang terkuat di antara barisan berpendapat supaya kepincangan itu harus segera dikoreksi.

Dalam kalangan masyarakat sendiri juga terhadap rasa tidak puas karena melihat sebagian anggota T.R.I. bersikap agak angkuh dan over acting. Apalagi mulai muncul kebiasaan hidup berfoya-foya di tengah-tengah kesulitan kehidupan rakyat

semakin mencekam seperti di Bukittinggi yang telah penuh sesak dengan pengungsi. Bagaimana penghidupan rakyat waktu itu dilukiskan dalam suatu pantun:

Mandaki ke Batusangkar
Baranti di Tabek Patah
Menurun ke Rao-Rao

Sudah tiga musim berganti
Sekarang kita memerintah
Nasib hamba begitu juga

Tumpukan rasa ketidak-puasan itu diexploitir pula oleh pihak musuh/Belanda lewat kaki tangannya dengan kampanye berbisik yang ditujukan kepada golongan militer dan sipil yang berada di pusat pemerintahan daerah di Bukittinggi. Mereka kemudian membentuk suatu badan yang bernama PAKI (Pemberantas Anti Kemerdekaan Indonesia). Di dalam badan ini selain terdapat orang-orang yang betul-betul ingin mengadakan koreksi sosial terdapat pula orang-orang yang ambisius.

Gerakan ini menyebar di berbagai kota di Samarinda Barat. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi diadakan di mana-mana termasuk di Bukittinggi. Beberapa keputusan yang diambil adalah:

1. Akan diadakan perebutan kekuasaan di Bukittinggi serta kota-kota lainnya dari tangan sipil dan militer.
2. Sebagai alat untuk melaksanakan gerakan itu terpilih barisan Hizbullah.

Selanjutnya gerakan ini mengerahkan ulama-ulama untuk mengadakan rapat-rapat umum di Bukittinggi, Payakumbuh dan Padang Panjang. Dalam rapat-rapat tersebut dieksplotir kekurangan dan kelemahan yang terdapat pada pemerintah dan militer. Menjelang meletusnya gerakan ini ditempelkan poster-poster yang menggambarkan perwira-perwira sedang berfoya-foya dengan gadis-gadis. Situasi semakin diper-

matang lagi dengan melansir berita di tengah-tengah masyarakat bahwa ada di antara perwira-perwira Divisi IX Banteng yang dipengaruhi NICA, dan mereka akan ditangkap.

Dalam suatu rapat terakhir dari gerakan ini yang diadakan di Bukittinggi ditetapkan bahwa hari "perebutan kekuasaan" akan diadakan pada tanggal 3 Maret 1947.

Pada rapat sebelumnya di Solok, ditentukan tokoh-tokoh mana yang akan diculik, dan di tempat mana saja gerakan akan dicetuskan. Untuk melancarkan gerakan pasukan inti Hizbullah yang sedang berada di front Padang ditarik ke Bukittinggi untuk memperkuat pasukan yang telah ada. Blanko surat perintah penangkapan sudah disiapkan, lengkap dengan stempel Komandemen Sumatra serta tanda tangannya.

Sesuai dengan rencan tanggal 3 Maret pasukan Hizbullah dan Sabilillah bergerak melakukan penangkapan kepada orang-orang yang namanya telah disusun dalam surat perintah tangkap. Gerakan ini secara simultan dilancarkan di Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, Pariaman dan juga pada beberapa kota lainnya di Sumatra Barat. Dalam operasi penangkapan di Bukittinggi hanya tokoh-tokoh sipil saja yang dapat ditangkap, begitu juga di kota-kota lainnya. Perwira-perwira Divisi IX Banteng seperti Ismael Lengah dan A. Alim dan lain-lainnya tidak berhasil mereka tangkap karena ternyata T.R.I. dapat menguasai keadaan. Hanya di Jambu Air dan Tarok, keduanya di dalam kota Bukittinggi terjadi sedikit pertempuran antara T.R.I. dengan barisan Hizbullah dan Sabilillah. Situasi tak menentu hanya berlangsung beberapa jam karena T.R.I. segera dapat bergerak. Jambu Air segera dapat dikuasai.

Di kota lain seperti Padang Panjang, Payakumbuh dan Pariaman gerakan ini tidak jadi meletus karena situasi segera dapat dikuasai T.R.I. Sedangkan di Solok sudah lebih dahulu diketahui.

Semua pemimpin dari gerakan ini dapat ditangkap. Mereka berasal dari berbagai aliran dan golongan. Di antara mereka ada yang berfungsi sebagai pejabat sipil dan militer. Mereka kemudian diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Putusan pengadilan menyatakan bahwa gerakan itu tidak ditunggangi oleh suatu partai tertentu dari golongan Islam. Kemudian ternyata, bahwa Masyumi dan Hizbullah sebagai organisasi yang teratur, tidaklah ada sangkut pautnya dengan kejadian itu, meskipun beberapa orang Hizbullah dan Sabilillah terseret ke dalamnya.

Peristiwa 3 Maret 1947 merupakan suatu isyarat, bahwa dengan banyaknya barisan-barisan bersenjata yang dimiliki oleh partai-partai dengan azas keyakinan/ideologi masing-masing, kesatuan komando dalam perjuangan sukar dilaksanakan. Pengalaman ini ternyata bukan hanya dialami Sumatra Barat.

CATATAN BELAKANG BAB VII

1. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I. di Minangkabau 1945 – 1950, I* (Jakarta, B.P.S.I.M, 1980), halaman 319.
 2. Dr. J.M. Van der Kroef, *Indonesia in the Modern World*, part II (Th, Masa baru, 1956), halaman 345.
 3. Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, Djakarta, Gapura, 1952), halaman 35.
-

B A B VIII

SUATU TINJAUAN BEBERAPA ASPEK KEHIDUPAN SOSIAL (BUKITTINGGI DALAM MASA REVOLUSI)

1. Kota Bukittinggi Selayang Pandang

Kota Bukittinggi terus berkembang baik dalam fungsi, jumlah penduduk dan masalah-masalah sosial yang dihadapi. Pada pertengahan tahun 1947 Wakil Presiden Moh. Hatta berada di Bukittinggi untuk memimpin perjuangan di Sumatra. Kehadiran Wakil Presiden ini sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat. Dengan demikian kota Bukittinggi bukan hanya sebagai tempat kedudukan Gubernur Sumatra dan pusat markas Komandemen Sumatra, juga sebagai pusat Divisi Banteng serta ibukota Keresidenan Sumatra Barat. Jadi dari Bukittinggi lah diputar roda pemerintahan/revolusi dan karena itu pula kota ini menjadi penting dan menentukan.

Suasana perang menyebabkan roda perekonomian terganggu, perhubungan terhambat dan produksi merosot. Hubungan dagang dengan luar negeri lewat pantai Barat tak mungkin lagi dilaksanakan kaum Republik karena Padang telah dikuasai Belanda. Begitu juga lewat pantai Timur melalui Pekan Baru dan Jambi karena laut sudah diblokade rapat oleh Belanda. Hanya dengan menerobos blokade Belanda lewat Singapura dapat dimasukkan barang-barang dan senjata bagi keperluan perjuangan. Sebagian dari barang-barang tersebut beredar di pasar Bukittinggi. Barang-barang yang terbuat dari bahan plastik menjadi terkenal dalam masyarakat dengan nama "barang atom" seperti tas atom, ikat pinggang atom dan sebagainya. Barang serba plastik ini menjadi idaman bagi yang muda-muda ketika itu. Begitu terkenalnya barang atom ini di kalangan masyarakat terungkap dalam pameo:

Kok jadi uda ka Jambi,
Balikan ambo sagalo atom (Jika jadi kakanda ke Jambi
belikan saya segala barang atom).

Dan bagi bapak-bapak para pejabat sipil dan militer rokok
"lamak" atau rokok kaleng buatan luar negeri yang pakai
"kuah sate" (filter) merupakan suatu kebanggaan.

Di Bukittinggi terdapat juga beberapa bioskop. Pada
masa ini ada sebuah hotel yang bernama Hotel Merdeka tem-
pat menginapnya para pejabat/perwira yang datang dari luar
daerah. Sebagai ibukota terdapat kantor-kantor pemerintahan,
begitu juga sekolah-sekolah dari tingkat S.D. sampai dengan
tingkat Akademi. Di sinipun terdapat sebuah sekolah Pendi-
dikan Perwira (KADET) yang mewarnai kota ini sebagai kota
perjuangan.

Sebagai tempat berhimpunnya kantor-kantor pemerin-
tahan dari berbagai instansi sipil dan militer sudah barang
tentu banyak kendaraan yang berseliweran di jalan, terutama
mobil para pejabat dan opsir yang masih muda-muda. Dalam
pergaulan sehari-hari kelompok yang memegang posisi Kunci
(key position) masih sempat saling mengundang untuk mera-
yakan acara-acara tertentu yang bersifat pribadi. Untuk ukur-
an kehidupan masa itu kelihatannya cara hidup elite baru
kelihatannya sudah lumayan.

Dalam merayakan hari-hari besar tertentu seperti "Hari
Ulang Tahun Kemerdekaan" masih sempat diadakan keramai-
an Pasar Malam dan Pacu Kuda. Pacu kuda ini yang diadakan
di Gelanggang pacu kuda Gadut merupakan permainan anak
negeri yang sangat digemari. Penduduk sekitar kota Bukitting-
gi ramai berdatangan untuk menyaksikannya. Mereka semen-
tara terhibur, dan melupakan sejenak kesusahan dan kesulitan
yang dihadapi.

Masyarakat daerah lain memberi julukan "Bukittinggi se-
bagai kota de jure". Kehidupan sosial masyarakat kota Bukit-
tinggi waktu itu dapat dibagi atas empat golongan:

1. Pejabat yang memegang posisi kunci dalam pemerintahan baik sipil maupun militer.

Pejabat ini mengelola masalah sandang pangan. Karena barang makanan dan pakaian sangat langka maka mereka yang mengelola sektor ini kelihatannya agak menonjol. Waktu itu terkenal sebutan "Pak Intendan" satu istilah yang berasal dari nama jabatan dalam ketentaraan. "Intendan" berarti unit yang mengurus perbekalan tentara. Memperoleh suami/menantu Pak intendan menjadi idaman kaum ibu. Karena dianggap tidak akan susah lagi untuk memperoleh beras dan pakaian serta barang-barang yang langka saat itu.

2. Kaum pedagang, terutama yang terkenal dengan nama "Saudagar Jambi". Kaum ini melakukan hubungan dagang dengan Singapura dan sebagai penyalur barang-barang dari luar negeri/Singapura melalui pelabuhan Pekan Baru dan Jambi. Karena barang luar negeri ini masih kurang maka hampir setiap orang mencarinya. Dan harganya tergantung pada keinginan para pedagang saja. Barang-barang yang sangat disukai adalah barang tekstil, kelontong dan barang-barang dari plastik (barang-barang atom). Para pedagang seperti ini jarang merugi dan kehidupan mereka agak baik.

3. Penduduk asli setempat yang mempunyai sawah ladang. Di Minangkabau yang disebut penduduk asli itu mempunyai "cancang lateh" atau sawah dan ladang serta pandan perkuburan. Kalau tidak demikian dianggap bukan penduduk asli namanya, dan kepadanya disebut sebagai pendatang. Dalam masa revolusi di mana makanan khususnya beras, sukar didapat, para penduduk asli yang memiliki tanah garapan yang lumayan tidak banyak mengalami kesulitan. Sayur dan keperluan sehari-hari biasanya ditanam sendiri. Kecuali bahan pakaian, golongan ini relatif bisa bertahan.

4. Kaum pengungsi, yakni mereka yang hijrah dari daerah front pertempuran ke tempat yang lebih aman. Sebagian mereka datang ke daerah pengungsian dengan pakaian sedaranya, karena rumah dan harta benda mereka telah dibakar oleh Belanda. Bagi yang menggantungkan hidup dari sawah ladang di kampung kehidupan pengungsi ini sangat sulit. Pada umumnya mereka tidak memiliki jaminan hidup, kecuali mereka yang mempunyai keluarga terdekat.

2. Masalah Pengungsi

Kehidupan masyarakat pengungsi betul-betul tidak menentu. Semuanya serba kacau, rusak dan lumpuh. Masing-masing mereka berusaha mencari tempat untuk menyelamatkan diri. Jika keadaan sudah aman mereka baru bisa kembali ke tempatnya. Rakyat kota Padang merupakan salah satu contoh dari para pengungsi ini.

Pada mulanya arus pengungsian hanya bergerak ke kampung-kampung sekitarnya, tetapi setelah tentara Sekutu di kota Padang sepenuhnya diganti tentara Belanda situasi semakin panas, pertempuran berkobar di sana sini. Sejalan dengan itu arus pengungsi bertambah deras. Tempat yang dituju ialah kota-kota terdekat seperti di daerah Pesisir Selatan, Balai Sela, Sungai Penuh, Solok, Padang Panjang, Batu Sangkar, Bukittinggi, Payakumbuh dan sebagainya. Dalam hal ini kota Bukittinggi yang terletak agak jauh dari kota Padang menjadi cukup ramai. Hal ini disebabkan karena markas Divisi Banteng ini dianggap sebagai tempat pengungsian yang paling aman. Selain mereka yang datang dari Padang dan sekitarnya, Bukittinggi juga dibanjiri oleh pengungsi dari Sumatra Utara. Sehingga penduduk kota Bukittinggi dengan cepat meningkat. Semula berjumlah ± 40.000 jiwa, dan dalam waktu singkat mencapai jumlah ± 100.000 jiwa. Pertambahan penduduk yang begitu cepat ini menimbulkan problema sosial seperti masalah perumahan, makanan, pengangguran, kesehatan, pakaian dan sebagainya.

Modal pengungsi hanyalah idealisme, mereka tidak mau tinggal di daerah pendudukan Belanda. Untuk itu mereka bersedia hidup dalam kesulitan di daerah pengungsian. Perasaan senasib dan secita-cita mendorong masyarakat yang didatangi bersedia menerima para pengungsi, dengan memberi tempat tinggal di rumah masing-masing dan membantu sekedarnya apa yang diperlukan. Ketika rumah-rumah menjadi penuh pengungsi mengisi sebeng-sebeng rumah, bedeng-bedeng, surau-srau, sekolah-sekolah, gudang-gudang, malahan ada yang tinggal di gerbong-gerbong kereta api.

Di antara pengungsi yang berfungsi sebagai pegawai ada yang bertempat tinggal di Padang Panjang dan Payakumbuh, tetapi berkantor di Bukittinggi. Waktu subuh mereka sudah meninggalkan rumah berangkat ke tempat kerja di Bukittinggi dengan kereta api. Sering juga mereka ketinggalan kereta api sehingga terpaksa berjalan kaki dan baru bisa kembali ke rumah pada malam hari. Bagi pengungsi yang biasanya hidup dengan pertanian di daerah pengungsian terpaksa hidup sebagai buruh tani, menerima upah membajak, memacul, dan menyangi. Tentu saja tidak begitu memuaskan dibandingkan dengan menggarap tanah sendiri. Bagi yang bisa menyewa sawah atau menggarap sawah orang dengan bagi hasil lebih lumayan.

Bagi yang biasa berdagang pada periode sebelumnya masih lumayan. Apalagi bagi mereka yang agak bermodal. Jadi sekarang berlaku hukum ekonomi, "bila penawaran sedikit, permintaan banyak, harga naik". Karena itu dapat dikatakan apa saja yang diperdagangkan tidak ada yang merugi. Jadi hidup orang berdagang agak lumayan, jika dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan tetap (pegawai) tanpa penghasilan ekstra. Apalagi jika tahu pula jalan ke Jambi dan menjadi Saudagar Jambi tentu lebih lumayan.

Bagi mereka yang tidak bermodal cuma dapat membuka warung, berdagang kecil-kecilan di pasar Bukittinggi atau

cuma memanfaatkan tenaga anak-anak sendiri menjajakan kue-kue. Faktor membantu ekonomi rumah tangga merupakan penyebab terjadinya drop out di kalangan anak-anak para pengungsi. Waktu yang seharusnya dipakai untuk bersekolah tersita untuk membantu orang tua. Bagi anak-anak yang telah cukup dewasa karena orang tua mereka tidak mampu lagi melanjutkan pendidikan, banyak yang memutuskan masuk tentara saja. Kebetulan negara sedang membutuhkan tenaga mereka. Tetapi ada di antara keluarga pengungsi yang termasuk agak beruntung, karena mereka berhasil membina hubungan baik dengan keluarga/suku yang ditempati. Mereka kemudian diterima sebagai kemenakan baru oleh ninik mamak dari keluarga/suku yang ditempati. Peristiwa tersebut dinamakan "Inggok mancakam tabang basitumpu" (hinggap mencekam terbang bertumpu), maksudnya keluarga itu mengisi adat di tempat tersebut. Dengan upacara khusus untuk mengisi adat yang berlaku pada keluarga atau suku yang ditempati maka keluarga tersebut dianggap telah menjadi anggota keluarga/suku tersebut. Dengan cara itu keluarga pengungsi itu telah mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti anggota dalam suku tersebut. Mereka juga berhak memperoleh sejumlah tanah ulayat suku untuk digarap sendiri. Bagi suatu keluarga pengungsi yang mengalami peristiwa seperti ini merupakan suatu rahmat, karena masalah kebutuhan makanan sudah tak menjadi masalah lagi dalam saat-saat yang sulit ini.

3. Ekonomi Dalam Perjuangan

1. Mencetak Uang Urips.

Sebagai alat pembayaran yang sah bagi satu negara diperlukan mata uang sendiri. Sebelumnya uang Jepang masih dipergunakan sebagai alat pembayaran. Agar Pemerintah dapat menarik uang Jepang secara bertahap pada tanggal 26 Oktober 1946 Oeang Republik Indonesia (ORI) mulai beredar dan berlaku sejak pukul 12.00 tengah malam. Perbandingan kurs antara ORI dengan Uang Jepang di pulau Jawa 1 : 50 dan di

pulau Sumatra 1 : 100. Jumlah uang yang dicetak di Jawa tidak mencukupi buat diedarkan di seluruh Indonesia. Karena itu ORI sangat sedikit sampai di Sumatra Barat. Alangkah bangganya perasaan waktu itu melihat uang yang telah dikeluarkan pemerintah sendiri. Sebelumnya uang yang dilihat hanya yang dikeluarkan oleh bangsa/pemerintah asing saja. Pada mulanya uang ORI di Sumatra Barat tinggi nilainya jika dibandingkan dengan uang Jepang yang masih beredar di pasaran.

Pada bulan April dan Mei 1947 Propinsi Sumatra dicetak di Pematang Siantar dengan nama uang URIPS (Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatra) dengan kurs 1 : 100 terhadap uang Jepang. Dan Sumatra Barat mendapat bagian uang ini sehingga dapat dipakai. Setelah itu muncul pula Urips Sumatra Barat yang dicetak di Bukittinggi.

Dalam usaha pemerintah Sumatra menekan inflasi agar jumlah uang yang beredar dapat dikendalikan, diambil tindakan saneering uang yakni dengan membekukan uang Rp. 25,— dari peredarannya. Di samping itu saneering itu bertujuan untuk menghindarkan beredarnya uang kertas cetakan Pematang Siantar yang disinyalir banyak yang palsu.

Peristiwa saneering di Bukittinggi terkenal dengan istilah "jatuhnya kapal terbang hijau" sebab uang kertas Rp. 25,— yang dipotong nilainya itu berwarna hijau dan bergambar kapal terbang yang sedang melayang di udara pada salah satu mukanya.

2. Partisipasi BNI 1946 dan Bank Nasional Bukittinggi dalam Perjuangan Kemerdekaan di Sumatra Barat.

a. Bank Nasional Indonesia 1946.

Bank Negara Indonesia 1946 dan Bank Nasional Bukittinggi mempunyai saham yang besar dalam perjuangan Kemerdekaan. Di samping bertugas dalam bidang monev, BNI 1946 ikut pula mengokohkan ide negara kesatuan. Bank ini dalam masa revolusi telah membuka

cabang-cabangnya di berbagai tempat di seluruh Sumatra. Pemerintah Indonesia pada tanggal 16 September 1945 telah memberi wewenang kepada R.M. Margono Djojohadikusumo untuk mempersiapkan pembentukan Bank Negara Indonesia sebagai Bank Sirkulasi. Kebijakan ini disusul dengan dikeluarkannya undang-undang Bank Negara pada tanggal 5 Juli 1946 di Yogyakarta.

Tentang pembukaan cabang-cabang di daerah walaupun keadaan di Sumatra lebih sulit dari Jawa, namun BNI 1946 dapat mendirikan beberapa cabang di Palembang, Pematang Siantar, Bukittinggi, Pekan Baru, Sibolga, Kotaraja, Jambi dan Tanjung Karang.

Bank Negara Indonesia 46 di Bukittinggi dalam aktivitasnya berhasil mendirikan Sumatra Banking and Trading Corporation (S.B.T.C.) dengan Presiden Direktornya Abd. Azis Latif. Selanjutnya atas dorongan Wakil Presiden Moh. Hatta BNI 46 mendirikan pula Central Trading Company (C.T.C.) yang dipimpin oleh T. Hamid Azwar dan kawan-kawannya. C.T.C. ini adalah milik pemerintah melalui BNI 1946. Mr. A. Karim diangkat sebagai Presiden Komisaris sebagai wakil para pendiri C.T.C. Dalam gerakannya C.T.C. berperan penting dalam mensuplay kebutuhan angkatan bersenjata. Salah satu modal B.N.I. 46 di Bukittinggi berasal dari candu. Candu ini dibawa dari Yogya menjelang agresi Belanda II. Candu ini kemudian menjadi alat utama untuk mengadakan hubungan ke luar negeri.

Ketika Belanda menduduki kota Bukittinggi, seluruh kekayaan BNI 1946 termasuk candu dapat diselamatkan ke daerah pedalaman. Perlu dicatat bahwa sebagian kecil candu tersebut diselundupkan ke luar negeri. Dan hasilnya telah dimanfaatkan untuk:

1. Membiayai pilot-pilot R.I. yang belajar di India.

2. Keperluan spareparts AURI di Bukittinggi.
3. Untuk berbagai keperluan tentara di Bukittinggi.

b. Bank Nasional Bukittinggi.

Selain B.N.I. 46, bank swasta yakni Bank Nasional Bukittinggi juga berperan aktif dalam masa perjuangan di Bukittinggi. Bank Nasional Bukittinggi ini telah berdiri sejak tanggal 31 Desember 1931. Waktu itu pengurusnya adalah:

Presiden	: Haji Moh. Yatim
Wakil Presiden	: Haji Moh. Thaher
Sekretaris	: Anwar St. Saidi
Bendahara	: Haji Suleiman
Komisaris	: M. Suleiman
	Buyung St. Burhan.

Pada awal pembangunan Bank ini bertujuan sebagai Abuan Saudagar (Simpanan Saudagar). Kemudian berkembang menjadi satu Bank berkat kebijaksanaan para pengurus dan kesetiaan para pesertanya. Dalam perkembangan selanjutnya Bank ini tidak hanya mengumpulkan dan meminjamkan uang kepada nasabahnya, tetapi juga mendirikan satu perusahaan yang bernama INKORBA (Inkoop Organisatie Batik) yang melaksanakan kegiatan di bidang perdagangan. Atas kuasa badan dagang ini Direksi Bank Nasional pada tahun 1940 berangkat ke Betawi untuk mengusahakan memperoleh lisensi import.

Waktu itu Belanda sedang berperang dengan Jerman. Karena itu Belanda menjalankan politik mendekati rakyat Indonesia. Mereka memberi izin kepada bumi putra untuk mendirikan badan usaha, yaitu I.M.A. (Inlandse Maatschappij op Aandeelen). Badan usaha semacam ini pada mulanya hanya dapat diberikan untuk pulau Jawa dan Madura saja.

Berkat bantuan Mr. Moh. Jamin dan M.H. Thamrin, keduanya anggota Volksraad maka peraturan I.M.A. terse-

but berlaku juga untuk daerah luar Jawa. Dengan kemudahan itu kemudian Direksi Bank Nasional memperoleh izin lisensi import tekstil dan lisensi import untuk barang-barang kelontong dan barang konfeksi lainnya. Hasilnya badan dagang yang bernaung di bawah Bank Nasional berkembang dengan pesatnya.

Dalam masa revolusi sumbangan aktif Bank Nasional ini juga dapat dirasakan berbagai pihak. Melalui para dermawan yang terdiri dari pedagang-pedagang Bukittinggi Bank Nasional mengumpulkan uang untuk membeli senjata-senjata api seperti karabyn, senapan mesin ringan, dan berpeti-peti granat tangan. Senjata ini disimpan di almari rumah salah seorang pimpinan Bank tersebut Anwar St. Saidi. Bahkan kepada Ismael Lengah tokoh militer di daerah ini diserahkan kunci almari yang berisi sejumlah uang dan kepada yang bersangkutan dipersilahkan memakainya kapan saja guna kepentingan perjuangan.

3. Sepuluh persen padi rakyat untuk negara.

Perkembangan tingkat perjuangan ternyata menuntut segala-galanya baik jiwa maupun raga. Selain perjuangan meminta para pemuda untuk siap berkorban, pemerintah juga mengambil langkah-langkah dalam bidang pengadaan perbekalan. Kebijakan ini mengatur terjaminnya pengadaan padi atau beras. Sumbangan rakyat berupa material sudah cukup banyak, seperti perhiasan emas, intan/berlian. Sumbangan ini sifatnya insidentil, dan tidak teratur. Pemerintah memerlukan sumber yang teratur dan terjamin berupa padi dan beras. Karena itu Pemerintah Daerah Sumatra Barat mengeluarkan Maklumat No. 14 tahun 1946.

Penyerahan bakti rakyat ini diatur sebaik-baiknya. Pada tiap-tiap negeri diadakan satu Komisi yang terdiri dari Kepala Negeri sebagai ketua dan sekurang-kurangnya

mempunyai 2 orang anggota terdiri dari wakil-wakil Komite Nasional setempat.

Pada tanggal 27 sampai dengan 30 Maret 1947 diadakan Konperensi Wali-Wali Negari se Sumatra Barat di Bukittinggi. Dalam konperensi ini Residen Sumatra Barat Mr. St. Moh. Rasyid menguraikan panjang lebar tentang soal perjuangan kemerdekaan. Begitu pula para anggota D.P.D. serta beberapa Kepala Jawatan Pertanian, kesehatan dan lain-lain mengajak para Wali Negari untuk menginsafi sedalam-dalamnya bahwa kemenangan akan tercapai apabila segenap lapisan rakyat ikut berjuang. Dalam hal ini dipesankan lagi soal pungutan bakti rakyat 10% dari penghasilan padi yang harus dipungut dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan itu Residen Rasyid mengemukakan gagasan mendirikan "Majelis Kredit" sebagai suatu badan yang memberikan bantuan kepada petani. Majelis Kredit untuk membantu petani dan program melipat gandakan makanan.

Untuk merealisasikan gagasan Residen dan untuk meningkatkan dan mendorong petani agar lebih produktif dibentuklah "Majelis Kredit". Badan ini dibentuk oleh D.P.D. Sumatra Barat. Badan ini berfungsi menampung kebutuhan petani dengan jalan memberi pinjaman uang dari pemerintah buat bercocok tanam seperti usaha sayur mayur.

Ketika mengadakan dinas berkeliling Sumatra Barat Residen Mr. St. Moh. Rasyid mengetahui bahwa ada di antara anggota tentara karena kekurangan uang berusaha meminjam kepada rakyat dengan mengeluarkan bon-bon pinjaman. Hal itu kalau dibiarkan berlarut-larut bisa merenggangkan antara rakyat dengan tentara.

Residen merundingkan hal tersebut dengan Gubernur Sumatra Mr. T.M. Hasan untuk mencari pemecahannya. Kemudian dicetaklah uang untuk daerah Sumatra

Barat sebanyak Rp. 1.500,— juta rupiah. Uang tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat, sepertiga untuk tentara, sepertiga untuk pegawai, dan sepertiga untuk para petani.

Sebagai pengawas Majelis Kredit ditunjuk Sekretaris Keresidenan, Eni Karim dan Anwar St. Saidi. Kredit itu dibagikan kepada 500 negari, tiap-tiap negari mendapat Rp. 1.000.000,— Arti pinjaman kepada petani ini sangat menggembirakan. Sesudah pinjaman berjalan enam bulan kelihatan hasil panen meningkat dan sebagian petani sudah ada yang berhasil mencicil hutang mereka kepada pemerintah.

4. Kebijaksanaan perekonomian/keuangan.

Di sekitar tahun 1947 dibentuk Majelis Keuangan Sumatra Barat dan Riau. Badan ini merupakan Badan Koordinasi untuk memperlancar lalu-lintas perdagangan antara kedua keresidenan dan sekaligus mengkoordinir ekonomi kedua daerah tersebut.

Badan ini berhasil mempererat hubungan antara Sumatra Barat dengan Riau sehingga dalam masalah kelancaran barang-barang komoditi antara kedua daerah itu berjalan baik. Dari Sumatra Barat didatangkan beras dan komoditi lainnya, dan Riau mengirimkan barang-barang eks Singapura yang masuk lewat Pekan Baru. Begitu banyaknya barang-barang yang masuk dari Singapura ke Bukittinggi sehingga gudang di belakang kantor Residen (di Bukittinggi) penuh dengan barang-barang tekstil, ban-ban mobil, bensin dari Minas serta barang untuk keperluan perjuangan lainnya.

Negari-negari yang memerlukan barang-barang tersebut lebih banyak dari barangnya. Sehingga negari-negari yang berjasa seperti menanam palawija dan tanaman-tanaman lainnya bagi keperluan perjuangan lebih diutamakan. Hadiah diberikan bagi negari-negari yang berhasil

sebagai pemenang dalam perlombaan membantu pemerintah untuk mencukupkan bahan makanan.

Sebagian pedagang berhasil memanfaatkan kesempatan hubungan lalu-lintas Sumatra Barat – Riau tersebut. Terjadilah penyelundupan-penyelundupan barang antara Singapura, Riau dan Sumatra Barat. Untuk mengatasi hal tersebut diadakan suatu pos Polisi Istimewa/Mobrig di perbatasan Riau – Sumatra Barat. Dan dengan seizin Gubernur Sumatra diadakan douane di dekat Bangkinang untuk memungut bea cukai bagi barang yang masuk. Hasilnya lumayan untuk menambah keuangan Sumatra Barat. Sudah barang tentu keadaan ini hanya berlaku buat sementara saja. Adalah ganjil apabila satu daerah memungut bea cukai dari daerah tetangganya. Peraturan tersebut bertujuan sekedar mencegah spekulan-spekulan agar tidak mengeduk keuntungan terlampau banyak.

Majelis keuangan Sumatra Barat dan Riau berjalan sampai Agresi II. Sesudah Belanda menduduki Bukit tinggi dan Pekan Baru usaha Majelis Keuangan tersebut terhenti.

5. Pengumpulan Emas untuk Perjuangan.

Pada saat masih berlangsungnya pertempuran di berbagai front pada waktu Agresi I Belanda, Residen Rasyid dan Komandan Divisi Kol, Ismael Lengah mengadakan pertemuan pada tanggal 27 Juli 1947 di bioskop Padang Panjang. Pertemuan membicarakan cara bagaimana untuk mendapatkan dana perjuangan. Rasyid dan Ismael Lengah membentangkan suka duka para prajurit di front, dan pembunuhan Walikota Padang secara kejam oleh Belanda. Kedua pemimpin secara sungguh-sungguh menguraikan keperluan para pejuang yang semakin meningkat terutama karena setelah meluasnya front sebagai akibat dari Agresi I tersebut.

Hadirin tergugah dan memahami maksud yang dimintakan oleh kedua pemimpin tersebut, Tanpa berpikir panjang dan spontan mereka menyerahkan dan mendaftarkan sumbangan. Kaum ibu melepaskan gelang, subang, liontin bahkan cincin kawin mereka. Sumbangan yang terkumpul di luar dugaan. Sementara hadirin melupakan kesulitan mereka di masa yang masih jauh dari sejahtera.

Lebih kurang dua bulan kemudian yakni pada tanggal 27 Desember 1947 dibentuk pula Panitia Pusat Pengumpulan Emas. Usaha ini diprakarsai oleh Wakil Presiden Dr. Moh. Hatta. Panitia bertujuan untuk mengumpulkan sumbangan emas dari rakyat untuk membeli sebuah pesawat terbang. Kampanye emas ini berhasil menarik sumbangan dari para cerdik pandai, alim ulama dan ninik mamak. Dari hasil sumbangan tersebut dapat dibeli sebuah pesawat terbang. Tetapi malang pesawat terbang tersebut kemudian mendapat kecelakaan dekat Tanjung Hantu di daerah Malaysia sekarang. Dua orang penerbang kita yaitu Halim Perdanakusumah dan Iswahyudi tewas dalam kecelakaan ini. Masyarakat Bukittinggi merasa terpukul karena kepergian kedua penerbang yang masih muda-muda dan sangat diharapkan dalam perjuangan itu.

Sisa emas hasil sumbangan sebanyak 2½ kg dititipkan pada Bank Negara. Kemudian sesudah pengakuan kedaulatan emas tersebut diserahkan kepada Bank Indonesia di Jakarta. Kepala cabang Bank Negara Indonesia di Padang Syamsu Anwar pernah mengusulkan agar emas rakyat itu tetap disimpan di Padang sebagai lambang keikhlasan dan kegotong-royongan masyarakat Sumatra Barat di dalam masa perjuangan kemerdekaan. Namun entah bagaimana, emas tersebut tetap dibawa ke Jakarta.

4. Perkembangan Pendidikan

1. Sekolah lanjutan.

Setelah Belanda menguasai kota Padang sekolah-sekolah-

pun ikut dipindahkan ke Padang Panjang, Bukittinggi dan ke kota-kota lainnya. Di daerah yang dikuasai Republik pendidikan berjalan terus, walaupun mengalami berbagai kesulitan. Sesudah Pemerintahan Daerah Sumatra Barat, Markas Divisi Banteng, Komandemen Sumatra dan Sub Gubernur Sumatra berkedudukan di Bukittinggi maka kota ini semakin menjadi ramai. Penduduk kota Bukittinggi berkembang dengan pesat, sebelumnya berjumlah $\pm$ 40.000 orang, kemudian menanjak mencapai lebih dari 100.000 orang. Dengan pertambahan itu terasa kekurangannya sekolah untuk menampung murid-murid terutama bagi Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang sebelumnya tidak ada di Bukittinggi. Atas inisiatif Adlinsyah Jeni dengan beberapa orang teman-temannya diadakan pertemuan perundingan yang dihadiri antara lain oleh Dr. Roesma dan tokoh masyarakat untuk memecahkan masalah ini. Dari pertemuan ini kemudian dapat didirikan sebuah sekolah yang dinamakan Sekolah Menengah Tinggi (S.M.T.). Sekolah ini dipimpin oleh Dr. Roesma yang dalam perkembangannya menjadi Sekolah Menengah Atas (S.M.A.). Untuk melengkapi kepustakaan sekolah Adlinsyah Jeni menyumbangkan buku-bukunya ketika masih jadi pelajar di Algemene Middlebare School di Surabaya dulu.

Setelah itu berjalanlah S.M.A. yang pertama di Sumatra Barat (tahun 1946). Sekolah ini mengalami berbagai kesulitan terutama mengenai masalah tenaga pengajar, sarana pendidikan/laboratorium dan buku pelajaran. Mengingat banyaknya lulusan Sekolah Menengah Pertama sedangkan S.M.A. yang dapat menampung hanya satu, kembali Adlinsyah Jeni mengadakan pembicaraan dengan Rakana Dalyan, Bupati Rosman dan Darjis Bebastani. Sebagai hasilnya berdirilah S.M.A. Gajah Tongga di bawah Yayasan Gajah Tongga. Sekolah ini mendapat perhatian cukup besar dari pelajar-pelajar tamatan S.M.P. waktu itu.

Dalam perkembangan selanjutnya dirasa perlu mendirikan sekolah-sekolah menengah seperti: Sekolah Teknik Mene-

ngah (S.T.M.), Sekolah Pertanian Menengah Tingkat Atas (SPMA), Sekolah Guru A dan B, Pendidikan Siswa Minangkabau (PSM), suatu lembaga pendidikan yang sudah ada sejak tahun 1918 yang berstatus swasta.

Untuk memajukan bidang kesehatan dibangun pula sebuah Sekolah Bidan, pada mulanya di bawah pimpinan Dr. Sadikin, kemudian di bawah Nyonya Dr. Thomas. Berikutnya didirikan pula Sekolah Asisten Apoteker dan Sekolah Perawat.

Pada waktu ini sekolah-sekolah Menengah Islam juga berkembang di Bukittinggi dan di kota-kota lainnya di Sumatra Barat. Di Bukittinggi didirikan Sekolah Menengah Islam (S.M.I.).

2. Akademi Pamongpraja dan Administrasi.

Sesuai dengan peningkatan dalam bidang pemerintahan dan untuk mendapatkan kader-kader kepamongprajaan yang baik timbul gagasan untuk mendirikan Akademi Pamongpraja dan Administrasi. Pertama muncul masalah staf pengajar untuk kualifikasi suatu Akademi. Tetapi dengan menetapnya Wakil Presiden dengan beberapa orang staf beliau dan begitu pula dengan pindahanya Gubernur Sumatra ke Bukittinggi, maka masalah staf pengajar dapat teratasi. Akademi Pamongpraja itu diresmikan tanggal 1 Januari 1948 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatra No. 9/I/Pd tanggal 14 Januari 1948. Sekolah ini adalah Akademi Pamongpraja yang pertama di daerah Republik Indonsia yang dipimpin oleh Dr. Jamil Dt. Rangkayo Tuo.

Mahasiswa yang diterima terdiri dari utusan seluruh keresidenan di pulau Sumatra dan masing-masing Keresidenan mendapat jatah 10 orang calon mahasiswa harus melalui ujian masuk yang diadakan di masing-masing daerah. Jumlah mahasiswa yang diterima 100 orang. Umumnya terdiri dari pegawai berpendidikan menengah, bahkan ada yang telah pernah duduk di perguruan tinggi. Selain itu diterima pula mahasiswa dengan status sebagai pendengar.

Para pengajar terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Dr. Jamil Dt. Rangkyo Mudo, Mr. St. Moh. Rasyid, Mr. Harun Al Rasyid, Mr. Rufinus Lumban Tobing, Mr. A. Siddik, Mr. A. Latif, Danubroto dan lain-lain. Selain itu ceramah-ceramah sering pula diberikan oleh para pembesar yang berkunjung ke Bukittinggi antara lain oleh St. Syahrir.

Patut dicatat satu-satunya wanita utusan dari Palembang pada Akademi ini ialah Nyonya Hasnah. Ia merupakan wanita pertama yang memasuki sekolah pamong dan akhirnya menjadi wanita pertama dalam sejarah Republik Indonesia yang menjabat pamongpraja di daerah Sumatra Selatan.

Pendidikan Akademi Pamongpraja berlangsung 3 tahun. Tetapi karena adanya Agresi Belanda ke II tak dapat dilanjutkan. Pada waktu Agresi Belanda II ini banyak mahasiswa Akademi tersebut aktif membantu Pemerintah Sumatra Barat. Bahkan sebagian dari mereka diangkat menjadi Camat Militer dan yang kembali ke daerahnya ikut bertugas di daerah masing-masing.

Sesudah Agresi II seluruh mahasiswa dipanggil kembali. Panggilan ini tidak berhasil karena sebagian besar para mahasiswa telah bekerja di daerah masing-masing. Ada pula yang pergi ke Jawa untuk melanjutkan studinya atau mencari pekerjaan lain.

Sebagian dari mereka yang dapat berkumpul kembali kemudian membicarakan tentang kelanjutan dan status sekolah mereka. Pembicaraan ini kemudian disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta. Sebagai hasil perjuangan mereka akhirnya Menteri Dalam Negeri Mr. Susanto Tirtoprojo tanggal 30 Juni 1950 memberi ijazah kepada mereka yang pernah belajar pada Akademi Pamongpraja dan Administrasi di Bukittinggi.

3. Pendidikan perwira Bukittinggi

Dalam bidang pengadaan perwira militer Bukittinggi ter-

catat sebagai tempat pertama di Sumatra Barat yang mendirikan suatu pendidikan perwira. Usaha untuk mendirikan pendidikan perwira ini adalah suatu tindakan yang tepat. Waktu itu memang dirasakan pentingnya untuk segera mempersiapkan kader-kader pimpinan dalam ketentaraan yang dapat menunjang kebutuhan tenaga pimpinan di front pertempuran atau masa-masa sesudahnya. Pada sisi lain disadari bahwa tenaga dan sarana serta waktu tidak begitu menggembirakan.

Pada bulan Januari 1946 komandan Divisi III Kol. Dahlan Jambek meresmikan berdirinya Pendidikan Perwira Tinggi angkatan pertama di asrama Jalan Bukit Apit. Dalam sikap yang sempurna 96 orang pemuda terpilih menghadap dengan tegap kepada komandan Divisi siap untuk diterima dalam kawah Candra dimuka. Para calon perwira itu sebagian besar berasal dari siswa putus sekolah H.B.S., Mulo dan Tyu Gakko. Mereka diseleksi dari sekian ratus orang yang mendaftarkan diri.

Patut dicatat pidato yang disampaikan Kol. Ismael Lengah pada calon perwira muda ini:

"Mungkin tidak semua kamu akan sanggup mengikuti latihan yang bakal keras dan kasar ini apalagi bagi manusia biasa Kamu di sini disiapkan untuk perang, untuk berontak, untuk merdeka tiada untuk yang lain.

Pelatih-pelatih utama adalah bekas-bekas opsir Gyu Gun yang mempunyai predikat terbaik dalam pendidikannya dahulu. Latihan dan pengetahuan kemiliteran sebagian besar didasarkan pada doktrin Angkatan Darat Jepang, ilmu persenjataan, sejarah, hukum, ilmu kepolisian, kepemimpinan serta ceramah-ceramah dari dosen tamu terutama dalam bidang politik perjuangan R.I. saat itu. Beberapa dari para dosen tersebut adalah Kol. Tit. Mr. Harun Al Rasyid, Letkol. dr. Nazaruddin, Letkol. Mr. Nazaruddin dan Komisaris Polisi Djoyodirdjo.

Pendidikan dibagi atas tiga tahap:

1. Tahap pertama tingkat dasar dan lanjutan.
2. Bertugas praktek di kesatuan-kesatuan atau di daerah per-tempuran.
3. Tahap pelengkap.

Semua latihan dilalui dalam waktu 10 bulan penuh. Setelah selesai mereka dilantik berdasarkan nilai pada masa pendidikan dan diangkat dengan pangkat Letda, Pembantu Letnan, dan ada yang Sersan Mayor. Walaupun dalam waktu yang relatif pendek ternyata mereka sanggup menimbulkan kepercayaan kepada diri sendiri dan pada umumnya mereka berhasil memimpin kesatuan-kesatuan setelah bertugas di tempat masing-masing.

Sekolah perwira Bukittinggi sempat menamatkan lulusannya sebanyak dua angkatan:

1. Angkatan pertama sebanyak 96 orang.
2. Angkatan kedua sebanyak 60 orang.

Semua perwira lulusan Sekolah Perwira Bukittinggi ini telah membuktikan, bahwa mereka tak pernah mengecewakan cita-cita para pendiri-pendirinya.

5. Mass Media

Peranan pers dan radio sangat penting terutama dalam membangkitkan semangat juang. Di samping itu keduanya dapat memberikan informasi-informasi penting bagi rakyat, teristimewa pengumuman-pengumuman, pemberitaan-pemberitaan dari pusat dan daerah.

Suatu hal yang sangat penting lagi bahwa pers dan radio dapat menembus pertahanan dan daerah musuh. Pemancar Radio R.I. di Padang dan Bukittinggi aktif di udara. Begitu juga harian-harian Republikan yang terbit di Padang dan Bukittinggi.

Di Padang terbit Harian Utusan Sumatra dipimpin oleh Barisan A dan di Bukittinggi Harian Kedaulatan Rakyat dipimpin oleh Adinegoro, Harian Pancasila oleh Usman Hasibuan, Harian Pedoman Kita dan Demokrasi oleh Yusja dan Yusuf. Begitu pula Adlinsyah Jeni menerbitkan Harian Warga Negara.

Kebanyakan di antara surat kabar itu terbitnya sangat singkat antara lain karena masalah kekurangan modal/bahan baku yang memang langka pada waktu itu, atau karena penerbitnya telah bertugas di bidang lain.

Harian yang agak lama terbitnya di Bukittinggi ialah Harian Kedaulatan Rakyat, dan terus terbit sampai tentara Belanda menduduki kota Bukittinggi pada waktu Agresi Belanda II, Desember 1948.

Dengan pindahanya Gubernur Sumatra ke Bukittinggi ikut pula jawatan-jawatan tingkat I Sumatra. Dan waktu itu berkumpul pulalah di Bukittinggi wartawan-wartawan dari Sumatra Timur dan wartawan dari Jawa. Di antara mereka tercatat nama Parada Harahap yang kemudian bersama kawan-kawannya mendirikan Harian Detik. Harian ini dipimpin oleh Hadeley Hasibuan.

Surat kabar Detik ini merupakan harian yang populer di kalangan masyarakat. Berita-beritanya sensasi dan berani. Pernah surat kabar Detik ini memuat tulisan Hamka yang berjudul "Kami Jurnalis" yang isinya bersifat *Social control*. Hamka dalam tulisan ini membela Parada Harahap yang ditahan oleh tentara karena merasa dikritik.

Kehadiran surat kabar Detik di ibukota Sumatra waktu itu dirasakan sangat menguntungkan masyarakat. Sebagai suatu alat *Social control* di tengah-tengah bergejolaknya revolusi. Karena semuanya serba baru, serba kurang pengalaman maka mengenai masalah hak dan kewajiban kadang-kadang terlihat serba kabur.

Bagian penerangan Divisi Banteng menerbitkan pula Harian Tabloit Banteng dan kemudian menjelang Agresi II dicetak dalam ukuran besar.

Adinegoro di samping menerbitkan Harian Kedaulatan Rakyat mengadakan cabang Kantor berita "Antara" di Bukittinggi.

Selain surat kabar peranan radio dalam waktu ini bukan saja membangkitkan semangat juang dan menyiarkan lagu-lagu perjuangan, juga sebagai berita-berita menambah ilmu pengetahuan rakyat. Dalam situasi di mana komunikasi antara pusat dan daerah cukup sulit, sedangkan banyak maklumat-maklumat dari pemerintah pusat yang perlu diketahui segera oleh masyarakat, radio merupakan pilihan yang tepat.

Pidato-pidato dari para pemimpin melalui radio dapat mencapai kaum republikan yang berada di daerah musuh. Radio waktu itu merupakan alat yang ampuh untuk melancarkan perang urat syaraf dalam menghadapi musuh.

Pada mulanya R.R.I. Bukittinggi terletak di Anak Air. Secara administratif berada di bawah pimpinan Adinegoro, Kepala Pusat Penerangan Republik Indonesia Sumatra — P.P.R.I.S. yang berkantor di Birugo. Kemudian pemancar radio RIM (Radio Indonesia Merdeka) dibangun pula oleh Penerangan Divisi IX Banteng.

6. Kebudayaan dan kesenian

Dalam masa bergejolaknya revolusi bidang kebudayaan dan kesenian di Sumatra Barat berkembang pula sejalan dengan perkembangan suasana perjuangan. Untuk menampung hasil karya budaya di Padang Panjang dibangun sebuah gedung kebudayaan yang dipimpin oleh Moh. Syafei. Gedung ini dulunya bekas Kafetaria tentara Belanda dan dibenahi seperlunya sesuai dengan kebutuhan.

Sebelum adanya gedung ini pertunjukan-pertunjukan untuk menyambut tamu-tamu agung dan acara-acara lainnya

diadakan di bekas rumah Asisten Residen Belanda di Padang Panjang. Pada saat itulah terasa benar kebutuhan akan sebuah gedung kebudayaan yang khusus dan dapat digunakan untuk menerima tamu-tamu dan keperluan lainnya. Patnaik salah seorang hartawan India begitu terkesan terhadap permainan biola salah seorang anak tuna netra, Arsyad, yang membawakan lagu-lagu klasik dengan penuh bakat. Hartawan India ini berkenan mengirim Arsyad bersama kakaknya Bustanul Arifin untuk melanjutkan pendidikannya ke luar negeri.

Di samping adanya kegiatan dalam bidang musik, tarian-tarian, juga diadakan kegiatan dalam bidang penyelidikan cerita-cerita rakyat. Usaha ini mencoba menginventarisasi cerita rakyat yang ada dan mencoba menyaring dongeng-dongeng/folklore dengan tujuan menjadikan buku sebagai sumbangan dalam menyusun sejarah Minangkabau. Dalam kegiatan ini oleh dr. Rasyidin telah mengunjungi daerah-daerah yang mempunyai objek peninggalan sejarah Minangkabau seperti Sungai Tarab, Lima Kaum, Sumanik, Pagaruyung, Saruaso dan lain-lainnya. Dalam perjalanan keliling inilah diketahui bahwa salah seorang keturunan Kerajaan Pagaruyung, yakni Sultan Bagagar Alamsyah meninggal dalam pembuangan Belanda di Jakarta.

Di antara cerita-cerita lama itu ada yang digubah dan kemudian diangkat menjadi suatu drama untuk dipentaskan pada Gedung Kebudayaan tersebut. Penyelidikan atas cerita-cerita rakyat itu berlangsung sampai dengan Agresi Belanda I.

Dalam bidang kesenian banyak diciptakan lagu-lagu yang bernafaskan perjuangan yang membangkitkan semangat tempur. Di antara lagu itu adalah *Maju Tak Gentar*, *Barisan Berjalan Kaki*, *Harimau Kuranji*, *Barisan Banteng*, *Mengenang Arwah*, *Menyerbu*, dan lain-lain.

Para seniman waktu itu banyak berkumpul di kota Bukittinggi, lebih-lebih setelah Belanda menduduki Pematang Siantar. Di antara mereka adalah A. Chalik pemimpin orkes

yang terkenal, Lily Suhainy, Wakidi salah seorang pelukis terkemuka di Sumatra Barat. Begitu pula mereka yang berada di kota ini seperti Syamsuddin Syafei tokoh perkumpulan sandiwara Ratu Asia dan Bagindo M. Thahar yang pernah mengadakan pertunjukan sandiwara di Bukittinggi dengan cerita *Bahagia*.

Begitu pula pelukis Nasroen A.S. dan Usman Kagami bermukim pula di kota ini dalam pengungsian yang pernah dipercayai pemerintah untuk membuat klise-klise uang URIPS.

B A B VIII

CATATAN BELAKANG

1. John Coast, *Recruit to Revolution*, (London, Christophers, 1952), halaman 108 - 109.
 2. *Ibid*, halaman 105.
 3. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau 1945 - 1950, I* (Jakarta, BPSIM, 1978), halaman 516.
 4. *Ibid*, halaman 277.
 5. H. Soebagiyo I.N., *Sejarah Pers Indonesia*, (Jakarta, Dewan Pers, 1977), halaman 66 - 67.
 6. Hamka, *Kenang-kenangan Hidup IV*, (Djakarta, Gapura, 1952), halaman 96.
 7. Wawancara dengan Usman Kagami, Padang, 1976.
-

B A B IX

BUKITTINGGI SEBAGAI PUSAT PERJUANGAN RI DI SUMATERA

1. Tempat kedudukan berbagai lembaga pemerintahan dan pusat perjuangan

Kota Bukittinggi yang berjarak ± 90 km dari kota Padang dan terletak di daratan tinggi Agam beriklim nyaman dan sejuk. Dalam sejarahnya baik pada masa penjajahan Belanda, Jepang dan setelah kemerdekaan pernah merupakan kota yang memegang posisi kunci di Sumatra Barat dan bahkan di Sumatra. Dalam perang kemerdekaan Bukittinggi tercatat sebagai kota penting karena aktivitas perjuangan dipusatkan di sini dan sekaligus sebagai tempat kedudukan pemimpin-pemimpin perjuangan.

Pada awal revolusi kota Padang menjadi ibukota Sumatra Barat. Ia merupakan pusat perjuangan dalam menghadapi Sekutu dan Belanda. Namun setelah kota Padang ditimbang-terimakan Sekutu kepada Belanda, maka secara berangsur-angsur kota Bukittinggi menjadi penting. Bukittinggi tampil menjadi pusat perjuangan Sumatra Tengah dan bahkan untuk seluruh Sumatra. Bukittinggi juga menjadi markas Komando Divisi III Banteng, yakni kesatuan tentara yang berada di Sumatra Tengah.

Demikian pula setelah terbentuknya barisan-barisan rakyat, tempat kedudukan pucuk pimpinannyapun terletak di Bukittinggi. Pucuk pimpinan ini bukan saja untuk Sumatra Barat tetapi juga untuk Riau dan Jambi. Kota Bukittinggi juga menjadi tempat kedudukan hampir semua partai dan organisasi waktu itu.

Kedudukannya sebagai pusat perjuangan semakin menonjol setelah pasukan Belanda menduduki kota Medan dan Pe-

matang Siantar. Dalam hal ini markas Komandemen Sumatra yang sebelumnya bermarkas di Prapat, dipindahkan ke Bukittinggi. Begitu pula ketika Pematang Siantar dikuasai Belanda kedudukan pemerintah Propinsi Sumatra juga pindah ke Bukittinggi bersama kantor pusat K.N.I. Sumatra. Setelah Sumatra ditetapkan menjadi tiga propinsi, yaitu Propinsi Sumatra Utara, Propinsi Sumatra Tengah dan Propinsi Sumatra Selatan, kota Bukittinggi dikukuhkan menjadi ibukota Propinsi Sumatra Tengah yang membawahi Sumatra Barat, Riau dan Jambi.

Pada waktu situasi perjuangan bertambah meningkat di mana hubungan dengan Jawa semakin sulit, pada bulan Juli 1947 Bung Hatta dan beberapa menteri kabinet diputuskan untuk berangkat ke Bukittinggi. Beliau ditugaskan di samping sebagai Wakil Presiden juga sebagai pemimpin perjuangan untuk Sumatra.

Setelah Propinsi Sumatra dipecah menjadi tiga propinsi Mr. Teuku Moh. Hasan diangkat menjadi Ketua Komisaris Pemerintah Pusat (Kompempus) dan Mr. Gafar Pringgodigdo sebagai Komisarisnya. Keduanya berkedudukan di Bukittinggi. Sedangkan Mr. Moh. Rasjid di samping sebagai Residen juga diangkat sebagai Komisaris Negara Urusan Keamanan buat seluruh Sumatra.

Pada tahun 1948 di Bukittinggi dibentuk Staf Umum ALRI Komando Sumatra dengan Laksamana M. Zakir, sebagai Kastaf dan Kolonel Adam sebagai Waka. staf. Setelah Bung Hatta menerima penyerahan kekuasaan Pemerintah Pusat untuk memimpin perjuangan untuk Sumatra yang berkedudukan di Bukittinggi maka kota ini bolehlah dikatakan sebagai pusat perjuangan pada waktu itu. Sehingga wajar kalau disebutkan bahwa sesudah Jogja maka Bukittinggi merupakan pusat perjuangan bangsa Indonesia.

Sebagai kota kedua sesudah Yogya maka Bukittinggi ramai dikunjungi, antara lain oleh para pemimpin di Jogya. Bahkan Presiden Soekarno pernah berkunjung ke kota ini pada bulan Juli 1948. Para tamu asing yang pernah datang ke kota ini pada masa revolusi adalah anggota Komisi Tiga Negara (K.T.N.).

2. Konsolidasi kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat

Serangan Belanda dengan Agresi I nya sungguh mengguncangkan. Residen Mr. St. Moh. Rasjid dan Komandan Divisi IX Banteng Kol. Ismael Lengah merasakan situasi sangat berbahaya. Rasa curiga mencurigai, pertentangan antara pimpinan rakyat dengan pemerintah, tiadanya kesatuan komando antara barisan dan tentara resmi (T.R.I.), dan bekas luka akibat Peristiwa 3 Maret 1947 masih belum sembuh, sementara musuh terus menyerbu. Belum lagi kejengkelan kaum adat yang merasa adatnya sering tidak digubris dan diinjak.

Golongan agama melihat para fungsionaris kurang mengindahkan kewajiban agama. Semua problema ini menimbulkan awan mendung di kubu Republik dan dirasakan sangat menusuk perasaan. Dan ketika itulah Belanda melancarkan Agresi pertamanya.

Residen dan Komandan Divisi segera mengadakan pertemuan dengan pimpinan masyarakat baik sipil maupun militer. Pada awal pertemuan Residen menjelaskan bahwa keadaan sudah begitu kritis dan perlunya persatuan yang kokoh dari segenap lapisan masyarakat. Segala prasangka dan dendam pada masa lalu supaya dihabisi. Kalau semua komponen perjuangan tidak bersatu maka pertahanan akan menjadi lemah dan kota Bukittinggi sebagai ibukota dan pusat perjuangan akan segera jatuh ke tangan Belanda.

Segala kritik dan unek-unek dilontarkan ke alamat Residen dan Komandan Divisi. Dan ada lagi yang masih membongkar-bongkar Peristiwa 3 Maret 1947. Pada rapat inilah

dapat diketahui dari mana pusat dan asalnya ketegangan pada masa sebelumnya.

Pada kesempatan itu Residen MR. St. Moh. Rasjid menekankan "meskipun golongan ulama merasa tidak ingin melanjutkan perjuangan namun kami pemerintah dan tentara akan jalan terus". Akhirnya berdasarkan tradisi yang ada dalam masyarakat Minangkabau, keadaan waktu itu diibaratkan seperti "Cabiak-cabiak bulu ayam, akienyo paruh juo manya-lasaikan" (Sobek-sobek bulu ayam akhirnya paruh juga yang menyelesaikan), maksudnya "perselisihan sesama bersaudara akhirnya dapat diselesaikan oleh saudara yang lain. Maka dalam rapat itu dibentuk suatu badan "Penghubung Antara Pemerintah dengan Golongan Agama", yang terdiri dari 3 orang yaitu: Hamka, Haji Rasul Hamidy keduanya dari Masyumi dan Haji Mansur dari Perti.

3. Terbentuknya Front Pertahanan Nasional (FPN)

Beberapa lama kemudian di penginapan Tamu Agung (Bukittinggi) diadakan pertemuan antara Wakil Presiden (Bung Hatta) dengan segenap pimpinan masyarakat, partai-partai, perkumpulan-perkumpulan, golongan ninik mamak, golongan agama, pejabat sipil dan militer. Pertemuan bertujuan memberi tuntunan dalam menghadapi perjuangan yang semakin memuncak. Pada saat itu Wakil Presiden ditunjuk untuk memimpin langsung perjuangan di Sumatra. Dalam pengarahannya itu beliau mengatakan "bahwa dalam perjuangan perlu kesatuan Komando".

Setelah Wakil Presiden meninggalkan ruangan upacara, kemudian hadirin meneruskan rapat. Pada pertemuan itu hampir semua wakil partai dan golongan turut berbicara, dan semuanya menganjurkan perlunya persatuan. Disepakati untuk membentuk suatu lembaga yang menyatukan berbagai kekuatan yang ada dalam masyarakat. Lembaga yang dibentuk tanggal 30 Juli 1946 ini diketuai oleh Hamka, dan Sekretarisnya Khatib Suleman, Oedin mengepalai bidang urusan Pemuda

dan Rasuna Said mengepalai bidang urusan gerakan Wanita. Lembaga itu adalah Front Persatuan Nasional (F.P.N.). Dapat dikatakan F.P.N. adalah pusat perpaduan (himpunan) tenaga rakyat, Simbulnya adalah: tinju besar yang padat, berwarna merah, dan di atasnya tertulis dengan huruf berwarna hitam suatu perkataan "SATU" dengan dasar putih dilingkari oleh rantai.

Barisan-barisan/organisasi yang bersatu dalam FPN adalah berpuluh-puluh banyaknya, di antaranya: Masyumi, Masyumi Muslimat, P.N.I., P.K.I., P.K.I. Lokal Islamy, Perti, Pemsyi, Partai Tarikat Naksyabandiyah, M.T.K.A.A.M., P.S.I.I., Barisan Hizbullah, Sabilillah, Pesindo, Sobsi, Lasymi, Syaifulah, Barisan Hulubalang Muhammadyah, Aisyah, G.P.I.I., Nasyiatul Aisyiah, Pemuda Muhammadyah, Kowani, Perwari, Ibu Kesatria, Persatuan Saudagar, Barisan Teras, Barisan Merah dan lain-lain.

F.P.N. berkaitan langsung dengan Dewan Pertahanan Daerah (D.P.D.) yang dibentuk oleh Pemerintah pada akhir Juni 1946 karena bertambah gawatnya situasi tanah air. Kalau tingkat Nasional namanya Dewan Pertahanan Negara dan di daerah namanya Dewan Pertahanan Daerah. D.P.D. ini diketuai oleh Residen, Wakil Ketua Komandan Divisi, ditambah dua orang anggota Dewan Eksekutif dan tiga orang dari Organisasi kemasyarakatan. Karena tekanan dari Belanda semakin gencar maka F.P.N. membentuk B.P.N.K. (Barisan Pengawal Negeri dan Kota). Setiap orang yang berumur 17 tahun sampai dengan 35 tahun harus menjadi anggota pengawal kota dan negeri tempatnya tinggal dan kampung halamannya. Tugasnya ialah menjaga Negeri dan Kota dari infiltrasi musuh, penjaga keamanan, kesejahteraan kota dan desa, mengharapkan bantuan untuk front, pengawas orang keluar masuk, kurir pertahanan dan sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya pada bulan Januari 1948 D.P.D. berubah menjadi Markas Pertahanan Rakyat Daerah (MPRD).

4. Rasionalisasi dan Rekonstruksi dalam Ketentaraan

Pengalaman berperang melawan Belanda terutama dalam masa agresi I telah menimbulkan pemikiran tentang kekurangan dan kelebihan angkatan bersenjata kita. Dalam menghadapi kemungkinan agresi yang sewaktu-waktu dilancarkan oleh Belanda maka diperlukan semacam penataan yang baru di bidang ketentaraan baik struktur maupun personalnya. Dalam hal ini diperlukan militer yang terlatih baik dengan mobilitas serta daya tempur yang tinggi serta dapat bergerak antar kantong-kantong. Pikiran itu menyebabkan lahirnya gagasan untuk mengadakan reorganisasi dan rekonstruksi dalam tubuh T.N.I. Rasionalisasi dan rekonstruksi dalam angkatan perang ini berupa perombakan total baik struktur maupun personalnya. Dalam undang-undang No. 3 Tahun 1948 ditetapkan bahwa Menteri Pertahanan memegang tanggung-jawab baik

administratif maupun strategis teknis. Sebelumnya Menteri Pertahanan memegang bidang administratif, sedangkan bidang strategis teknis ada pada Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Dalam melaksanakan instruksi rasionalisasi dan rekonstruksi di Sumatra, Kolonel Ismael Lengah mewakili Panglima Komandemen Sumatra telah berangkat ke Yogya untuk menemui Kepala Staf Angkatan Perang R.I. dan Menteri Pertahanan Drs. Moh. Hatta. Dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh tersebut beliau mengatakan bahwa di Sumatra khususnya di Sumatra Barat dan Riau sebagian besar perwira-perwira masih muda-muda. Karena itu pelaksanaan rasionalisasi/rekonstruksi agak sukar. Namun Pemerintah harus melaksanakannya dengan alasan-alasan khusus. Pelaksanaan rasionalisasi dan rekonstruksi tersebut memang sangat berat. Untuk keperluan itu A.H. Nasution merasa perlu untuk datang ke Bukittinggi yang waktu ini merupakan Markas Komandemen Sumatra. Jendral Mayor Suharjo sebagai Komandan Komandemen Sumatra waktu itu menjelaskan kepada Nasution bahwa dari hasil pengalaman dan pengamatannya selama bertugas di Sumatra bahwa kehi-

dupan ketentaraan di Sumatra jauh berbeda di Jawa. Hal ini berpokok pangkal dari cara-cara hidup dan adat istiadat dan keadaan setempat. Dengan perkataan lain sulit untuk memisahkan tentara dan komandannya dari masyarakat sekitarnya.

Namun demikian rasionalisasi/rekonstruksi harus jalan sebagai suatu program yang telah digariskan pemerintah. Agar dapat memperlancar pelaksanaan program tersebut pemerintah telah mengutus dua orang pejabat, yakni Letkol Dan Yahya dan Nazir Dt. Pamuncak ke Bukittinggi. Akhirnya dengan penuh kebijaksanaan rasionalisasi/rekonstruksi dapat dilaksanakan dalam slagorde Divisi IX Banteng walaupun menghadapi berbagai kesulitan.

Komando pertama : Merupakan daerah komando brigade II Sumatra.

Komando kedua : Merupakan komando teritorial.

Keduanya meliputi wilayah Sumatra Tengah (Sumatra Barat dan Riau). Brigade II ini merupakan brigade mobil terdiri dari staf brigade dengan kesatuan-kesatuannya. Brigade II Sumatra ini direncanakan khusus menghadapi pertempuran-pertempuran, bersenjata riel dan bersifat mobil dengan Komandan Letkol A. Halim Husein. Untuk Komando teritorial Sumatra Tengah ditunjuk Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim dan sebagai Kepala Staf ialah Mayor Thalib.

Pada tanggal 5 Oktober 1948 tersebut dilaksanakan pe-lantikan brigade II bertempat di lapangan Kantin Bukittinggi oleh Komandemen Sumatra. Dengan strukture ini susunan Divisi IX Banteng telah berubah sepenuhnya. Namun jumlah anggota tentara di Sumatra Tengah tidak berkurang. Tidak se-orangpun prajurit yang diberhentikan atau mengalami demobilisasi. Dalam hal ini jumlah 23.000 orang anggota tentara yang sebelumnya yang tergabung dalam Divisi IX Banteng tetap dapat dipertahankan.

Perkembangan dalam komando teritorial agak berjalan lamban. Sebagai Panglima Tentara Teritorial Sumatra (P.T.T.S)

ditunjuk Kolonel Hidayat menggantikan Jendral Mayor Suharjo Harjowardoyo. Sampai akhir November 1948 pembentukan brigade II masih berjalan seret. Karena itu tanggal 16 Desember 1948 Kolonel Hidayat membubarkan Komando brigade II serta Komando teritorial dan membentuk dua komando terpisah, masing-masing untuk Sumatra Barat dan Riau yang diberi nama:

1. Komando T.N.I. kesatuan/teritorial Sumatra Barat dengan Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim sebagai komandan dan Letnan Kolonel A. Halim sebagai Kepala Staf, bemarkas di Bukittinggi.
2. Komando T.N.I. kesatuan/teritorial Riau dengan Mayor Hasan Basri sebagai komandan dan Mayor Toha Hanavi sebagai Kepala Staf, bemarkas di Pekanbaru.

Kebijaksanaan baru ini belum sempat dilaksanakan, karena beberapa hari kemudian Belanda telah melaksanakan agresi Belanda II.

5. Penyempurnaan Pemerintahan Daerah

K.N.I. Daerah Sumatra Barat pada mulanya berfungsi sebagai badan eksekutif. Kemudian secara berangsur-angsur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan Pemerintah mulai menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagai petunjuk pelaksanaan dikeluarkan Maklumat tertanggal 23 Januari 1946, kemudian dikeluarkan pula Maklumat Gu. No. 8/G.M.S. yang antara lain berbunyi bahwa KNID menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Disebabkan situasi belum mengizinkan maka realisasi pembentukan D.P.R.D, belum dapat dilaksanakan. Pada tanggal 12 – 14 Januari 1948 masalah tersebut dibicarakan dalam sidang D.P.R.D. Sidang mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui pembubaran K.N.I. yang sekarang dan pembubaran itu otomatis berlaku waktu telah terbentuknya D.P.R. Sumatra Barat. Sebagai dasar pemikiran untuk

D.P.R. yang baru itu dipakai rencana yang dibuat Sidang Pleno 5 Maret 1946 dengan beberapa amandemen yaitu: "bahwa anggotanya akan berjumlah 100 orang yakni 1 (satu) orang dalam tiap-tiap 25.000 penduduk yang mewakili kewedanaan; yang mewakili partai-partai dan anggota angkatan dengan ketentuan bahwa setiap kemerdekaan diwakili oleh 2 orang anggota; dan menetapkan peraturan-peraturan pemilihan; jumlah anggota perwakilan partai; dan pelaksanaan selanjutnya dari pembentukan D.P.R. itu diserahkan kepada Dewan Eksekutif."

2. Mengadakan perubahan dan sisipan dalam Dewan Eksekutif dengan susunannya sebagai berikut:

Ketua	: Mr. St. M. Rasyid
Wakil Ketua	: Marzuki Yatim
Anggota	: R.K. Ganto Sinaro, Zamzi, Mikimin, Tan Tuah Bagindo Ratu, Ali Akbar dan Nur Suhud.

3. Menghapuskan Eksekutif kewedanaan terhitung 15 Januari 1948 dan inventarisnya diserahkan pada wedana di tempat masing-masing.
4. Penyatuan D.P.N.-D.P.N. yang masih terpecah diserahkan pada kebijaksanaan Eksekutif. Hal yang sama juga berlaku untuk membentuk kota otonom seperti Padang Panjang, Sawah Lunto, Batu Sangkar, Payakumbuh dan Solok.
5. Memberikan hak legislatif kepada Eksekutif dalam keadaan mendesak dan sukar mengadakan rapat pleno. Begitu pula hak untuk menetapkan garis besar dasar pembaharuan dan memperluas resort otonom Negeri dalam daerah Sumatra Barat.

Dalam bulan Pebruari 1948 rampunglah perencanaan mengenai keanggotaan yang akan duduk dalam D.P.R.D. ini dengan beranggotakan 130 orang dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 38 orang Wakil partai-partai
- 78 orang Wakil kewedanan-kewedanan
- 14 orang Wakil dari angkatan.

Cuma D.P.R. Kewedanan yang baru ini, tidak jadi dilantik disebabkan terdapatnya perobahan yang fondamentil dalam sistim pemerintahan daerah. Perubahan tersebut ialah keluarnya U.U. No. 10/1948, tanggal 15 April 1948. Undang-undang ini menetapkan pembagian pulau Sumatra atas 3 propinsi yaitu:

1. Sumatra Utara
2. Sumatra Tengah
3. Sumatra Selatan.

Kemudian disusul lagi oleh U.U. No. 22/1948, tanggal 10 Juli 1948 yang menetapkan penyederhanaan tingkat-tingkat pemerintahan yaitu atas propinsi, kabupaten wilayah. Dengan ini berarti keresidenan beserta lembaga-lembaga legislatif dan eksekutifnya akan dihapuskan.

Untuk merealisasi U.U. No. 10/1948 di atas Pemerintah Pusat membentuk sebuah lembaga bernama Komisariat Pemerintah Pusat (Kompempus) yang berkedudukan di Bukittinggi. Lembaga ini mempunyai 3 orang Komisaris, yang diketuai oleh Gubernur Sumatra Mr. T. Moh. Hasan. Sebelumnya di Sumatra telah ada 2 Komisaris Negara, yaitu:

1. Komisariat Negara Urusan Dalam Negeri di bawah Supeno.
2. Komisariat Negara Urusan Keuangan di bawah Mr. Luckman Hakim.

Kedua lembaga ini kemudian digabungkan ke dalam Kompempus. Kompempus dilengkapi lagi dengan Komisaris Keamanan dengan Ketua Mr. St. Moh. Rasyid. Ia diberi kekuasaan atas Polisi dan Mobrig serta dapat minta bantuan tentara jika diperlukan. Tugas dan kewajiban Kompempus ditetapkan dalam PG. No. 10/1948 adalah:

1. Mengumpulkan bahan-bahan untuk pembentukan daerah-daerah otonom dalam lingkungan propinsi.
2. Meninjau semua pekerjaan yang hingga saat itu dijalankan oleh Gubernur Sumatra dan mengajukan usul-usul kepada pemerintah tentang bagian-bagian pekerjaan tersebut yang ditetapkan sebagai urusan-urusan rumah tangga daerah.
3. Menyelidiki dan jika perlu mengusulkan perbaikan batas-batas wilayah kabupaten yang ada.
4. Merencanakan susunan pegawai bagi kantor-kantor daerah otonom.
5. Mengerjakan usaha-usaha lainnya mengenai persiapan-persiapan pembentukan daerah-daerah otonom.
6. Menjalankan pekerjaan Gubernur Sumatra sampai pekerjaan itu diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Sumatra Utara, Sumatra Tengah dan Sumatra Selatan.

Setelah bekerja selama 3 bulan, pekerjaan Kompempus berhasil dirampungkan dengan sukses, maka berdirilah 3 propinsi yang otonom lengkap dengan alat perangkat pemerintahannya. Tugas yang semula dilaksanakan oleh Keresidenan berangsur-angsur diserahkan pada propinsi. Sebab itu dalam surat ketetapan Kompempus tanggal 23 September 1948 No. 9/Kom/U, melaksanakan pemindahan jabatan yang sebelumnya dipegang oleh Pemerintahan Keresidenan lengkap dengan pegawainya selama waktu dua bulan.

Gubernur Sumatra Utara yang pertama adalah Mr. SM. Amin, Sumatra Tengah Mr. M. Hasnan dan Sumatra Selatan Dr. M Isa. Sedangkan ketiga D.P.R. propinsi tersebut dibentuk pada bulan November 1948.

Keanggotaan D.P.R.S.T. Propinsi Sumatra Tengah berjumlah 29 orang dengan perincian :

- 5 orang dari Riau
- 4 orang dari Jambi
- 20 orang dari Sumatra Barat.

Pada Sidang Pleno ke 2 berakhir sehari sebelum agresi Belanda ke II terpilih H. Ilyas Yakub sebagai ketua D.P.R.S.T. Dalam bulan November 1948 diadakan kongres Rakyat Sumatra Barat dengan dinyatakan berakhirnya Pemerintahan Keresidenan Sumatra Barat dan bubarnya D.P.R.D. Keresidenan yang baru saja dibentuk.

6. Berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)

6.1. Awal Agresi II di Sumatra Barat

Agresi II yang dilancarkan oleh Belanda di Sumatra Barat dimulai dengan munculnya pesawat terbang Belanda di atas kota Bukittinggi pada tanggal 18/19 Desember 1948 tengah malam. Masyarakat mengira bahwa pesawat itu adalah pesawat rahasia yang membawa rombongan Presiden Soekarno dalam perjalanan menuju ke India. Karena itu para pemimpin baik sipil maupun militer yang berada di Kota Bukittinggi mengumpulkan beberapa mobil untuk menerangi pelabuhan udara Gadut. Pesawat udara yang dimaksud tidak kunjung mendarat. Timbullah kecurigaan para penjemput.

Keesokan harinya tanggal 19 Desember 1948 diketemukan banyak pamflet yang rupanya dijatuhkan oleh pesawat semalam itu, isinya menyatakan bahwa perjanjian Renville tidak berlaku lagi. Pagi harinya pesawat terbang Belanda menembaki kota Bukittinggi, asrama tentara, pemancar radio, dan kendaraan-kendaraan di sepanjang jalan. Tembakan itu menimbulkan kepanikan rakyat dan demi keselamatan jiwa mulai hari itu banyak di antara rakyat kota Bukittinggi pergi mengungsi ke daerah-daerah sekitar kota. Tegasnya Bukittinggi yang semula dijuluki sebagai kota "de Yure" telah menjadi sasaran utama Belanda dalam serangannya di Sumatra Barat. Serentak dengan serangan terhadap kota Bukittinggi pagi itu juga

pasukan Belanda bergerak ke front selatan, timur dan utara.

6.2. Kegiatan-kegiatan Pemerintahan Sumatra Barat (Bukittinggi) pada hari-hari permulaan Agresi Belanda ke II

Pada saat-saat pasukan Belanda mulai bergerak di seluruh front dan menembaki serta membom beberapa kota penting di Sumatra Barat, di Bukittinggi sebagai pusat pemerintahan terlihat berbagai kesibukan dalam menghadapi serangan Belanda.

Kalangan angkatan bersenjata setelah situasi tanggal 19 Desember 1948 tersebut, khususnya Kepala Polisi Sumatra Tengah Suleiman Effendi memerintahkan agar pasukan Mobile Brigade (Mobrig) menyingkir dari kota Bukittinggi. Pada hari itu juga pasukan Mobrig Keresidenan disatukan kemudian meninggalkan kota Bukittinggi menuju Palupuh. Ditempat ini mereka membangun pertahanan sepanjang jalan antara Palupuh dan Lubuk Sikaping sampai pengakuan kedaulatan. Tanggal 19 Desember 1948 itu Menteri Kemakmuran R.I. Mr. Syafrudin Prawiranegara yang baru sebulan berada di Bukittinggi. P.P.T.S. Kol. Hidayat dan Gubernur Sumatra Tengah Mr. Nasrun bersama Mr. Teuku Moh. Hasan sebagai Ketua Kompempus Sumatra dan tokoh lainnya berkumpul untuk bertukar pikiran mengenai situasi waktu itu. Para pemimpin tersebut memutuskan untuk membekukan Propinsi Sumatra Tengah dan menghidupkan kembali semua Dewan Pertahanan Daerah (D.P.D.). D.P.D. diberi wewenang untuk menjalankan pemerintahan dan perjuangan. Sebagai Koordinator D.P.D. pada semua Keresidenan ditunjuk Mr. Nasrun, sedangkan Ketua D.P.D. Sumatra Barat ditunjuk Mr. St. Moh. Rasyid yang pada hari itu sedang berada di kota Pariaman.

Pada hari itu juga Mr. Syafruddin, Mr. Teuku Moh. Hasan beserta staf meninggalkan kota Bukittinggi menuju kompleks perkebunan teh Halaban, di sebelah selatan kota Payakumbuh. Menurut rencana keesokan harinya akan disusul oleh P.T.T.S. Kolonel Hidayat.

Suatu pertemuan diadakan P.T.T.S. Kolonel Hidayat dengan Kepala Polisi Sumatra Tengah Suleiman Effendi pada malam harinya tanggal 19 Desember 1948 itu. Pada pertemuan tersebut Kolonel Hidayat menanyakan mengapa pasukan Mobrig dimundurkan ke Palupuh dan tidak ke Halaban untuk melindungi pemerintah Sipil. Pertanyaan tersebut lalu dijawab oleh Suleiman bahwa daerah itu sangat strategis, bergunung-gunung dan daerah belakangnya sampai ke daerah Pasaman adalah daerah surplus beras. Dahulu pada masa perang Paderi Tuanku Imam Bonjol juga membuat pertahanannya di situ dalam perjuangannya menghadapi Belanda. Begitu pula tentara Jepang pada masa Perang Dunia II membuat benteng pertahanan mereka di daerah ini. Jadi daerah ini dipilih karena lebih menguntungkan jika ditinjau dari sudut perjuangan jangka panjang.

Pada pertemuan malam itu, Gubernur Mr. Nasrun dan beberapa tokoh lainnya didesak untuk pindah ke daerah Pasaman. Atas desakan itu Mr. Nasrun dan Ketua D.P.R. H. Ilyas Jakub beserta Staf dengan pengawalan beberapa anggota Mobrig yang disertai pula oleh Kepala Polisi Suleiman Effendi berangkat ke Lubuk Sikaping. Pagi harinya tanggal 20 Desember rombongan sampai di Palupuh di sepanjang jalan mendapat sambutan dari rakyat. Pagi itu diadakan pertemuan dengan rakyat dan dijelaskan tentang penyerbuan Belanda ke Bukittinggi. Dan kepada pemuda-pemuda dibagi-bagikan mesiu untuk bedil balansa (bedil sundut). Dan pemuda-pemuda tersebut kemudian dimasukkan ke dalam B.P.M.K., yang kemudian ternyata banyak memberi bantuan kepada T.N.I. dan polisi dalam perjuangan. Pagi itu pula Kolonel Hidayat dan perwira-perwira lainnya sampai di Palupuh. Dalam suatu upacara di muka pasar Bonjol Kolonel Hidayat menyerahkan enam orang anggota T.N.I. kepada Polisi Sumatra Tengah, untuk ikut berjuang mempertahankan benteng Palupuh bersama Mobrig. Mr. St. Moh. Rasyid yang baru kembali dari Pariaman tanggal 20 Desember 1948 segera mengadakan rapat D.P.D. Dalam rapat itu hadir Abdul-

lah, Khatib Suleiman, Letnan Kolonel A. Halim dan Sirajuddin Abbas. Rapat memutuskan bahwa kota Bukittinggi akan ditinggalkan dan perjuangan selanjutnya akan dilakukan secara gerilya.

6.3. Bukittinggi ditinggalkan

Pada tanggal 20 Desember 1948 Let. Kol. A. Halim menyampaikan kepada Residen Mr. St. Moh. Rasyid bahwa Padang Panjang telah diduduki Belanda. Mr. St. Moh. Rasyid segera mengadakan rapat pada malam hari itu dengan DPD. Diputuskan agar dipimpin Jawatan dan masyarakat yang masih berada di Kota Bukittinggi mundur ke daerah Payakumbuh. Terhadap orang-orang yang karena alasan tertentu tidak dapat meninggalkan Bukittinggi diperbolehkan tinggal dalam kota asal loyalitas tetap kepada Republik Indonesia. Sesudah rapat selesai Residen Mr. St. Moh. Rasyid berangkat meninggalkan kota Bukittinggi menuju Payakumbuh. Sebagai Ketua D.P.D., Mr. St. Moh. Rasyid sepanjang jalan yang dilaluinya mendapat sambutan yang hangat dari B.P.M.K. dan rakyat. Ketika rombongan sampai di Payakumbuh, Residen memberi petunjuk kepada Bupati tentang tindakan-tindakan apa yang harus ditempuh jika Belanda memasuki Payakumbuh. Setelah itu rombongan menuju Halaban. Di sana bertemu dengan tokoh-tokoh pemerintah lainnya yang telah sampai lebih dahulu seperti Mr. Syafruddin Prawiranegara, Mr. Teuku Moh. Hasan, Luckman Hakim, Ir. Sitompul beserta beberapa perwira AURI dari Jawa. Seterusnya Residen Mr. St. Moh. Rasyid sebagai ketua D.P.D. meneruskan perjalanan ke Kota Tinggi dan karena letak negeri ini sangat strategis maka dipilihlah tempat ini menjadi pusat pemerintahan, dan Perang Rakyat semesta segera akan dimulai.

6.4. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia

Telah disebutkan pada halaman terdahulu bahwa sore hari tanggal 19 Desember 1948 Mr. Syafruddin Prawiranegara beserta rombongan meninggalkan kota Bukittinggi menuju

Halaban dan disusul oleh ketua D.P.D. Mr. St. Moh. Rasyid. Di tempat ini diadakan pertemuan khusus antara para Menteri yang kebetulan berada di daerah, dan tokoh-tokoh daerah sendiri. Dalam pertemuan tersebut disadari bahwa perjuangan tak boleh dihentikan begitu saja, karena tertawannya Pemimpin Tertinggi Republik Indonesia beserta beberapa orang menteri dan tokoh-tokoh pimpinan lainnya. Menghentikan perjuangan berarti pengkhianatan terhadap cita-cita proklamasi. Selanjutnya dengan tekad yang bulat mereka memulai musyawarah dan menganalisa situasi. Dan dengan segala kesungguhan menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa diambillah suatu keputusan yang maha penting dalam perjuangan bangsa, yakni dengan membentuk "Pemerintahan Darurat Republik Indonesia" (P.D.R.I.) dengan tujuan:

1. Mengkoordinir pemerintah/perjuangan seluruh daerah Republik Indonesia yang belum diduduki Belanda.
2. Melanjutkan perjuangan gerilya, memupuk moril perjuangan dan semangat rakyat. Adapun personalia dari P.D.R.I. adalah:
 - a. Mr. Syafruddin : Ketua PDRI/merangkap Menteri
Prawiranegara Pertahanan,
Menteri Penerangan,
Menteri Luar Negeri.
 - b. Mr. T. Moh. Hasan: Wakil Ketua PDRI/merangkap
Menteri Dalam Negeri,
Menteri P.P.K.,
Menteri Agama.
 - c. Mr. St. Moh. Rasyid:
Menteri Keamanan / merangkap
Menteri Sosial,
Menteri Pembangunan Pemuda.
 - d. Mr. Luckman Hakim:
Menteri Keuangan,
Menteri Kehakiman.

e. Ir. M. Sitompul : Menteri Pekerjaan Umum,
Menteri Kesehatan.

f. Ir. Indracaya : Menteri Perhubungan,
Menteri Kemakmuran.

g. M. Danubroto : Sebagai Sekretaris P.D.R.I.

Kabinet P.D.R.I. adalah Kabinet perang. Untuk menghindarkan jangan terjadi dualisme dalam pemerintahan maka di Jawa dibentuk Komisariat Pemerintah pusat yang diketuai oleh Kasimo.

6.5. P.D.R.I. adalah Pemerintah berjuang dan pemerintah bergerilya

Tanpa agresi Belanda II P.D.R.I. tidak akan lahir. Karena kawat penghibahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Mr. Syafruddin dan Dr. Sudarsono/Mr. Maramis Cs tidak pernah diterima yang bersangkutan maka PDRI seolah-olah lahir atas kehendak dan prakarsa dari pemuka di Sumatra.

Setelah meninggalkan Halaban pada tanggal 24 Desember 1948 tokoh-tokoh P.D.R.I. menuju Bangkinang dan berkeliling Minangkabau. P.D.R.I. mempunyai pemancar sendiri, karena itu mereka dapat mengirimkan perintah-perintah kepada segenap alat negara. Markas Gubernur Militer Sumatra Barat juga mempunyai pemancar sendiri berikut bantuan perwira-perwira Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) di bawah pimpinan Kolonel Suyono sebagai KASAU. P.D.R.I. dan Letnan I AURI M. Yakub dan hubungan dengan P.D.R.I. dengan mudah dapat diadakan. Dan sering diadakan hubungan antara Ketua P.D.R.I. Mr. Syafruddin Prawiranegara dengan Gubernur Militer Sumatra Barat Mr. St. Moh. Rasyid yang juga merangkap sebagai Menteri Keamanan.

Dengan demikian semenjak Jogja diduduki Belanda dan pemimpin R.I. tertawan, pemerintah R.I. yang resmi adalah P.D.R.I. Karena itu apabila ada perundingan antara pihak Indonesia dengan Belanda seharusnya yang berunding adalah

antara P.D.R.I. dan Belanda. Dan ketika tercapai Roem-Royen Statement, bagi P.D.R.I. sukar menerimanya, karena dilaksanakan tanpa melibatkan mereka. Namun demikian proses terwujudnya persetujuan Roem-Royen selalu diikuti, dengan perantaraan kawat dari Markas Angkatan Perang di Jawa ataupun dari radio.

P.D.R.I. telah mengadakan rapat dari tanggal 10 sampai 16 Mei membahas Persetujuan Roem-Royen. Selanjutnya tanggal 20 Mei 1949 pertemuan Militer tingkat Daerah Sumatra Barat diadakan di Gadut dekat Payakumbuh yang dihadiri oleh hampir seluruh perwira-perwira teras Sub Territorium. Maksud dari rapat tersebut untuk merumuskan suatu rencana tentang bagaimana tindakan selanjutnya jika persetujuan Roem-Royen gagal. Rapat dilanjutkan keesokan harinya yang dihadiri oleh Gubernur Militer dengan acara:

1. Jika gagal : Mempersiapkan dan peningkatan daya tempur dan strategi berikutnya.
2. Jika sukses : Mempersiapkan tentang cara bagaimana memasuki kota, timbang terima dan sebagainya.

Seminggu kemudian yaitu tanggal 28 Mei 1949 Sub Territorium Sumatra Barat telah menerima surat dari tentara Belanda tentang telah tercapainya persetujuan Roem-Royen tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 1949 P.D.R.I. mengadakan rapat di Sungai Naning. Dalam rapat tersebut hadir menteri-menteri P.D.R.I., tokoh-tokoh sipil, militer. Pada rapat tersebut dibahas selain Roem-Royen Statement, juga masalah pengembalian mandat pada Bung Hatta dan penyambutan dan penerimaan utusan dari pusat. Para peserta rapat masih berat untuk menerima cara dan langkah yang telah ditempuh pemerintah pusat. Keberatan tersebut terutama bersumber pada kecurigaan dan ketidak-percayaan kepada itikad baik Belanda. Dan P.D.R.I. memahami keengganan-keengganan pihak pemu-

da dan militer berdasarkan berita dari Markas Angkatan Perang di Jawa dengan P.D.R.I. Setelah bertukar pikiran kemudian diputuskan:

1. Utusan pusat itu tetap ditemui;
2. Mandat akan diserahkan setelah bertemu dengan Jendral Soedirman.

Delegasi yang dikirim Bung Karno — Hatta datang di Bukittinggi pada tanggal 3 Juli 1949. Pihak tentara sudah disiapkan untuk mengamankan delegasi tersebut. Dan pada tanggal 6 Juli 1949 delegasi yang terdiri dari Dr. Leimena, Dr. Halim, dan Moh. Natsir telah sampai ke tempat pertemuan di Guguk Panjang dekat Payakumbuh. Pada mulanya tokoh-tokoh P.D.R.I. menolak untuk kembali ke Yogyakarta. Namun setelah bertukar pikiran hampir satu malam, akhirnya Syafrudin Cs. menyetujui keinginan utusan Yogyakarta, dan bersedia kembali ke kota. Ketika akan kembali ke Jawa Syafruddin sempat menyampaikan isi hatinya kepada tokoh-tokoh Sumatra Barat: "Waktu mendirikan P.D.R.I. kita bukan merebut pangkat dan kursi, karena kita sering duduk di atas lantai saja. Kita tidak puas dengan persetujuan Roem-Rpyen, persetujuan yang dibuat Presiden dan Wakil Presiden dengan memandang sepi P.D.R.I. Tetapi bagi kita semuanya itu tidak dipersoalkan, karena yang penting adalah kejujuran dan keselamatan rakyat. Siapa yang jujur pada rakyat dan pada Tuhan perjuangannya akan berhasil dan selamat".

Begitulah pidatonya yang terakhir untuk teman-teman seperjuangan di Sumatra Barat. Tetapi pada hari itu juga Jendral Soedirman tiba di Yogyakarta dengan hati yang berat. Kedua orang tokoh baik Syafruddin maupun Jendral Soedirman yang memimpin Republik Indonesia dalam keadaan yang paling sulit dalam sejarah perjuangan Indonesia, dan hidup mati Republik sangat tergantung dengan situasi waktu tersebut merasa kecewa. Namun demi menjaga persatuan dan keutuhan Republik, kedua tokoh gerilya ini bersedia ke Yogya-

karta. Dalam perjalanan pulang ke Yogyakarta, rombongan Syafruddin tidak memasuki kota Bukittinggi, tetapi memakai jalan lintas melalui peternakan Padang Mangatas.

Dan sesuai dengan ciri-ciri jalan pintas, jalan lamapun ditinggalkan untuk sementara, walaupun tidak untuk selamanya. Demikianlah Bukittinggi, dari dusun ke kota yang memimpin seluruh Sumatra bahkan pernah mewakili peranan Yogyakarta, kini kembali ke fungsi semula. Sebagai kota ia tidak berhenti di situ, ia terus memberikan pelayanan pada masyarakat, walaupun dalam batas-batas tertentu tidak lagi menjadi pusat perhatian nasional.

CATATAN BELAKANG BAB IX

1. John Coast, *Recruit to Revolution*, (London, Christophers, 1952), halaman 105
2. Hamka, *Kenang-kenangan hidup*, (Jakarta, Gapura, 1952), halaman 56.
3. Wawancara dengan A. Halim, Jakarta 1974.
4. Alastair M. Taylor, *Indonesian Independence and the United Nations*, (London, Stevens & Sons, 1960), halaman 184.

DAFTAR BACAAN

I. Artikel

1. Emzita, "Perguruan tinggi training college Payakumbuh dalam perjuangan bangsa, *Pelita*, 15 Agustus 1977.

II. Buku

1. Abdullah, Taufik. *Minangkabau 1900 – 1927, Preliminary Studies in Social Development*. (Master's Thesis – Cornell 19.....
2. School and Politic, the Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927 – 1933). (Master's Thesis – Cornell University, 19
3. Atmosudirdjo, Prayudi. *Sedjarah Ekonomis, Sosio-logis Indonesia*. Jakarta : Pradnyaparamita, 1962.
4. Audah, Ali (ed). *Memoir Mohammad Hatta*. Jakarta : Tintamas, 1979.
5. Benda, Harry. J. *The cresent and the Rising Sun*. The Hague : Van Hoeve, 1958.
6. Coast, John. *Recruit to Revolution*. London : Christophers, 1952.
7. Enar, Fatimah. *Sumatra Barat 1945 – 1950*. Pemerintahan Daerah Sumatra Barat, 1978.
8. Graves, Elizabeth E. *The ever-Victorious Buffallo : How Minangkabau of Indonesia Solved their colonial question*.
9. Hajerat, Moh, H. *Sejarah Negeri Kurai V Jorong, Pasar Bukittinggi*. Tk : tp : 1947.
10. Hamka, *Ayahku*. Jakarta : Jayamurni, 1967.
11. Kenang-kenangan Hidup IV. Jakarta : Gapura, 1952.
12. I.N., Soebagiyo, H. *Sejarah Pers Indonesia*. Jakarta : Dewan Pers, 1977.

13. Kahin, George Mc. Turnan. *Gouvernement and Politics of Southeast Asia*. Ithaca, New York : Cornell University Press, 1959.
14. Kahin, Andrey. *Indonesia*. New York, Cornell University, 1974.
15. Kanahale, George S. *The Japanese Occupation of Indonesia : Prelude to independence*. (Ph. D thesis — Cornell University Press, 1967.
16. Kroef, J.M. Van der. *Indonesia in the Modern World part II*. Tk : Masa baru, 1956.
17. Mansyur, dkk. *Sejarah Minangkabau*. Jakarta : Bharata 1976.
18. Majo Indo, A.Dt. T. *Tambo Alam Minangkabau*. Jakarta : tp, 1976.
19. Nauman, Junirman. *Latar Belakang Perlawanan Rakyat Minangkabau Permulaan Abad XX*. (Thesis).
20. Sangguno, Diradjo Datuk; *Curai Paparan Adat lembaga alam Minangkabau*. Fort de Kock : Snelpers, tt.
21. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau 1945 — 1950*. Jakarta : B.P.S.I.M., 1978.
22. Syaid, Muhammad, *Sejarah Minangkabau dengan menjaring dan mempergunakan karya penulis asing*. Batusangkar : tp, 1970.
23. Tan Toek Bagindo Ratoe, Soetan Soelaiman. *Minangkabau dengan Minangkabau Raad*. (Koleksi Adnriel Moeis, Bukittinggi, 1940).
24. Taylor, Alastair M. *Indonesia Independence and the united nation*. London : Stevens & Sons, 1960.

III. Wawancara :

1. A. Halim, Jakarta, 1974.
2. Bahar M., Padang, Agustus 1981.
3. Ilyas Datuk Majolelo, Bukittinggi, 5 Juli 1982.

4. M. Dt. Panglimo Kayo, Bukittinggi, 11 Nopember 1982.
5. M. Rasyid Manggis, Bukittinggi, 17 Juli 1982.
6. Mansur Daud Palimo Kayo, 15 Oktober 1982.
7. H. Syarkawi, Bukittinggi, 20 Agustus 1982.
8. Keluarga St. Suis.
9. Rajo Mansur, Padang, Desember 1981.
10. Usman Kagani, Padang, 1976.
11. Yusuf Syib, Bukittinggi, 27 Juli 1982.

